



# LAPORAN KUARTAL I

## Community Adaptation for Forest-Food Based Management in Saddang Watershed Ecosystem

**ADAPTATION FUND PROJECT  
FOOD SECURITY  
Sulawesi Selatan**

**Periode Laporan  
Oktober – Desember 2020**



**KANOPI  
HIJAU**

**BUMI  
LESTARI**

## Acronyms and Abbreviations

AF	Adaptation Fund
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CP	Coordinator Project
CSO	Civil Society Organization
DAS	Daerah Aliran Sungai
ESP	Environmentla and Social Policy
FGD	Focus Group Discussion
FO	Field Officer
GAPOKTAN	Gabungan Kelompok Tani
HPT	Hutan Produksi Terbatas
IE	Implementing Entity
KAPABEL	Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan
KPH	Kesatuan Pengelola Hutan
KM	Knowledge Management
KPPI	Kelompok Peduli Perubahan Iklim
KST	Kelompok Safety Tank
KTH	Kelompok Tani Hutan
KTW	Kelompok Tani Wanita
MONEV	Monitoring and Evaluation
NIE	National Implementing Entity
PAR	Participatory Action Research
PM	Project Manager
PMU	Project Management Unit
PO	Program Officer
SF	Strategic Focus
TOR	Terms of Reference
TORA	

## Daftar Isi

### Acronym and Abbreviations

<b>A. INFORMASI PROYEK</b> .....	2
<b>B. EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	5
<b>C. LAPORAN KEMAJUAN TEKNIS</b> .....	7
1. PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR DAN MASYARAKAT LOKAL .....	8
1.1. Kabupaten Tana Toraja .....	10
a. Koordinas dan Sosialisasi Program .....	10
b. Pertemuan Multipihak .....	11
c. Sosialisasi Perhutanan Sosial di Tingkat Desa .....	14
d. Pembentukan Kelompok Tani Hutan .....	17
1.2. Kabupaten Toraja Utara .....	17
a. Koordinasi dan Sosialisasi Program .....	17
b. Pertemuan Multipihak .....	18
c. Sosialisasi Perhutanan Sosial di Tingkat Desa .....	21
d. Pembentukan Kelompok Tani Hutan .....	23
1.3. Kabupaten Enrekang .....	25
a. Koordinasi dan Sosialisasi Program .....	25
b. Pertemuan Multipihak .....	25
c. Sosialisasi Perhutanan Sosial di Tingkat Desa .....	28
d. Pembentukan Kelompok Tani Hutan .....	32
1.4. Kabupaten Pinrang .....	34
a. Sosialisasi Program dan Pembentukan KPPI .....	34
b. Sosialisasi Program dan Workshop .....	36
c. Pembentukan dan Peresmian KPPI .....	38
d. Kendala dan Hambatan dalam Menjalankan Program .....	39
2. DISEMINASI DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN .....	41
2.1. Pelatihan Diseminasi Perhutanan Sosial Berbasis Drone .....	41
2.2. Pembuatan Leaflet, Poster, dan Banner .....	45
2.3. Pembuatan Film Dokumenter Adaptasi Perubahan Iklim .....	46
2.4. Pengembangan Website dan Sosmed untuk Adaptasi Perubahan Iklim .....	47
2.5. Penyusunan Buku Adaptasi Perubahan Iklim .....	49
a. Diskusi Perencanaan Penyusunan Buku dan Jurnal .....	49
b. Coaching Penulisan Buku .....	49
c. Pembuatan Coding Book .....	50
<b>D. LAPORAN KEUANGAN</b> .....	53
<b>E. LAPORAN PENCAPAIAN OUTCOME DAN OUTPUT</b> .....	54
1. Baseline Survey .....	54
2. Outcome dan Output .....	59
3. Rekomendasi Hasil Baseline Survey .....	62
a. Indikator Pencapaian Outcome dan Output .....	64
b. Risiko dan Rencana Mitigasi .....	66
<b>F. RENCANA KUARTAL KEDUA</b> .....	68
<b>G. DATA ASET</b> .....	74
<b>H. PENUTUP</b> .....	76
<b>I. LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	77
Lampiran 1: Daftar Kegiatan dan Peserta .....	77
Lampiran 2: Daftar Anggota KPPI .....	79
Lampiran 3: Daftar Responden <i>Baseline Survey</i> .....	83
Lampiran 4: Daftar Peserta Pelatihan Diseminasi Berbasis Drone .....	84
Lampiran 5: Contoh Coding Book .....	85

## A. INFORMASI PROYEK

A.	Judul Proyek	Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan
B.	Nama Lembaga	KAPABEL (Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan)
C.	Nama Lembaga Anggota Konsorsium (Bila ada)	(1) Yayasan Alumni Kehutanan Unhas (YAKU) (2) Pusat Penelitian & Pengembangan Natural Heritage, Biodiversity, and Climate Change Universitas Hasanuddin (3) Kanopi Hijau (Lembaga Lokal Enrekang) (4) Bumi Lestasi (Lembaga Lokal Enrekang)
D.	Lokasi Proyek	(1) Kabupaten Toraja Utara (2) Kabupaten Tana Toraja (3) Kabupaten Enrekang (4) Kabupaten Pinrang
E.	Durasi Proyek	18 Bulan
F.	Anggaran Proyek (Total)	US \$ 835.465
G.	Periode Laporan	20 Oktober – 31 Desember 2020

## B. EXECUTIVE SUMMARY

Program **Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan** merupakan program yang diusung oleh Konsorsium Kapabel yang beranggotakan *Civil Society Organization* (CSO) yaitu Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) sebagai Ketua Konsorsium, Yayasan Alumni Kehutanan (Yaku), Kanopi Hijau dan Bumi Lestari serta Lembaga Perguruan tinggi yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Natural Heritage Biodiversity dan Climate Change Universitas Hasanuddin.

Proyek ini didanai **Adaptation Fund** yang telah memiliki legal capacity pada Republik Federal Jerman dan menunjuk **KEMITRAAN** (The Partnership for Governance Reform) sebagai National Implementing Entity di Indonesia dalam mengelola Proyek Adaptation Fund..

Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan daya dorong keamanan pangan masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang sebagai usaha beradaptasi terhadap perubahan iklim dan lingkungan yang fokus pada:

1. Memperkuat Perhutanan Sosial dalam mendorong pangan hutan di Hulu DAS Saddang yang berimplikasi pada perbaikan lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatkan Pengelolaan Pesisir dan Kapasitasnya dalam mendukung adaptasi perubahan iklim di hilir DAS Saddang
3. Penguatan Kebijakan Lintas Sektor dalam memastikan keberlanjutan kebijakan adaptasi perubahan lingkungan.
4. Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pemangku Kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan penyebaran pengetahuan.

Pada Kuartal Pertama ini ada dua (2) Komponen yang telah dilaksanakan berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam mencapai Output dan Outcome proyek sebagai berikut:

### **Komponen 1. Penguatan Perhutanan Sosial dalam mendorong pangan hutan di Hulu DAS Saddang melalui skema adaptasi perubahan iklim.**

Outcome 1.1 Peningkatan Luasan Perhutanan Sosial seluas 5.000 ha di hulu DAS Saddang

Output 1.1.1. Adanya akses legal dan penguatan skema Perhutanan Sosial

Outcome 1.2 Penguatan aktor dan skema kelembagaan Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan lingkungan

Output 1.2.1. Meningkatnya kapasitas pendamping dan masyarakat lokal dalam skema Perhutanan Sosial.

Output 1.2.2. Meningkatnya kapasitas para pihak dalam pengelolaan hutan berkelanjutan

### **Komponen 2. Peningkatan tata kelola pesisir dan daya dukung dalam mendukung perubahan iklim di Hilir DAS Saddang**

Outcome 2.1 Penguatan sumber daya manusia pesisir dan sumber daya alam di bagian Hilir DAS Saddang dalam meningkatkan daya dukung pesisir.

Output 2.1.1 Terbentuk dan berjalannya Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) dan pendamping lapangan sebagai motor penggerak aksi adaptasi perubahan iklim di level desa dan kecamatan

2.1.2 Meningkatnya kapasitas serta keterampilan KPPI dan para pihak dalam perbaikan tata kelola dan daya dukung pesisir di hilir DAS

### **Komponen 4. Penguatan kapasitas dan dukungan para pihak melalui manajemen pengetahuan**

Outcome 4.1 Penguatan kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan melalui proses desiminasi dan sistem peringatan dini untuk adaptasi perubahan iklim.

Output 4.1.1. Terdiseminaskannya seluruh komponen program untuk menguatkan dan mendorong kebijakan serta keberpihakan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan dalam mencapai empat (4) output pada kedua komponen di atas yaitu:

Komponen 1: Penguatan Perhutanan Sosial dalam mendorong pangan hutan di Hulu DAS Saddang melalui skema adaptasi perubahan iklim.

- 1.1.1.1. Pertemuan multipihak pengusulan skema perhutanan sosial
- 1.1.1.2. Fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan izin perhutanan sosial
- 1.1.1.3. Operasionalisasi Outcome Leader Social Forestry (Program Manager Hulu)
- 1.2.1.1. Pelatihan Fasilitator Lapangan (Pendamping Desa)
- 1.2.1.2. Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hulu
- 1.2.1.3. Sosialisasi perhutanan sosial di tiap desa sasaran proyek
- 1.2.1.4. Pertemuan rutin di tiap desa untuk penguatan kapasitas kelompok
- 1.2.2.1. Fasilitasi Pembentukan KTH
- 1.2.2.5. Workshop Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
- 1.2.3.4. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hulu

Komponen 2. Peningkatan tata kelola pesisir dan daya dukung dalam mendukung perubahan iklim di Hilir DAS Saddang

- 2.1.1.1. Sosialisasi informasi dan pertemuan pembentukan KPPI
- 2.1.1.2. Fasilitasi Pertemuan rutin KPPI
- 2.1.1.3. Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hilir
- 2.1.2.6. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hilir
- 2.2.1.4. Operasionalisasi Outcome Leader Coastal (Program Manager Hilir)

Komponen 4. Penguatan kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan melalui proses desiminasi dan sistem peningkatan.

- 4.1.1.1. Pembuatan dan launching film dokumenter terkait aksi adaptasi perubahan iklim.
- 4.1.1.2. Penyusunan Buku Best Practice dan Lesson Learned Adaptasi Perubahan Iklim dan Jurnal Adaptasi Perubahan Iklim.
- 4.1.1.4. Pembuatan leaflet, poster, banner.
- 4.1.1.5. Pembuatan dan pengelolaan Website dan Media Sosial Adaptasi Perubahan Iklim ekosistem DAS Saddang.

Selain aktivitas dari kedua komponen itu, kegiatan Baseline Survey telah dilaksanakan sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Proyek ini. Dari aspek keuangan program, sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat dana yang sudah diterima di rekening TLKM sebesar Rp 1.156.334.566 (*Satu Miliar Seratur Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*). Anggaran yang sudah terserap sebesar 92,92% dari dana yang sudah ditransferkan atau sudah terserap 10,78% dari nilai kontrak proyek.

Posisi saldo rekening program per 31 Desember 2020 adalah Rp. 51.588.048 dengan Outstanding uang muka Rp 38.380.000 dan saldo petty cash adalah Rp 1.253.500.

### C. LAPORAN KEMAJUAN TEKNIS

Proses pencapaian keluaran (output) proyek yang dihasilkan pada periode Oktober-Desember 2020 dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang telah disusun berdasarkan *workplan* masing-masing komponen.

Kegiatan Program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan terhitung sejak *Kick Off Meeting* pada 20 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2020. Kegiatan utama pada kuartal ini adalah Peningkatan Kapasitas Field Officer (FO) atau Fasilitator Desa, Sosialisasi Program di Tingkat Kabupaten dan Desa, Pertemuan Multipihak, dan Pembentukan Kelompok. Seluruh aktivitas pada Kuartal Pertama ini berada pada Komponen 1, Komponen 2, dan Komponen 4. Khusus aktivitas-aktivitas Komponen 3 masuk pada Kuartal Kedua.

#### KOMPONEN 1: Penguatan Perhutanan Sosial dalam Mengembangkan Pangan Hutan di Hulu DAS Saddang.

OUTCOMES	OUTPUTS	ACTIVITIES	REMARKS
1.1. Peningkatan Luasan Perhutanan Sosial seluas 5.000 ha di Hulu DAS Saddang	1.1.1. Adanya akses legal dan penguatan skema Perhutanan Sosial	1.1.1.1. Pertemuan multipihak pengusulan skema perhutanan sosial	Sudah Terlaksana
		1.1.1.2. Fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan izin perhutanan sosial	Belum terlaksana
		1.1.1.3. Operasionalisasi Outcome Leader Social Forestry (Program Manager Hulu)	Sudah Terlaksana
1.2. Penguatan aktor dan skema kelembagaan Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim	1.2.1. Meningkatnya kapasitas pendamping dan masyarakat lokal dalam skema Perhutanan Sosial	1.2.1.1. Pelatihan Fasilitator Lapangan (Pendamping Desa)	Sudah Terlaksana
		1.2.1.2. Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hulu	Sudah Terlaksana
		1.2.1.3. Sosialisasi perhutanan sosial di tiap desa sasaran proyek	Sudah Terlaksana
		1.2.1.4. Pertemuan rutin di tiap desa untuk penguatan kapasitas kelompok	Sementara berlangsung
	1.2.2. Meningkatnya kapasitas para pihak dalam pengelolaan hutan berkelanjutan	1.2.2.1. Fasilitasi Pembentukan KTH	Sudah Terlaksana sebagian besar
		1.2.2.5. Workshop Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	Sudah Terlaksana
		1.2.3.4. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hulu	Sudah Terlaksana

#### KOMPONEN 2: Peningkatan Tata Kelola Pesisir dan Daya Dukung dalam Mendukung Perubahan Iklim di Hilir DAS Saddang

OUTCOMES	OUTPUTS	ACTIVITIES	REMARKS
2.1. Penguatan sumber daya manusia pesisir dan	2.1.1 Terbetuk dan berjalannya Kelompok Peduli	2.1.1.1 Sosialisasi informasi dan pertemuan pembentukan KPPI	Sudah Terlaksana

sumber daya alam di bagian hilir DAS Saddang dalam meningkatkan daya dukung pesisir	Perubahan Iklim (KPPI) dan pendamping lapangan sebagai motor penggerak aksi adaptasi perubahan iklim di level desa dan kecamatan	2.1.1.2 Fasilitasi Pertemuan rutin KPPI	Sudah Terlaksana
		2.1.1.3 Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hilir	Sudah Terlaksana
	2.1.2 Meningkatnya kapasitas serta keterampilan KPPI dan para pihak dalam perbaikan tata kelola dan daya dukung pesisir di hilir DAS	2.1.2.6. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hilir	Sudah Terlaksana
		2.2.1.4 Operasionalisasi Outcome Leader Coastal (Program Manager Hilir)	Sudah Terlaksana

#### KOMPONEN 4: Penguatan Kapasitas dan Dukungan Para Pihak melalui Pengelolaan Pengetahuan

OUTCOMES	OUTPUTS	ACTIVITIES	REMARKS
4.1. Penguatan Kapasitas dan Pemahaman Pemangku Kepentingan melalui proses diseminasi dan sistem peringatan dini untuk adaptasi perubahan iklim.	4.1.1. Terdiseminasikannya seluruh komponen program untuk menguatkan dan mendorong kebijakan serta keberpihakan	4.1.1.1. Pembuatan dan launching film dokumenter terkait aksi adaptasi perubahan iklim	Masih Berlangsung
		4.1.1.2. Penyusunan Buku Best Practice dan Lesson Learned Adaptasi Perubahan Iklim dan Jurnal Adaptasi Perubahan Iklim	Masih Berlangsung
		4.1.1.4. Pembuatan leaflet, poster, banner	Masih Berlangsung

#### 1. PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR DAN MASYARAKAT LOKAL

Peningkatan kapasitas fasilitator dilakukan pada 9 – 13 November 2020. Peningkatan kapasitas fasilitator merupakan **Output 1.2.1. : Meningkatnya Kapasitas Pendamping dan Masyarakat Lokal dalam Skema Perhutanan Sosial.**

Skema Penguatan Perhutanan Sosial dalam Mengembangkan Pangan Hutan di Hulu DAS Saddang diawali dengan Pelatihan Fasilitator Lapangan (**Activity 1.2.1.1.**) selama 5 hari, 9 – 13 November 2020. Seluruh personel PMU menjadi peserta pelatihan ini agar terbangun paradigma bersama dalam menjalankan proyek ini. Sebelum pelatihan digelar, PMU mengadakan pra-pelatihan di kantor TLKM selama 2 hari dengan tujuan membangun paradigma tentang Program Adpatasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang yang berbasis Pangan Hutan dan membuat skema kerja dan menyusun workplan masing-masing desa.

Pelatihan Fasilitator ini didesain dengan tiga materi utama, yaitu Meta-Fasilitasi, Penelitian Etnografi, dan *Participatory Action Research* (PAR). Materi-materi Meta-Fasilitasi memberikan penguatan kapasitas paradigma kepada fasilitator seperti pemahaman tentang fasilitasi, konsep fasilitasi yang meliputi sikap atau prinsip seorang fasilitator desa, teknik dasar pengumpulan informasi, teknik dasar sosialisasi program kepada masyarakat desa, pengumpulan informasi melalui observasi, dan pendalaman hasil observasi melalui wawancara mendalam (*deep interview*). Penyajian materi menggunakan pendekatan andragogi (pendidikan orang dewasa) dengan melibatkan peserta sebagai subyek pelatihan dengan menggali pengetahuan dan pengalamannya. Metode diskusi dengan model *Focus Group Discussion* (FGD) dan simulasi.

Paradigma kedua yang dibangun melalui materi Meta-Fasilitasi adalah paradigma tentang pedesaan. Peserta sebagai fasilitator desa proyek diberikan pemahaman mendalam tentang desa dan segala bentuk kompleksitas pedesaan. Peserta diarahkan memahami desa dengan mengumpulkan informasi tentang desa dilingkungannya baik data primer maupun data sekunder. Informasi berupa data sumber daya alam (hutan, lahan, dan air), kelembagaan (organisasi desa, organisasi adat, organisasi masyarakat), norma atau aturan yang berlaku di desa, dan sejarah desa.

Setelah paradigma terbangun tentang apa itu fasilitasi, bagaimana sikap seorang fasilitator, dan apa itu desa, peserta pelatihan diberikan pemahaman tentang metode sosialisasi di masyarakat desa. Peserta diberikan tips-tips menggunakan bahasa sederhana dengan menghindari penggunaan istilah asing bagi masyarakat desa. Metode ini juga penting bagi seorang fasilitator dalam menggali informasi melalui wawancara.



Foto 1: Diskusi Pemetaan Desa

Materi kedua adalah Penelitian Etnografi. Seorang fasilitator harus memiliki kapasitas sebagai peneliti etnografi untuk memahami budaya masyarakat di desa dilingkungannya. Penelitian etnografi adalah suatu pendekatan penelitian kualitatif pada aspek budaya suatu masyarakat. Sesuai dengan asal kata etnografi yaitu *ethno* yang berarti budaya manusia dan *graphy* adalah alat deskripsi, maka fasilitator menggunakan pendekatan ini untuk memahami budaya masyarakat dengan kemampuannya menjelaskan secara deskriptif. Peserta pelatihan melakukan praktek lapangan selama satu jam untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya dengan teknik penulisan deskriptif. Setiap peserta mempresentasikan hasil penelitiannya dan mendapatkan masukan-masukan dari peserta lainnya.

Materi ketiga adalah *Participatory Action Research* (PAR) atau penelitian partisipatif. Materi ini memperkuat materi-materi sebelumnya. PAR memiliki tiga pilar utama yaitu metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. PAR bertujuan mendorong aksi transformatif dengan melibatkan masyarakat atau warga desa sebanyak mungkin sebagai pelaksana PAR. Fasilitator desa hanya sebagai orang yang memfasilitasi sehingga yang melakukan adalah masyarakat itu sendiri.



Sebagai fasilitator yang tinggal di desa selama program berjalan pendekatan ini sangat baik dalam mendorong keberlanjutan program. Durasi pelatihan dengan materi-materi itu sangat singkat sehingga PMU melakukan desain keberlanjutan peningkatan kapasitas fasilitator melalui evaluasi berkala. Fasilitator membuat catatan lapangan selama bekerja di desa dampingan. Agar desain ini dapat terwujud maka PMU melakukan perubahan skema penulisan buku dan jurnal.

Awalnya penulisan buku dan jurnal dipihakketigakan, atas pertimbangan pencapaian **output 1.2.1 Meningkatnya kapasitas pendamping dan masyarakat lokal dalam skema perhutanan sosial** maka penulisan buku dan jurnal dilakukan PMU yang didampingi tenaga ahli dalam memproduksi buku dan karya ilmiah jurnal. Tenaga ahli ini juga melakukan evaluasi catatan lapangan fasilitator secara berkala. Lihat **Bab Penyusunan Buku**.

Pelatihan dasar dianggap cukup selama lima hari. Pada 14-15 semua fasilitator berangkat menuju desa dampingan di setiap kabupaten. Tanggal 16 November 2020 fasilitator sudah berada di desanya masing-masing sebagai wujud aktivitas **1.2.1.2. Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hulu** dan **1.2.3.4. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hulu**. Begitu juga dengan wilayah hilir: **2.1.1.3 Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hilir** dan **2.1.2.6. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hilir**.

## 1.1. KABUPATEN TANA TORAJA

### a. Koordinasi dan Sosialisasi Program

Koordinasi lintas sektor dan sosialisasi program merupakan langkah strategis dalam upaya mencapai **Outcome 1.2. Penguatan aktor dan skema kelembagaan Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim**. Kegiatan pertama yang dilakukan para Program Officer di wilayah hulu adalah melakukan koordinasi para pihak di tingkat kabupaten sekaligus melakukan sosialisasi program terkait dengan **Outcome 1.1. Peningkatan Luasan Perhutanan Sosial seluas 5.000 ha di Hulu DAS Saddang**.

Project Officer melakukan koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang II pada 19 November 2020 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 20 November 2020.

Hasil Koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I:

1. Data (Peta) status Kawasan hutan di masing-masing Desa yang menjadi intervensi program berbeda dengan data status kawasan milik KPH Saddang I.
2. Sudah ada lahan/wilayah yang telah memperoleh izin TORA di Desa Sesevalu Kec. Masanda dan Desa Randan Batu Kec. Makale Selatan.
3. Terdapat titik-titik lokasi rambahan/pembukaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan di beberapa lokasi intervensi program.
4. Tidak semua masyarakat yang tinggal dan bermukim di desa intervensi program memiliki dan mengelola lahan dalam Desa, ada beberapa orang yang dari luar Desa juga memiliki dan mengelola lahan dalam Desa tersebut

Hasil Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Toraja, sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Desa Randan Batu terjadi bencana longsor di tahun 2016 sebanyak 6 kali yang menyebabkan 7 orang korban jiwa, 2 unit rumah rusak dan beberapa jalan desa rusak. Kemudian di tahun 2019 kembali terjadi bencana longsor sebanyak 1 kali dan menyebabkan 3 orang korban jiwa.
2. Desa Paku di tahun 2015 terjadi bencana lonsor sebanyak 2 kali dan merusak sarana Desa berupa jalan Desa, di tahun 2016 terjadi sebanyak 4 kali yang kembali merusak jalan Desa dan di tahun 2017 juga terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan akses jalan tertutup, turbin pembangkit listrik rusak dan bahkan merusak lahan pertanian (sawah) milik masyarakat
3. Lembang Sesevalu juga pernah terjadi bencana tanah longsor di tahun 2017. Kejadian tersebut di dusun Pauwan dan dusun Ratte Leppan dengan jumlah kejadian 5 kali.

## b. Pertemuan Multipihak

Pertemuan multipihak merupakan aktivitas 1.1.1.1. untuk mencapai Output 1.1.1. Adanya akses legal dan penguatan skema Perhutanan Sosial (PS). Pertemuan multipihak dengan melibatkan para pemangku kepentingan dilaksanakan pada Selasa, 1 Desember 2020 di Kantor BAPPERDA Tana Toraja. Pertemuan ini dikordinir langsung Program Manager Social Forestry.



Foto: Pertemuan Multipihak di Kantor BAPPERDA Tana Toraja

Pertemuan Multipihak didesain dengan metode *Focus Discussion Group* (FGD). Peserta yang hadir sebanyak 22 orang dan kelompok terbagi atas empat dengan topik pembahasan masing-masing kelompok. Berikut daftar kelompok FGD, Topik Pembahasan, dan *stakeholder*.

**Tabel 1. Nama Kelompok FGD, Topik Pembahasan, dan Stakeholder.**

No.	Kelompok	Topik pembahasan	Stakeholder
1	Lembang Randan Batu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi objektif pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di Desa</li> <li>3. Status kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status Izin Kawasan Hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Kecamatan</li> <li>• Kepala Lembang</li> <li>• Penyuluh Kehuatan</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Kelompok tani</li> <li>• <i>Field Officer</i> Lembang Randan Batu</li> </ul>
2	Lembang Paku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi objektif pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di Desa</li> <li>3. Status kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status Izin Kawasan Hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Lembang</li> <li>• Penyuluh Kehuatan</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Kelompok tani</li> <li>• <i>Field Officer</i> Lembang Paku</li> </ul>
3	Lembang Sesesalu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi objektif pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di Desa</li> <li>3. Status kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status Izin Kawasan Hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Kecamatan</li> <li>• Kepala Lembang</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Kelompok tani</li> <li>• <i>Field Officer</i> Lembang Sesesalu</li> </ul>
4	Kelompok Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Kawasan</li> <li>2. Status Kawasan</li> <li>3. Komoditi Pangan Hutan</li> <li>4. Komoditi pangan ditingkat kabupaten</li> <li>5. Mendorong sinergitas pendamping</li> <li>6. Kondisi kebencanaan di</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala KPH Saddan I</li> <li>• Kasi Perencanaan</li> <li>• Kepala Dinas Pertanian</li> <li>• Kepala BPBD Tana Toraja</li> <li>• <i>Project Officer</i> Tana Toraja</li> </ul>

Hasil FGD mengungkap beberapa informasi dan isu sebagai berikut:

Kelompok	Hasil FGD
Kelompok Randan Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Kawasan Hutan Produksi Teratas (HPT) seluas 357,37 Ha. Dalam kawasan itu terdapat masyarakat yang bermukim dan mengolah kebun. Mereka menanam kopi dan cengkih.</li> <li>- Komoditas pertanian di Randang Batu adalah padi untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sawi, jadung, kacang merah, kacang tanah, buncis, wortel, cabai, ubi kayu, tomat, dan kedelai untuk dijual dan kebutuhan sehari-hari.</li> <li>- Komoditas perkebunan adalah kopi, cengkih, aren, kakao, merica, vanilit, pisang, dan daun sirih.</li> <li>- Komoditas kehutanan adalah pohon pinus dan pohon aru.</li> <li>- Umumnya lahan warga belum bersertifikat. Alat bukti pengelolaan lahan hanya berupa (SPPT) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.</li> <li>- Sebagian warga sudah menjual lahannya ke PT. Malea yang rencana dijadikan lokasi pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).</li> <li>- Terdapat empat kelompok lingkungan yang mendapatkan legalitas dari kabupaten. Selain itu ada kelompok Dasawisma, karang taruna, dan kelompok seni budaya, dan sanggar seni.</li> <li>- April 2020 terjadi bencana longsor sepanjang 400 meter yang mengakibatkan 3 korabn jiwa, 2 rumah tertimbun dan 2 rumah rusak parah.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2019 terjadi pergeseran tanah di dusun Karumung. Terdapat 7 rumah yang terdampak dan penghuninya diungsikan ke tempat lain.</li> </ul>
Kelompok Lembang Paku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar masyarakat mengolah kawasan menjadi kebun. Kebun-kebun itu ada yang ditanami kopi, vanili, merica, dan lain-lain.</li> <li>- Warga dusun Alla' umumnya menanam vanili sedangkan warga dusun paku umumnya menanam merica. Sedangkan lima dusun lainnya yaitu dusun Punca, dusun Ratteadan, dusun Ratte-Ratte menanam kopi, kacang merah, kentang, jagung, jahe merah, alpukat, sirsak madu, lombok, dan terong belanda.</li> <li>- Terdapat lima kelompok tani di desa itu, setiap dusun memiliki satu kelompok tani. Di desa itu terdapat banyak kelompok lain seperti kelompok Dasawisma, Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Masyarakat Tanggap Bencana, Kelompok Saptic Tank (KST).</li> <li>- Desa ini memiliki kelembagaan adat dengan struktur ketua adat sebagai hakim adat, sekretaris, dan anggota. Lembaga adat ini menjaga norma dan adat masyarakat dengan wewenang yang kuat dalam memutuskan suatu perkara adat. Lembaga adat ini juga mengurus kegiatan adat yang diselenggarakan secara rutin di Lembang Paku.</li> <li>- Sering terjadi longsor karena topografi Lembang Paku berada di lereng gunung. 2017 pernah terjadi bencana longsor yang menutup akses petani, merusak PLTH atau turbin, dan menutupi beberapa lahan sawah.</li> <li>- Terdapat Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 540 Ha, Kawasan Konservasi seluas 367 Ha</li> <li>- Terdapat izin TORA di HPT seluas 4 Ha.</li> </ul>
Kelompok Lembang Sesesalu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar warga desa Lembang Sesesalu melakukan aktivitas berkebun dalam kawasan. Mereka menanam kopi, vanili, coklat, cengkeh, kayu manis, dan banbu.</li> <li>- Komoditas tanaman pertanian di desa itu adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, pisang, mangga, dan cabai. Umumnya untuk kebutuhan sehari-hari kecuali panen padi dan jagung melimpah, mereka menjualnya untuk kebutuhan barang lainnya.</li> <li>- Warga yang tinggal di luar kawasan hanya memiliki bukti penguasaan tanah berupa SPPT seperti di dusun Kulaya, Bayo, dan Buttu.</li> <li>- Kawasan pemukiman dan perkebunan warga Dusun Rattlepan dan dusun Pauan berada dalam kawasan hutan. Total penduduk kedua dusun ini sebanyak 70 KK. Tapi ada juga warga dari dusun lain yang ikut menggarap kebun di dalam kawasan hutan itu. Kedua dusun ini pernah mengajukan revisi RT/RW.</li> <li>- Terdapat beberapa kelompok seperti karang taruna, 2 kelompok mengelola lebah madu di masing-masing dusun, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) berdagang sembako, Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menjalankan gilingan padi dan ternak babi, Kelompok Dasawisma yang kegiatannya berkebun sayur pekarangan, dan Kelompok Sanggar Seni Musik dan Tari, serta kelompok adat yang masuk dalam struktur Lembang.</li> <li>- Belum ada program yang melakukan pengusulan izin Perhutanan Sosial.</li> <li>- Tahun 2017 dan 2019 terjadi kebakaran besar di kawasan hutan.</li> <li>- Tahun 2018 pernah terjadi bencana longsor yang menimbun kebun kopi dan persawahan.</li> </ul>

<p>Kelompok Instansi Kabupaten</p>	<p><b>KPH Saddang I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembang Sesevalu memiliki kawasan hutan lindung seluas 12.737 ha atau 96% dari total luas Lembang.</li> <li>- aktifitas pengelolaan Kawasan hutan di Lembang Sesevalu banyak terjadi di dusun Pauan, sehingga dusun tersebut diusulkan untuk calon lokasi pengusulan perhutanan sosial Di kelurahan Bokin terdapat lahan</li> <li>- Lembang Paku memiliki 2 fungsi Kawasan hutan, yaitu Kawasan konservasi dengan luas 367 ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas 367 ha.</li> <li>- Terdapat TORA di Lembang Paku seluas 4 ha.</li> <li>- Lembang Randan Batu memiliki fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 357, 37 ha dan sudah memiliki TORA seluas 39 ha.</li> </ul> <p><b>Dinas pertanian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas pertanian sedang melakukan pengembangan tanaman ubi talas dan terong belanda.</li> <li>- Dinas pertanian memberikan usulan kepada PMU untuk pengembangan buah markisa sebagai salah satu komoditas peningkatan perekonomian masyarakat yang akan mengelola kawasan.</li> <li>- Dinas pertanian mengusulkan tanaman suku untuk dikembangkan dalam kawasan karena buah sukun dapat menjadi tanaman pangan.</li> <li>- Komoditas pangan hutan yang rencana ditanam sebaiknya sesuai dengan curah hujan di masing-masing wilayah intervensi program</li> <li>- Dinas pertanian menyarankan PMU agar mengantisipasi hama babi jika ingin mengembangkan tanaman umbi-umbian.</li> </ul> <p><b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPBD berencana membentuk kelompok kembang tanggap bencana dan akan melakukan sosialisasi tanggap bendana di masing-masing lembang.</li> <li>- BPBD mengusulkan agar anggota masyarakat yang melakukan penebangan 1 pohon baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan harus menanam kembali pohon sebanyak 5 pohon.</li> </ul>
--	---

Beberapa hambatan dalam melaksanakan Pertemuan Multipihak yaitu:

- a. Kegiatan tidak berjalan tepat waktu karena beberapa peserta datang terlambat
- b. Beberapa perwakilan Desa dan instansi yang tidak hadir dalam pertemuan multipihak
- c. Alat presentasi yang tidak cukup baik dalam menampilkan visual materi yang dibawakan
- d. Tidak ada alat penguat suara di ruang pertemuan yang membuat pemateri harus berbicara sedikit lebih keras agar peserta bisa mendengar pemaparan materi di pertemuan tersebut.

**c. Sosialisasi Perhutanan Sosial di Tingkat Desa**

Sosialisasi Perhutanan Sosial di tiap desa sasaran proyek merupakan aktivitas 1.2.1.3. dari **Output 1.2.1. Meningkatnya kapasitas pendamping dan masyarakat lokal dalam skema Perhutanan Sosial**. Sosialisasi PS dan Pembentukan KTH dilaksanakan pada Senin, 14 Desember 2020. Sebanyak 28 peserta dengan komposisi gender: 22 laki-laki dan 6 perempuan. Peserta yang hadir terdiri dari penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, penyuluh pertanian, kepala dusun, kelompok perempuan, dan kelompok pemuda.

Desain sosialisasi disusun dengan metode pemaparan, diskusi, dan FGD dengan tujuan agar masyarakat sebagai peserta dapat memahami alur dan tujuan program sekaligus untuk mencapai Output dari **Outcome 1.2. Penguatan aktor dan skema kelembagaan Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim.**

Sosialisasi program dibawakan Project Officer dengan memperkenalkan PMU yang bekerja di desa itu dan KAPABEL sebagai Implementin Entity Proyek. Field Officer memaparkan materi (1) Program yang akan dilaksanakan di tingkat Kelurahan; (2) Materi tentang Perhutanan Sosial; serta (3) Peranan Kelompok Tani Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENGLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.

Sesi tanya jawab atau diskusi digelar terkait dengan program lalu dilanjutkan dengan FGD dengan topik pembahasan Alur Pengusulan Perhutanan Sosial. Peserta terbagi atas tiga kelompok berdasarkan Skim PS yaitu Kelompok Hutan Desa (HD), Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kelompok Kemitraan Kehutanan dengan masing-masing topik pengusulan berdasarkan nama kelompoknya.

Dengan metode ini target sosialisai tercapai antara lain: (1) secara garis besar masyarakat memahami maksud dan tujuan program "Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan"; (2) Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait perhutanan sosial; (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pentingnya Kelompok Tani Hutan (KTH).

**Tabel 2. Tanggal Sosialisasi dan Komposisi Gender di Kabupaten Tana Toraja**

Desa/Kelurahan	Hari/Tanggal	Jumlah Peserta	Laki-Laki	Perempuan
Lembang Sesevalu	Kamis, 17 Desember 2020	37 orang	25	12
Lembang Randan Batu	Kamis, 17 Desember 2020	33 orang	22	11
Lembang Paku	Jumat, 18 Desember 2020	36 orang	24	12

Jumlah peserta sosialisasi tidak sesuai target. Jumlah undangan sosialisasi yang diedarkan sebanyak 45 lembar namun khususnya di Lembang Karre Limbong yang peserta hanya hadir 20 orang. Kegiatan sosialisasi pada Desember bersamaan dengan kegiatan adat dan keagamaan masyarakat Toraja Utara. Misal peserta dari Kelompok HKm yang hadir hanya dua orang saja, Ketua Kelompok dan 1 orang anggotanya sementara Kelompok HKm ini sangat diharapkan kehadirannya mengingat di desa ini telah ada izin PS Skim HKm dan telah terbentuk HKm namun masih memiliki berbagai kendala.

Keanggotaan KTH keseluruhannya beranggotakan laki-laki dan perempuan dengan tetap mengutamakan komposisi laki-laki yang lebih banyak dengan melihat fungsi, tugas, dan tanggungjawab serta sifat kerja KTH. Program KAPABEL ini juga akan ada pembentukan khusus kelompok perempuan. Meskipun begitu, kegiatan sosialisasi tetap melibatkan perempuan sebagai komitmen KAPABEL terhadap Kepatutan dengan Kebijakan Gender dalam meningkatkan kapasitas seperti yang termuat dalam *Gudance Document for Implementing Entities on Clompliance with the Adaptation Fund Gender Policy* pada bagian *Program goals/ojecitves and target groups* dan *Design of interventon activities* pada halaman7.

Pertemuan sosialisasi PS di tiga desa ini melahirkan kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam melakukan peran-peran untuk membentuk KTH. Berikut hasil Sosialisasi PS di tiga desa:

Desa/Kelurahan	Hasil Kesepakatan dan Kesepahaman	PIC
Lembang Sesevalu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan identifikasi kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui peta citra berada sekitar Dusun Pauan dan Dusun Rattlepang.</li> <li>- Kepala Dusun Pauan dan Kepala Dusun Rattlepang akan mengidentifikasi warganya yang mengelola lahan dalam kawasan hutan.</li> <li>- Pertemuan selanjutnya akan diadakan di Dusun Pauan dan Dusun Rattlepang untuk membentuk KTH pada minggu pertama Januari 2021.</li> </ul>	Kepala Dusun
Lembang Randang Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kesadaran warga Dusun Putu yang mengelola lahan dalam kawasan mengakui bahwa lahan mereka berada dalam kawasan hutan setelah diperlihatkan peta citra Kawasan Hutan.</li> <li>- Memunculkan informasi bahwa warga yang mengelola lahan dalam kawasan hutan di dusun Putu bukan hanya masyarakat dari desa Randang Batu tapi juga dari Desa Parindingan. Bahkan jumlah warga dari desa Parindingan berkisar 80%.</li> <li>- Warga yang hadir dalam pertemuan sosialisasi akan mengidentifikasi, mencatat, dan mengajak orang-orang yang mengelola lahan dalam kawasan hutan di dusun Putu untuk hadir dalam pertemuan selanjutnya untuk pembentukan KTH.</li> </ul>	Kepala Dusun Peserta Sosialisasi
Lembang Paku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil identifikasi kawasan Hutan Produksi Terbatas melalui peta citra, warga yang hadir dalam sosialisasi belum yakin bahwa lahan yang mereka kelola itu berada dalam kawasan HPT. Keberadaan kawasan dalam peta masih jauh dari fungsi Area Penggunaan Lain (APL) sebagai lahan kelola masyarakat saat ini.</li> <li>- Terjalin kesepakatan untuk melakukan identifikasi dan pendataan orang-orang yang mengelola lahan dalam kawasan di sekitar Dusun Puncak dan Dusun Rante Alla yang akan dilakukan masing-masing kepala dusun dengan cara pengambilan titik kordinat.</li> <li>- Peserta sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan di minggu pertama Januari 2021 untuk membentuk KTH di Lembang Paku.</li> </ul>	Kepala Dusun

Hambatan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Perhutanan Sosial yaitu:

#### **Desa Randan Batu**

- a. Kegiatan tidak berjalan tepat waktu karena beberapa peserta datang terlambat
- b. Ada beberapa perwakilan kepala dusun dan masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi karena kepala desa Randan Batu kurang aktif dan kooperatif dalam program KAPABEL.
- c. Belum dilakukan Pembentukan Kelompok Tani Hutan di Desa Randan batu sesuai dengan rencana awal kegiatan, hal ini dikarenakan wilayah kawasan yang akan diusulkan untuk izin Perhutanan Sosial kebanyakan dikelola oleh masyarakat Desa Parindingan sehingga perlu

dilakukan pendataan juga pencatatan ulang jumlah masyarakat Randan Batu dan Parindingan yang mengelola dalam kawasan tersebut.

#### **Desa Sesesalu**

- a. Ada beberapa perwakilan kepala dusun dan masyarakat yang mengelola lahan dalam kawasan tidak hadir dalam sosialisasi.
- b. Belum dilakukan Pembentukan KTH di Desa Sesesalu sesuai dengan rencana awal kegiatan, karena masyarakat desa yang berdomisili di Dusun Pauan dan Rattlepang sepakat untuk terlebih dahulu mencatat dan mendata orang-orang yang mengelola dalam kawasan hutan untuk diundang pada saat pertemuan pembentukan kelompok tani hutan yang direncanakan pada minggu pertama januari 2021.

#### **Desa Paku**

- a. Tidak semua masyarakat yang menurut kepala Desa mengelola lahan dalam kawasan hadir dalam pertemuan sosialisasi
- b. Belum dilakukan Pembentukan Kelompok Tani Hutan di Desa Paku sesuai dengan rencana awal kegiatan, karena masyarakat desa Paku masih tidak ingin terburu-buru membentuk kelompok tani hutan. Kepala Dusun akan kembali mensosialisasikan program ini ke masyarakat yang mengelola lahan dalam kawasan sembari mendata jumlah yang mengelola lahan untuk diundang dalam pertemuan lanjutan pembentukan kelompok tani hutan
- c. Listrik di Kantor Desa Paku tidak mengalir sehingga alat presentasi seperti LCD dan microphone tidak digunakan dalam pertemuan tersebut.

#### **d. Pembentukan Kelompok Tani Hutan**

Pembentukan KTH tidak berhasil dilakukan pada bulan Desember 2020 karena berbagai kendala lapangan seperti disebutkan sebelumnya. Pembentukan KTH dan GAPOKTANHUT akan dilaksanakan pada awal Januari 2021.

## **1.2. KABUPATEN TORAJA UTARA**

### **a. Koordinasi dan Sosialisasi Program**

Koordinasi lintas sektor dan sosialisasi program merupakan langkah strategis dalam upaya mencapai **Outcome 1.2. Penguatan aktor dan skema kelembagaan Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim**. Kegiatan pertama yang dilakukan para Program Officer di wilayah hulu adalah melakukan koordinasi para pihak di tingkat kabupaten sekaligus melakukan sosialisasi program terkait dengan **Outcome 1.1. Peningkatan Luasan Perhutanan Sosial seluas 5.000 ha di Hulu DAS Saddang**.

Project Officer melakukan koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang II pada 19 November 2020 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 20 November 2020.

Hasil koordinasi dengan KPH Saddang II sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan data kawasan hutan sehingga PMU harus menyesuaikan dengan data KPH
2. Wilayah masing-masing Desa/Kelurahan yang diintervensi tidak masuk dalam TORA

3. Wilayah Kelurahan Bokin dan Lembang Sapan Kua-Kua berbatasan langsung dengan perusahaan sehingga harus menyesuaikan kembali dengan data Perusahaan PT. Tuarco yang menjalankan industri kopi.
4. Lembang Karre Limbong telah memiliki izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak tahun 2014 yang dikelola oleh kelompok HKm yaitu Kelompok Tani Pangi, Kelompok Tani Buka dan Kelompok Rante Karang.
5. KPH sangat mengharapkan skema yang diusulkan dalam perhutanan sosial yakni Skema Kemitraan Kehutanan, dikarenakan melalui skema Kemitraan KPH mampu juga mendapatkan penghasilan dari skema tersebut. Karena berdasarkan arahan, KPH diharuskan untuk memiliki penghasilan sendiri dari pengelolaan kawasan hutan.
6. Di Lembang Sapan Kua-Kua masyarakat telah membudidayakan madu sehingga program pengembangan dan budidaya madu sangat tepat.
7. Di Lembang Karre Limbong terdapat konflik antara satu anggota Kelompok Tani Rante Karang dengan Kepala Lembang Karre Penanian terkait persoalan lahan.

Hasil koordinasi dengan BPBD Toraja Utara sebagai berikut:

1. Sejak tiga tahun terakhir, Desa intervensi program tidak pernah mengalami kondisi kebencanaan.
2. Dalam menanggulangi kebencanaan, BPBD menyarankan PMU untuk melakukan penanaman rumput fertifier yang mampu menahan laju erosi di daerah hulu.
3. BPBD memiliki program lembang tangguh bencana yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi bencana dengan cepat.

#### b. Pertemuan Multipihak

Pertemuan multipihak merupakan aktivitas 1.1.1.1. untuk mencapai Output 1.1.1. Adanya akses legal dan penguatan skema Perhutanan Sosial (PS). Pertemuan multipihak dengan melibatkan para pemangku kepentingan dilaksanakan pada Selasa, 1 Desember 2020 di Kantor BAPPEDA Toraja Utara. Pertemuan ini dikordinir langsung Program Manager Social Forestry.

Pertemuan Multipihak didesain dengan metode *Focus Discussion Group* (FGD). Peserta yang hadir sebanyak 21 orang dan kelompok terbagi atas empat dengan topik pembahasan masing-masing kelompok. Berikut daftar kelompok FGD, Topik Pembahasan, dan *stakeholder*.

**Tabel 3. Nama Kelompok FGD, Topik Pembahasan, dan Stakeholder di Kabupaten Toraja Utara.**

No.	Kelompok	Topik Pembahasan	Stakeholder
1	Kelompok Karre Limbong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Objektif Pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di desa</li> <li>3. Status Kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status izin kawasan hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat Nanggungala</li> <li>• Kepala Lembang Karre Limbong</li> <li>• Penyuluh Kehutanan</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Pendamping Perhutanan Sosial</li> <li>• Field Officer Karre Limbong</li> </ul>
2	Kelompok Bokin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Objektif Pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di desa</li> <li>3. Status Kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status izin kawasan hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat Rantebua</li> <li>• Penyuluh Kehutanan</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Kelompok Tani Bokin</li> <li>• Field Officer Bokin</li> </ul>

		6. Kejelasan TORA di kelurahan BOKIN	
3	Kelompok Sapan Kua – kua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Objektif Pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di desa</li> <li>3. Status Kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status izin kawasan hutan</li> <li>6. Terkait dengan Dasar alasan dijadikan sebagai demplot talas jepang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat Buntao</li> <li>• Sekertaris Lembang Sapan Kua-Kkua</li> <li>• Penyuluh Kehutanan</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Kelompok Madu Sapan Kua-kua</li> <li>• Field Officer Sapan Kua-Kua</li> </ul>
4	Kelompok Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Kawasan</li> <li>2. Status Izin Kawasan Kawasan</li> <li>3. Komoditi Pangan Hutan</li> <li>4. Komoditi Pangan di tingkat kabupaten</li> <li>5. Mendorong sinergitas Pendamping PS/Penyuluh Kehutanan/Penyuluh Pertanian/Polisi Kehutanan/Pendamping Desa</li> <li>6. Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Toraja Utara khususnya Lembang Karre Limbong, Lembang Sapan Kua – kua dan Kelurahan Bokin</li> <li>7. Alasan ditolak HKm yang diusulkan oleh Kelompok Sapan Kua-kua</li> <li>8. Kejelasan batas wilayah kelola TUARCO yang berbatasan dengan BOKIN dan SAPAN KUA-KUA</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala KPH Saddang II</li> <li>• Dinas Pertanian dan Peternakan Toraja Utara</li> <li>• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Toraja Utara</li> <li>• Project Officer Toraja Utara</li> </ul>

Hasil FGD ditemukan beberapa informasi dan isu sebagai berikut:

Kelompok	Hasil FGD
Kelompok Lembang Karre Limbong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembang Karre Limbong berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Terdapat kemlompok masyarakat yang mengelola kawasan hutan sejak lama secara turun temurun. Mereka menanam kopi, cengkeh, mengambil madu, dan mengambil kayu untuk kebutuhan rumah tongkonang/rumah ibadah.</li> <li>- Secara umum, masyarakat mengelola lahan komoditas kopi, cengkeh, rotan, vanili, sawah, madu hutan, embung, mangga, durian, pinus, cemara gunung, uru, dan suren.</li> <li>- Dinas pertanian kabupaten pernah membagi-bagikan bibit kopi namun anggota kelompok pertanian tidak melakukan penanam di lahan tapi hanya membiarkan bibit itu di pinggir rumah.</li> <li>- Pemukiman masyarakat tidak berada dalam kawasan hutan lindung termasuk kelompok masyarakat yang mengelola kawasan secara turun-temurun.</li> <li>- Lembang Karre Limbong telah memiliki izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk tiga kelompok: Kelompok Tani Buka, Kelompok Tani Pangi, dan Kelompok Tani Rante Karang. Namun kelembagaan kelompok ini masih lemah karena anggota kelompok kurang aktif, belum ada rencana program kelompok, belum ada sekretariat kelompok dalam menjalankan organisasi kelompok. Kondisi itu sehingga anggota ada anggota Kelompo Tani Buka</li> </ul>

	<p>mengusulkan agar kelompoknya itu dibudarkan sekaligus mencabut izin HKm-nya.</p>
<p>Kelompok Kelurahan Bokin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan Bamba dan Ulu Salu berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Masyarakat di kedua lingkungan itu mengelola kebun dalam kawasan hutan. Komoditas yang dikelola adalah kopi arabika dan robusta, cengkeh, merica, kakao, mengambil madu hutan jenis <i>Apis Dorsata</i>, dan juga membudidayakan madu jenis <i>Apil Malievera</i>.</li> <li>- Sedangkan masyarakat yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan mengelola komoditas seperti padi, kakao, merica, cengkeh, kopi, dan vanili.</li> <li>- Terdapat kelompok yang aktif mengorganisir kegiatan di kelurahan, yaitu Lembaga Adat To Pareng, Kelompok PWGT (Persekutuan Wanita Gereja Toraja), Kelompok Pengajian Aisiyah, Kelompok Dasa Wisma, dan Karang Taruna.</li> <li>- Terdapat izin HGU (Hak Guna Usaha) dalam kawasan hutan seluas 550 Ha yang diberikan kepada perusahaan kopi, PT. Toarco Jaya.</li> <li>- Tidak ada areal yang ditunjuk sebagai TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).</li> </ul>
<p>Kelompok Sapan Kua-Kua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun Tambuntana dan Dusun Tallang berada dalam kawasan hutan seluas 35 ha. Terdapat satu kelompok yang beranggotakan 25 orang yang mengelola kawasan hutan dengan membudidayakan madu jenis <i>Apis cerana</i>.</li> <li>- Secara umum, masyarakat desa ini mengelola kawasan hutan dengan menanam kopi, membudidayakan lebah madu jenis <i>Apis cerana</i>.</li> <li>- Ada juga anggota masyarakat yang menanam cengkeh dan pinus namun belum terkelola dengan baik.</li> <li>- Secara umum, komoditas di desa ini adalah padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat 14 kelompok tani yang memiliki legalitas dari Dinas Pertanian sehingga sering mendapatkan bantuan bibit dan pupuk.</li> <li>- Terdapat kelompok masyarakat yaitu kelompok adat, kelompok perempuan (PKK atau Dasa Wisma), kelompok tani, kelompok madu, dan Karang Taruna, serta kelompok seni. Namun belum ada Kelompok Tani Hutan (KTH).</li> <li>- Tahun 2014, LSM Mitra Walda pernah mengusulkan izin HKm melalui pembentukan KTH. Namun pengusulan izin itu tidak berhasil diterbitkan yang saat itu pengelolaan Kawasan Hutan masih ditangani Dinas Kehutanan Kabupaten. Tidak ada keterangan dan informasi penyebab tidak keluarnya izin HKm yang diusulkan itu.</li> <li>- Tahun 2014-2015 ada penerbitan izin penyadapan pinus yang diberikan kepada PT. ORI yang kemudian menjadi PT. Admitra. Izin pengelolaan hanya sampai 2019. Namun masyarakat masih menemukan aktivitas penyadapan itu masih berlanjut. Saat dikonfirmasi kepada KPH Saddang II menyampaikan bahwa tidak ada lagi izin pemanfaatan pinus yang berlaku.</li> <li>- Terdapat demonstrasi plot (demplot) komoditas talas Jepang oleh Dinas Pertanian Toraja Utara seluas 2 ha yang berada di Dusun Pap'kayu. Penentuan lokasi demplot itu tidak berdasarkan kajian kesesuaian tumbuh tanaman umbi-umbian karena masyarakat menganggap masih banyak lahan lain juga yang cocok untuk tanaman talas.</li> </ul>
<p>Kelompok Instansi Kabupaten</p>	<p><b>Dinas Pertanian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan yang dikelola masyarakat sebagian besar belum bersertifikat. Mereka hanya membayar pajak sebagai dasar hukum pengelolaan dan penguasaan lahan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di kelurahan Bokin terdapat lahan Tongkonan yang pengelolaannya dimiliki satu keluarga yang dikelola secara turun temurun dan bergantian.</li> <li>- Terdapat areal TORA seluas 550 yang dikelola PT Toarco Jaya, perusahaan kopi berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian.</li> <li>- Dinas Pertanian menyarankan PMU agar kelompok tani yang dibina Dinas Pertanian saja yang dijadikan sebagai Kelompok Tani Hutan agar masyarakat tidak bingung.</li> <li>- Komoditas pangan sebaiknya menyesuaikan kondisi yang ada di desa atau kelurahan intervensi program.</li> <li>- Program Dinas Pertanian lebih mengarah pada pengembangan kacang-kacangan dan kopi.</li> <li>- Dinas pertanian memiliki penyuluh yang ditempatkan di balai pertanian di setiap kecamatan.</li> <li>- Dinas pertanian menyarankan PMU agar mengantisipasi hama babi jika ingin mengembangkan tanaman umbi-umbian.</li> </ul> <p><b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPBD memiliki Peta Rawan Bendana sebagai dasar penentuan program penanggulangan bencana.</li> <li>- Setiap Lembang/Kelurahan akan dijadikan sebagai Lembang Tangguh Bencana.</li> <li>- BPBD mengusulkan agar KTH yang akan dibentuk KAPABEL sebaiknya dijadikan juga sebagai Kelompok Tangguh Bencana sehingga program ini bersinergi dengan program BPBD dalam penanggulangan bencana.</li> <li>- BPBD menginformasikan bahwa tanaman yang baik dalam penanggulangan bencana adalah Rumput Ferifier karena dapat menjadi tanaman penyangga dan sekaligus menjadi pakan ternak bagi peternak sapi.</li> </ul> <p><b>KPH Saddang II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Sapan Kua-Kua telah memiliki izin Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IP-HHBK) yang mengelola penyadapan getah pinus yang telah berakhir 2019 dan tidak diperpanjang lagi.</li> <li>- Batas areal kawasan yang dikelola PT. Tuarco dengan alas HGU belum jelas batasannya dengan kawasan hutan karena belum ada sinkronisasi data-data antara perusahaan ini dengan KPH dan Badan Pertanahan.</li> <li>- Terdapat izin HKm untuk tiga kelompok. Ketiga kelompok ini telah memiliki Rencana Kerja Usaha-Hutan Tanaman (RKU-HT) dan Rencan Kerja Tahunan-Hutan Tanaman (RKT-HT) dan ada dua kelompok yang telah membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).</li> <li>- Kelompok masyarakat di desa Sapan Kua-Kua pernah mengusulkan izin HKm pada 2019 namun pengusulan izin itu ditolah karena wilayah usulan berada dalam areal Blok Inti KPH.</li> </ul>
--	---

### c. Sosialisasi Perhutanan Sosial di Tingkat Desa

Sosialisasi Perhutanan Sosial di tiap desa sasaran proyek merupakan aktivitas 1.2.1.3. dari **Output 1.2.1. Meningkatnya kapasitas pendamping dan masyarakat lokal dalam skema Perhutanan Sosial**. Sosialisasi PS dan Pembentukan KTH dilaksanakan pada Senin, 14 Desember 2020. Sebanyak 28 peserta dengan komposisi gender: 22 laki-laki dan 6 perempuan. Peserta yang hadir terdiri dari penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, penyuluh pertanian, kepala dusun, kelompok perempuan, dan kelompok pemuda.

Desain sosialisasi disusun dengan metode pemaparan, diskusi, dan FGD dengan tujuan agar masyarakat sebagai peserta dapat memahami alur dan tujuan program sekaligus untuk mencapai Output dari **Outcome 1.2. Penguatan aktor dan skema kelembagaan Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim.**

Sosialisasi program dibawakan Project Officer dengan memperkenalkan PMU yang bekerja di desa itu dan KAPABEL sebagai Implementin Entity Proyek. Field Officer memaparkan materi (1) Program yang akan dilaksanakan di tingkat Kelurahan; (2) Materi tentang Perhutanan Sosial; serta (3) Peranan Kelompok Tani Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENGLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.

Sesi tanya jawab atau diskusi digelar terkait dengan program lalu dilanjutkan dengan FGD dengan topik pembahasan Alur Pengusulan Perhutanan Sosial. Peserta terbagi atas tiga kelompok berdasarkan Skim PS yaitu Kelompok Hutan Desa (HD), Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kelompok Kemitraan Kehutanan dengan masing-masing topik pengusulan berdasarkan nama kelompoknya.

Dengan metode ini target sosialisai tercapai antara lain: (1) secara garis besar masyarakat memahami maksud dan tujuan program "Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan"; (2) Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait perhutanan sosial; (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pentingnya Kelompok Tani Hutan.

**Tabel 4. Tanggal Sosialisasi dan Komposisi Gender di Kabupaten Toraja Utara**

Desa/Kelurahan	Hari/Tanggal	Jumlah Peserta	Laki-Laki	Perempuan
Kelurahan Bokin	Senin, 14 Desember 2020	28 orang	22	6
Lembang Sapan Kua-Kua	Selasa, 15 Desember 2020	48 orang	37	11
Lembang Karre Limbong	Sabtu, 19 Desember 2020	20 orang	20	8

Jumlah peserta sosialisasi tidak sesuai target. Jumlah undangan sosialisasi diedarkan sebanyak 45 lembar. Namun kehadiran peserta sosialisasi di Kelurahan Bokin dan Lembang Karre Limbong kurang, khususnya di Lembang Karre Limbong yang peserta hanya hadir 20 orang.

Kegiatan sosialisasi pada Desember bersamaan dengan kegiatan adat dan keagamaan masyarakat Toraja Utara. Misal peserta dari Kelompok HKm yang hadir hanya dua orang saja, Ketua Kelompok dan 1 orang anggotanya sementara Kelompok HKm ini sangat diharapkan kehadirannya mengingat di desa ini telah ada izin PS Skim HKm dan telah terbentuk HKm namun masih memiliki berbagai kendala.

Keanggotaan KTH keseluruhannya beranggotakan laki-laki dan perempuan dengan tetap mengutamakan komposisi laki-laki yang lebih banyak dengan melihat fungsi, tugas, dan tanggungjawab serta sifat kerja KTH. Program KAPABEL ini juga akan ada pembentukan khusus kelompok perempuan. Meskipun begitu, kegiatan sosialisasi tetap melibatkan perempuan sebagai komitmen KAPABEL terhadap Kepatutan dengan Kebijakan Gender dalam meningkatkan kapasitas seperti yang termuat dalam *Gudance Document for Implementing Entities on Compliance with the Adaptation Fund Gender Policy* pada bagian *Program goals/ojectives and target groups* dan *Design of interventon activities* pada halaman7.

Pertemuan sosialisasi PS di tiga desa ini melahirkan kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam melakukan peran-peran untuk membentuk KTH. Berikut hasil Sosialisasi PS di tiga desa:

Desa/Kelurahan	Hasil Kesepakatan	PIC
----------------	-------------------	-----

Kelurahan Bokin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi calon anggota KTH selama seminggu dengan indikator orang yang bersangkutan memiliki lahan olahan dan aktivitas ekonomi dalam kawasan hutan.</li> <li>- Melakukan dua kali pertemuan sebelum pembentukan KTH dengan tujuan verifikasi berkas yaitu Minggu, 20 Desember dan Senin 21 Desember 2020.</li> </ul>	Kepala Dusun
Lembang Sapan Kua-Kua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi calon anggota KTH selama seminggu dengan indikator orang yang bersangkutan memiliki lahan olahan dan aktivitas ekonomi dalam kawasan hutan.</li> <li>- Melakukan tiga kali pertemuan sebelum pembentukan KTH dengan tujuan verifikasi berkas yaitu Sabtu, 19 Desember, Minggu, 20 Desember dan Senin 21 Desember 2020.</li> </ul>	Kepala Dusun
Lembang Karre Limbong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pembentukan KTH yang ada hanya penguatan KTH yang sudah memiliki izin.</li> <li>- Areal HKm Rante Karang terdapat areal rehabilitasi PT. Vale dengan jenis tanaman kayu. Tahun 2021 rencana penanaman di areal itu.</li> <li>- Terdapat beberapa anggota kelompok tani yang tidak bermukim di Karre Limbong.</li> <li>- Administrasi KTH Rante Karang tidak mendokumentasikan SK HHm yang diterbitkan tahun 2014.</li> </ul>	-

#### d. Pembentukan Kelompok Tani Hutan

Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan kelanjutan dari kegiatan sosialisasi sebelumnya. Kegiatan pembentukan KTH ini memiliki agenda pertemuan antara lain pemberian nama KTH, struktur organisasi, registrasi keanggotaan, serta penyusunan Rencana Kerja dan Rencana pembentukan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT).

Agenda kegiatan dilaksanakan dengan metode musyawarah anggota. Setiap orang memberikan pendapat dan penyanggahan serta solusi. Setiap kegiatan pembentukan KTH, Fasilitator mengawali dengan pengelanaan program PS, manfaat PS, dan target penerima manfaat program.

**Tabel 5: Daftar Nama KTH Toraja Utara**

Desa/Kelurahan	Dusun	Nama KTH	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kelurahan Bokin	Dusun Ulusalu	KTH Hutan Sari Hutan	16	7	23
		KTH Hutan Karengkong	23	3	26
	Dusun Bamba	Belum ada nama dan struktur organisasi	14	1	15

Lembang Sapan Kua-Kua	Dusun Tallang	KTH Tombang Riri	25	7	32
	Dusun Limbong	Tidak berhasil membentuk KTH karena jumlah peserta kurang			7
Lembang Karre Limbong	Dusun Tambuntana	KTH Tambuntana	36	3	39

Pada saat pembentukan KTH di masing-masing Desa dan Kelurahan belum dibuatkan Berita Acara Pembentukan KTH karena keanggotaan KTH masih akan bertambah. Sementara dusun Limbong yang belum berhasil membuat KTH akan diagendakan pertemuan pembentukan KTH di bulan Januari.

Rencana Pertemuan Rutin KTH dalam konteks peningkatan kapasitas anggota KTH belum berhasil terlaksana di akhir Desember 2020 karena bersamaan dengan kegiatan adat dan keagamaan dalam rangka penyambutan tahun baru 2021.

### 1.3. KABUPATEN ENREKANG

#### a. Koordinasi dan Sosialisasi Program

Koordinasi lintas sektor dan sosialisasi program merupakan langkah strategis dalam upaya mencapai **Outcome 1.2. Penguatan aktor dan skema kelembagaan Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim**. Kegiatan pertama yang dilakukan para Program Officer di wilayah hulu adalah melakukan koordinasi para pihak di tingkat kabupaten sekaligus melakukan sosialisasi program terkait dengan **Outcome 1.1. Peningkatan Luasan Perhutanan Sosial seluas 5.000 ha di Hulu DAS Saddang**.

Project Officer melakukan koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang II pada 19 November 2020 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 20 November 2020.

Hasil Koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I:

5. Data (Peta) status Kawasan hutan di masing-masing Desa yang menjadi intervensi program berbeda dengan data status kawasan milik KPH Saddang I.
6. Sudah ada lahan/wilayah yang telah memperoleh izin TORA di Desa Sesesalu Kec. Masanda dan Desa Randan Batu Kec. Makale Selatan.
7. Terdapat titik-titik lokasi rambahan/pembukaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan di beberapa lokasi intervensi program.
8. Tidak semua masyarakat yang tinggal dan bermukim di desa intervensi program memiliki dan mengelola lahan dalam Desa, ada beberapa orang yang dari luar Desa juga memiliki dan mengelola lahan dalam Desa tersebut

Hasil Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Toraja, sebagai berikut:

4. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Desa Randan Batu terjadi bencana longsor di tahun 2016 sebanyak 6 kali yang menyebabkan 7 orang korban jiwa, 2 unit rumah rusak dan beberapa jalan desa rusak. Kemudian di tahun 2019 kembali terjadi bencana longsor sebanyak 1 kali dan menyebabkan 3 orang korban jiwa.
5. Desa Paku di tahun 2015 terjadi bencana lonsor sebanyak 2 kali dan merusak sarana Desa berupa jalan Desa, di tahun 2016 terjadi sebanyak 4 kali yang kembali merusak jalan Desa dan di tahun 2017 juga terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan akses jalan tertutup, turbin pembangkit listrik rusak dan bahkan merusak lahan pertanian (sawah) milik masyarakat
6. Lembang Sesesalu juga pernah terjadi bencana tanah longsor di tahun 2017. Kejadian tersebut di dusun Pauwan dan dusun Ratte Leppan dengan jumlah kejadian 5 kali.

#### b. Pertemuan Multipihak

Pertemuan multipihak merupakan aktivitas 1.1.1.1. untuk mencapai Output 1.1.1. Adanya akses legal dan penguatan skema Perhutanan Sosial (PS). Pertemuan multipihak dengan melibatkan para pemangku kepentingan dilaksanakan pada Kamis, 3 Desember 2020 di Kantor BAPPEDA Enrekang. Pertemuan ini dikordinir langsung Program Manager Social Forestry bersama dengan Project Officer Kabupaten Enrekang.

Pertemuan Multipihak didesain dengan metode *Focus Discussion Group* (FGD). Peserta yang hadir sebanyak 27 orang dan kelompok terbagi atas empat dengan topik pembahasan masing-masing kelompok. Berikut daftar kelompok FGD, Topik Pembahasan, dan *stakeholder*.

**Tabel 6. Nama Kelompok FGD, Topik Pembahasan, dan Stakeholder.**

No.	Kelompok	Topik pembahasan	Stakeholder
1	Desa Paladang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi objektif pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditas pertanian di Desa</li> <li>3. Status kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status Izin Kawasan Hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat Nanggala</li> <li>• Kepala Desa Paladang</li> <li>• Penyuluh Kehutanan</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Pendamping Perhutanan Sosial</li> <li>• <i>Field Officer</i> Lembang Karre</li> </ul>
2	Desa Tunga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi objektif pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di Desa</li> <li>3. Status kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status Izin Kawasan Hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa</li> <li>• Penyuluh Kehutanan</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Kelompok tani</li> <li>• <i>Field Officer</i> Lembang Paku</li> </ul>
3	Desa Ranga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi objektif pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di Desa</li> <li>3. Status kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status Izin Kawasan Hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Kecamatan</li> <li>• Kepala Lembang</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Kelompok tani</li> <li>• <i>Field Officer</i> Lembang Sesesalu</li> </ul>
4	Desa Pundilemo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi objektif pengelolaan Kawasan</li> <li>2. Komoditi pertanian di Desa</li> <li>3. Status kepemilikan lahan</li> <li>4. Kelompok masyarakat yang terdapat di Desa</li> <li>5. Status Izin Kawasan Hutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Kecamatan</li> <li>• Kepala Desa</li> <li>• Polisi Kehutanan</li> <li>• Kelompok tani</li> <li>• <i>Field Officer</i> Lembang Sesesalu</li> </ul>
4	Kelompok Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Kawasan</li> <li>2. Status Kawasan</li> <li>3. Komoditi Pangan Hutan</li> <li>4. Komoditi pangan ditingkat kabupaten</li> <li>5. Mendorong sinergitas pendamping</li> <li>6. Kondisi kebencanaan di</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala KPH Saddam I</li> <li>• Kasi Perencanaan</li> <li>• Kepala Dinas Pertanian</li> <li>• Kepala BPBD Tana Toraja</li> <li>• <i>Project Officer</i> Tana Toraja</li> </ul>

Hasil FGD mengungkap beberapa informasi dan isu sebagai berikut:

Kelompok	Hasil FGD
Kelompok Desa Paladang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada izin pemanfaatan kawasan hutan namun telah terbentuk dua KTH yaitu KTH Sipakayya dengan kegiatan agroforestry dan KTH Situjue dengan kegiatan Hutan Rakyat.</li> <li>- Terdapat 8 kelompok pertanian: 3 kelompok berada di Dusun Marassi dan 5 kelompok berada di dusun Tamboba dan Paladang.</li> <li>- Terdapat Kelompok Tani Wanita (KTW) dan Kelompok Dasawisma.</li> <li>- Komoditas pertanian di Desa Paladang adalah padi, palawija (kemiri, pala, kakao, dan merica), jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan aren.</li> <li>- Tanaman hutan yang dimanfaatkan sebagai pangan alternatif di musim kemarau yaitu sikapa. Warga mengola sikapa menjadi kue. Selain itu, batang areng juga diola menjadi sagu.</li> <li>- Masyarakat menyadari pentingnya menjaga hutan.</li> <li>- Status kepemilikan lahan berdasarkan data penyuluh kehutanan yaitu sebanyak 608 orang dengan pembagian sebagai berikut: jumlah pemilik lahan yang tidak menggarap sebanyak 82 orang, pemilik sekaligus penggarap sebanyak 430 orang, penggarap sebanyak 86 orang, dan buruh tani sebanyak 10 orang.</li> </ul>

<p>Kelompok Desa Tungka</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan hutan lindung terdapat di sekitar dusun galung dan dusun tapuan.</li> <li>- Terdapat kelompok pertanian yang bercocok tanam padi dan jagung.</li> <li>- Terdapat kelompok peternakan yang beternak sapi dan kambing</li> <li>- Bantuan yang pernah diperoleh adalah pupuk alsintan, bibit, embung-embung, dan jalan usaha tani.</li> <li>- Beberapa warga mengolah sikapa menjadi keripik dan dijual dengan kisaran harga Rp 8.000 per kilogram.</li> <li>- Komoditas hutan yaitu madu dan aren.</li> </ul>
<p>Kelompok Desa Ranga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat TORA sejak tahun 2018-2019 di desa Ranga. Namun data batas dan luasan TORA tidak dimiliki KPH sehingga berimplikasi pada luasan kawasan hutan di kabupaen Enrekang.</li> <li>- Desa Kaluppini telah mengusulkan terbentuknya Masyarakat Hukum Adat yang melingkupi tiga desa yaitu Desa Kaluppini, Desa Lembang, dan Desa Tanga. Tapi Pemerintah Desa Ranga tidak bersepakat dan ingin mengusulkan sendiri.</li> <li>- Komoditas yang dikelola adalah jagung, kemiri, cengkih, dan pala. Diantara ketiganya, jagung yang menjadi utama. Sedangkan komoditas umbi-umbi yang terdapat di hutan adalah sikapa.</li> <li>- Terdapat kelompok tani pertanian dan Kelompok Tani Wanita (KTW).</li> </ul>
<p>Kelompok Desa Pundilemo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi kawasan hutan di desa ini adalah Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang berada di dusun Osso dan Dusun Ba'ka.</li> <li>- Komoditas pertanian yaitu jagung dan padi.</li> <li>- Komoditas pangan hutan yaitu uwi, sikapa, porang, gula merah, jahe, madu, kunyit, sereh wangi.</li> <li>- Terdapat beberapa kelompok yaitu Kelompok Tani Osso Jaya, Osso Mandiri</li> <li>- Terdapat izin HKm yang terbit tahun 2019 dan hak kelola dimiliki KTH Siputuo. Jumlah anggota KTH ini sebanyak 27 orang. KTH ini memiliki 4 KUPS yaitu KUPS gula merah aren, KUPS madu, KUPS agroforestry, dan KUPS wisata. Kelompok yang pernah mendapatkan bantuan yaitu KUPS gula merah berupa parang, wajan, tali, dan pipa. Setiap anggota memiliki hak pengelolaan lahan seluas 2 Ha.</li> </ul>
<p>Kelompok Instansi Kabupaten</p>	<p><b>KPH Mata Allo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan peta kawasan hutan, Hutan Lindung seluas 60.000 Ha dan Hutan Produksi seluas 10.000 Ha.</li> <li>- Terdapat 4 izin Hutan Desa (HD), 2 Izin Hutan Adat (HA), 4 izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan 12 izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR).</li> <li>- Di empat desa intervensi program terdapat 1 desa yang telah memiliki izin HKm yaitu desa Pundilemo. Izin HKm terbit pada 2019 dengan kelola pemanfaatan kawasan seluas 50.52 Ha.</li> <li>- Komoditas hutan yang telah diusahakan masyarakat adalah gula merah aren dan madu dan komoditas umbi-umbian yaitu porang, uwi, dan sikapa.</li> <li>- Terdapat TORA di tiga desa dampingan yang dipatok pada tahun 2018-2019.</li> <li>- KPH berharap agar terbentuk GAPOKTAN bersama sebagai bentuk sinergitas kegiatan di lapangan.</li> </ul> <p><b>Dinas pertanian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kelompok Pertanian yang telah ada di Enrekang kurang lebih 2.500 kelompok.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat pembentukan kelompok tani adalah adanya keanggotaan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di SIMLUH (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan).</li> <li>- Program bantuan dari Dinas Pertanian kepada Kelompok Tani berupa pupuk, mesin traktor, penggilingan jagung, penggilingan padi, benih dan bibit tanaman MPTS (<i>Multi Purpose Tree Species</i>) seperti durian, mangga, rambutan, cengkih, pala, dan merica.</li> <li>- Komoditi unggulan pertanian ialah bawang merah, padi, cabai, dan jagung.</li> </ul> <p><b>Dinas Ketahanan Pangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat peta kerawanan pangan di kabupaten Enrekang. Dua desa intervensi program yaitu Desa Paladang dan Desa Ranga masuk dalam kategori rawan terhadap pangan.</li> <li>- Tahun 2007 Pemerintah Daerah membuat program pengelolaan produk sika pa namun tidak berlanjut karena terkendala di pemasarannya.</li> <li>- Tahun 2017 dilaksanakan program kompetisi pangan lokal. Salah satu desa intervensi program KAPABEL yakni Desa Paladang meraih juara 2 tingkat nasional. Namun program ini tidak berkelanjutan.</li> <li>- Tahun 2018 terdapat program pembudidayaan porang di kecamatan Maiwa</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan membuat Program Pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk tanaman hortikultura dan umbi-umbian.</li> <li>- Terdapat program toko tani namun belum terealisasi karena belum adanya produk komoditas lokal.</li> <li>- Komoditas umbi-umbian yang utama di kabupaten Enrekang yaitu tanaman sika pa, kaporo, dan uwi. Ketiga komoditas ini adalah pangan alternatif bagi masyarakat.</li> </ul> <p><b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPBD memiliki peta rawan bencana dan data kerusakan lahan garapan masyarakat.</li> </ul>
--	--

Setelah kegiatan ini dilaksanakan PMU melakukan audiensi dengan BPBD dan Dinas Ketahanan Pangan. Tujuan audiensi untuk mendapatkan Data Peta Kebencanaan Kabupaten Enrekang dan Peta Kerawanan Pangan Kabupaten Enrekang.

### c. Sosialisasi PS di Tingkat Desa

Sosialisasi Perhutanan Sosial di tiap desa sasaran proyek merupakan aktivitas 1.2.1.3. dari **Output 1.2.1. Meningkatnya kapasitas pendamping dan masyarakat lokal dalam skema Perhutanan Sosial**. Sosialisasi PS dan Pembentukan KTH dilaksanakan pada Senin, 14 Desember 2020. Sebanyak 28 peserta dengan komposisi gender: 22 laki-laki dan 6 perempuan. Peserta yang hadir terdiri dari penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, penyuluh pertanian, kepala dusun, kelompok perempuan, dan kelompok pemuda.

Desain sosialisasi disusun dengan metode pemaparan, diskusi, dan FGD dengan tujuan agar masyarakat sebagai peserta dapat memahami alur dan tujuan program sekaligus untuk mencapai Output dari **Outcome 1.2. Penguatan aktor dan skema kelembagaan Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim**.

Sosialisasi program dibawakan Project Officer dengan memperkenalkan PMU yang bekerja di desa itu dan KAPABEL sebagai Implementin Entity Proyek. Field Officer memaparkan materi (1)

Program yang akan dilaksanakan di tingkat Kelurahan; (2) Materi tentang Perhutanan Sosial; serta (3) Peranan Kelompok Tani Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENGLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.

Sesi tanya jawab atau diskusi digelar terkait dengan program lalu dilanjutkan dengan FGD dengan topik pembahasan Alur Pengusulan Perhutanan Sosial. Peserta terbagi atas tiga kelompok berdasarkan Skim PS yaitu Kelompok Hutan Desa (HD), Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kelompok Kemitraan Kehutanan dengan masing-masing topik pengusulan berdasarkan nama kelompoknya.

Dengan metode ini target sosialisasi tercapai antara lain: (1) secara garis besar masyarakat memahami maksud dan tujuan program "Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan"; (2) Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait perhutanan sosial; (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pentingnya Kelompok Tani Hutan.

**Tabel 7. Tanggal Sosialisasi dan Komposisi Gender di Kabupaten Enrekang**

Desa/Kelurahan	Hari/Tanggal	Laki-Laki	Perempuan	Total
Desa Ranga	Jumat, 11 Desember 2020	15	2	<b>17</b>
Desa Paladang	Sabtu, 12 Desember 2020	17	4	<b>21</b>
Desa Tungka	Senin, 14 Desember 2020	12	4	<b>16</b>
Desa Pundilemo	Selasa, 15 Desember 2020	13	5	<b>18</b>
<b>Total Penerima Manfaat</b>		<b>57</b>	<b>15</b>	<b>72</b>

Jumlah peserta sosialisasi tidak sesuai target. Jumlah undangan sosialisasi diedarkan sebanyak 40 lembar. Namun kehadiran peserta pada saat sosialisasi Perhutanan Sosial di desa Tungka dan Desa Pundilemo di bawah 20 orang. Kegiatan pada bulan Desember sulit menghadirkan warga karena bertepatan dengan bulan perayaan pesta adat Rambu Solo, Ma'damulu, persiapan perayaan natal dan tahun baru.

Pada Desember pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di laksanakan pemilihan pada 9 Desember 2020 dimana rangkaian jadwal KPU masih berlangsung saat sosialisasi dilakukan di tempat desa.

Kegiatan sosialisasi pada Desember bersamaan dengan kegiatan adat dan keagamaan masyarakat Toraja Utara. Misal peserta dari Kelompok HKm yang hadir hanya dua orang saja, Ketua Kelompok dan 1 orang anggotanya sementara Kelompok HKm ini sangat diharapkan kehadirannya mengingat di desa ini telah ada izin PS Skim HKm dan telah terbentuk HKm namun masih memiliki berbagai kendala.

Keanggotaan KTH keseluruhannya beranggotakan laki-laki dan perempuan dengan tetap mengutamakan komposisi laki-laki yang lebih banyak dengan melihat fungsi, tugas, dan tanggungjawab serta sifat kerja KTH. Program KAPABEL ini juga akan ada pembentukan khusus kelompok perempuan. Meskipun begitu, kegiatan sosialisasi tetap melibatkan perempuan sebagai komitmen KAPABEL terhadap Kepatutan dengan Kebijakan Gender dalam meningkatkan kapasitas

seperti yang termuat dalam ***Guidance Document for Implementing Entities on Compliance with the Adaptation Fund Gender Policy*** pada bagian ***Program goals/objectives and target groups*** dan ***Design of intervention activities*** pada halaman 7.

Pertemuan sosialisasi PS di tiga desa ini melahirkan kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam melakukan peran-peran untuk membentuk KTH. Berikut hasil Sosialisasi PS di tiga desa:

Desa/Kelurahan	Hasil Kesepakatan	PIC
Desa Ranga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi dari peserta menyebutkan batas kawasan hutan berada di atas puncak yang ditandai dengan patok.</li> <li>- Terdapat patok TORA yang dipasang pada 2018-2019 namun tidak dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan petugas pematok.</li> <li>- Peserta mengusulkan adanya kejelasan batas TORA dan batas Kawasan Hutan dalam mendorong Skema Perhutanan Sosial.</li> <li>- Sebagian besar warga desa melakukan aktivitas berkebun di dalam kawasan hutan.</li> <li>- Jenis komoditas yang diusahakan yaitu kemiri, merica, dan cengkih.</li> <li>- Jenis komoditas MPTS yang diharapkan dalam program Adaptasi ini adalah durian, pala, dan jahe.</li> <li>- Mendorong pengelolaan sikap untuk meningkatkan daya jual produk karena komoditi ini banyak dalam kawasan hutan. Selama ini tanaman ini hanya dijadikan sebagai makanan alternatif.</li> <li>- Peserta bersepakat untuk membentuk KTH.</li> </ul>	Semua Peserta
Desa Paladang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi dari peserta menyebutkan batas kawasan hutan berada di atas puncak yang ditandai dengan patok.</li> <li>- Terdapat patok TORA yang dipasang pada 2018-2019 namun tidak dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan petugas pematok.</li> <li>- Peserta mengusulkan adanya kejelasan batas TORA dan batas Kawasan Hutan dalam mendorong Skema Perhutanan Sosial.</li> <li>- Sebagian besar warga desa melakukan aktivitas berkebun di dalam kawasan hutan.</li> <li>- Jenis komoditas dalam kawasan yang diusahakan adalah kemiri, pala, gula merah aren, madu, dan manisan dari kulit pala.</li> <li>- Jenis komoditas MPTS yang diharapkan yaitu pala.</li> <li>- Mendorong pengelolaan sikap untuk meningkatkan daya jual produk karena komoditi ini banyak dalam kawasan hutan. Selama ini tanaman ini hanya dijadikan sebagai makanan alternatif.</li> </ul>	Semua Peserta

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong diversifikasi produk gula merah aren sehingga meningkatkan nilai jual produk.</li> <li>- Mendorong keterlibatan kelompok perempuan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan dalam pengelolaan produk hasil hutan.</li> <li>- Pembentukan KTH berdasarkan dusun</li> <li>- Adanya kesepakatan jadwal pertemuan pembentukan KTH.</li> </ul>	
Desa Tungka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi dari peserta menyebutkan batas kawasan hutan berada di atas puncak yang ditandai dengan patok.</li> <li>- Terdapat patok TORA yang dipasang pada 2018-2019 namun tidak dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan petugas pematok.</li> <li>- Peserta mengusulkan adanya kejelasan batas TORA dan batas Kawasan Hutan dalam mendorong Skema Perhutanan Sosial.</li> <li>- Sebagian besar warga desa melakukan aktivitas berkebun di dalam kawasan hutan.</li> <li>- Jenis komoditas dalam kawasan yang diusahakan adalah kemiri, merica, dan cengkik.</li> <li>- Jenis MPTS yang diharapkan dalam program KAPABEL adalah durian, pala, dan jahe.</li> <li>- Mendorong pengelolaan sikap untuk meningkatkan daya jual produk karena komoditi ini banyak dalam kawasan hutan. Selama ini tanaman ini hanya dijadikan sebagai makanan alternatif.</li> <li>- Peserta mengusulkan pembentukan KTH berdasarkan dusun</li> <li>- Adanya kesepakatan jadwal pertemuan pembentukan KTH.</li> </ul>	-
Desa Pundilemo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi dari peserta menyebutkan batas kawasan hutan berada di atas puncak yang ditandai dengan patok.</li> <li>- Telah terbit izin PS dengan Skim HKm pada 2019 dengan hak kelola KTH Sipatuo.</li> <li>- Telah terbentuk 4 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yaitu KUPS Madu, KUPS Gula Merah, KUPS Agroforestry, dan KUPS Wisata Alam.</li> <li>- PSKL telah memberikan bantuan kepada KUPS Gula Merah berupa tali, parang, ember, dan pipa.</li> <li>- Jenis MPTS yang diharapkan dalam program KAPABEL adalah pala, kemiri, durian, dan jahe.</li> <li>- Mendorong pengelolaan sikap untuk meningkatkan daya jual produk karena komoditi ini banyak dalam kawasan hutan. Selama ini tanaman ini hanya dijadikan sebagai makanan alternatif.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong penguatan BUMDes dalam melakukan pemasaran hasil produk KTH yang berimplikasi pada penguatan daya jual produk.</li> <li>- Mendorong pengelolaan wisata air terjun.</li> <li>- Mendorong diversifikasi produk gula merah aren untuk meningkatkan nilai jual produk. Harga gula merah aren hanya berkisar antara Rp 13.000 hingga Rp 18.000 sementara proses pembuatan memakan waktu 6 jam.</li> <li>- Mendorong pengelolaan rotan di KTH.</li> <li>- Terdapat Izin Pemanfaatan (IP) dalam kawasan hutan.</li> <li>- Adanya kesepakatan jadwal pertemuan pembentukan KTH.</li> </ul>	
--	---	--

#### d. Pembentukan Kelompok Tani Hutan

Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan kelanjutan dari kegiatan sosialisasi sebelumnya. Kegiatan pembentukan KTH ini memiliki agenda pertemuan antara lain pemberian nama KTH, struktur organisasi, registrasi keanggotaan, serta penyusunan Rencana Kerja dan Rencana pembentukan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT).

Agenda kegiatan dilaksanakan dengan metode musyawarah anggota. Setiap orang memberikan pendapat dan penyanggahan serta solusi. Setiap kegiatan pembentukan KTH, Fasilitator mengawali dengan pengelanaan program PS, manfaat PS, dan target penerima manfaat program.

**Tabel 8. Daftar Nama KTH Kabuapten Enrekang**

Desa/Kelurahan	Dusun	Nama KTH	Total
Desa Ranga	Dusun Lembong	KTH Pu'cantung	46
	Dusun Tirowali	KTH Almak Kombong	14
	Dusun Ranga	KTH Buttu Ranga	11
Desa Paladang	Dusun Marassi	KTH Lewanjio 1	27
		KTH Lewanjio 2	
	Dusun Paladang	KTH Makkawaru	15
	Dusun Tamboba	KTH Mamminasa	26
Desa Tunga	Dusun Galung	KTH Buttu Talling	22
	Dusun Tapuan	KTH Buttu Lombong	20

Jadwal Pembentukan KTH di setiap dusun di tiga desa dampingan.

**Tabel 9. Jadwal dan Lokasi Pertemuan Pembentukan KTH**

Desa/Kelurahan	Dusun	Hari/Tanggal	Jumlah Peserta
<b>Desa Ranga</b>			
Dusun Lembong	Sosialisasi Pembentukan KTH	18 Desember 2020	46 orang
	Pembentukan KTH	25 Desember 2020	52 orang
Dusun Ranga	Sosialisasi Pembentukan KTH	18 Desember 2020	11 orang
	Pembentukan KTH	23 Desember 2020	14 orang
Dusun Tirowali	Sosialisasi Pembentukan KTH	19 Desember 2020	14 orang
	Pembentukan KTH	27 Desember 2020	11 orang
<b>Desa Paladang</b>			
Dusun Marassi	Sosialisasi Pembentukan KTH	14 Desember 2020	36 orang
	Pembentukan KTH	22 Desember 2020	27 orang
Dusun Paladang	Sosialisasi Pembentukan KTH	17 Desember 2020	22 orang
	Pembentukan KTH	20 Desember 2020	15 orang
Dusun Tamboba	Sosialisasi Pembentukan KTH	18 Desember 2020	18 orang
	Pembentukan KTH	21 Desember 2020	26 orang
<b>Desa Tunga</b>			
Dusun Galung	Sosialisasi Pembentukan KTH	20 Desember 2020	22 orang
	Pembentukan KTH	21 Desember 2020	22 orang
Dusun Tapuan	Sosialisasi Pembentukan KTH	20 Desember 2020	20 orang
	Pembentukan KTH	22 Desember 2020	20 orang

Pada saat pembentukan KTH di masing-masing Desa dan Kelurahan belum dibuatkan Berita Acara Pembentukan KTH karena keanggotaan KTH masih akan bertambah. Sementara dusun Limbong yang belum berhasil membuat KTH akan diagendakan pertemuan pembentukan KTH di bulan Januari.

Rencana Pertemuan Rutin KTH dalam konteks peningkatan kapasitas anggota KTH belum berhasil terlaksana di akhir Desember 2020 karena bersamaan dengan kegiatan adat dan keagamaan dalam rangka penyambutan tahun baru 2021.

#### 1.4. KABUPATEN PINRANG

Kegiatan Program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan terhitung sejak Kick Off Meeting pada 20 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2020 tahap sosialisai program dan pembentukan kelompok di tingkat desa. Seluruh aktivitas pada tahap ini berada pada Komponen 1 dan Komponen 2.

#### KOMPONEN 2: Peningkatan Tata Kelola Pesisir dan Daya Dukung dalam Mendukung Perubahan Iklim di Hilir DAS Saddang

OUTCOME	OUTPUT	ACTIVITIES	IMPLEMENTING
2.1. Penguatan sumber daya manusia pesisir dan sumber daya alam di bagian hilir DAS Saddang dalam meningkatkan daya dukung pesisir	2.1.1 Terbentuk dan berjalannya Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) dan pendamping lapangan sebagai motor penggerak aksi adaptasi perubahan iklim di level desa dan kecamatan	2.1.1.1 Sosialisasi informasi dan pertemuan pembentukan KPPI	Sudah Terlaksana
		2.1.1.2 Fasilitasi Pertemuan rutin KPPI	Sudah Terlaksana
		2.1.1.3 Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hilir	Sudah Terlaksana
	2.1.2 Meningkatnya kapasitas serta keterampilan KPPI dan para pihak dalam perbaikan tata kelola dan daya dukung pesisir di hilir DAS	2.1.2.6. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hilir	Sudah Terlaksana
		2.2.1.4 Operasionalisasi Outcome Leader Coastal (Program Manager Hilir)	Sudah Terlaksana

##### a. Sosialisasi Program dan Pembentukan KPPI

Kegiatan sosialisasi program dan workshop perubahan iklim merupakan **aktivitas 2.1.1.1 Sosialisasi informasi dan pertemuan pembentukan KPPI** dari **Output 2.1.1 Terbentuk dan berjalannya Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) dan pendamping lapangan sebagai motor penggerak aksi adaptasi perubahan iklim di level desa dan kecamatan**. Hasil yang ingin dicapai dari aktivitas ini adalah **2.1. Penguatan Sumber daya Manusia pesisir dan Sumber Daya Alam di bagian Hilir DAS Saddang dalam meningkatkan daya dukung pesisir**.

Sosialisasi program diawali dengan melakukan koordinasi melalui kegiatan audiensi dengan pemerintah desa intervensi program. Audiensi dilakukan dengan tujuan sosialisasi program dan meminta informasi dan saran-saran dari aparat pemerintah desa.

Berikut hasil audiensi di lima desa dampingan di Kabupaten Pinrang:

Desa	Hasil Audiensi
<b>Desa Massewae</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maraknya penambangan pasir di sekitar sungai Saddang. Pelaku penambang pasir adalah warga desa atas desakan ekonomi dimana nilai pasir lebih tinggi dibanding usaha ekonomi lainnya.</li> <li>- Komoditas ekonomi di desa Massewae mengalami banyak perubahan karena terjadi penurunan harga komoditas itu.</li> <li>- Komoditas pertanian diantaranya adalah padi, jagung, lombok, kemiri, dan salak.</li> <li>- Kebun salak telah beralih fungsi menjadi sawah melalui program pemerintah percetaan sawah gratis.</li> <li>- Pemerintah Daerah Pinrang fokus pada peningkatan produktivitas padi.</li> <li>- Produktivitas tanaman salak di dusun Kaluppang dan Dusun Lome menurun setiap tahunnya.</li> </ul>
<b>Desa Katomporan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa ini memiliki komoditas unggul seperti padi, ikan tawar, dan salak</li> <li>- Beberapa kelompok masyarakat telah mengolah buah salak menjadi kulit salak, olahan kripik, selai salak, dan biji kopi salak.</li> <li>- Beberapa LSM pernah melakukan pelatihan pengolahan produk salak namun tidak berkelanjutan.</li> <li>- Pemerintah Desa mengharapkan adanya peningkatan kapasitas terhadap kelompok kepemudaan melalui home industry atau kegiatan lainnya.</li> <li>- Sering terjadi bencana banjir kiriman sehingga luapan air menggenangi rumah sebagian warga.</li> </ul>
<b>Desa Paria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumput laut menjadi komoditas unggulan yang dapat diharapkan meningkatkan pendapatan warga</li> <li>- Sebagian warga meninggalkan usaha rumput laut karena nilai atau harganya turun di kisaran Rp 3.000 – Rp 5.000 per kilogram.</li> <li>- Pemerintah desa mengharapkan adanya pendampingan kepada kelompok petambak udang windu, udang vaname, dan ikan bandeng.</li> <li>- Kegiatan pelatihan-pelatihan selalu diadakan dari dinas pertanian dan perikanan.</li> <li>- Dinas pertanian perlah melakukan pelatihan Home Industry usaha Bandeng tanpa Tulang namun tidak berkelanjutan karena tidak adanya pendampingan kelompok yang berkelanjutan.</li> <li>- Pemerintah akan membantu mengomunikasikan dengan kelompok pemuda terkait dengan rencana penanaman mangrove.</li> <li>- Sejak setahun terakhir, bencana banjir di desa itu tidak pernah lagi terjadi</li> </ul>
<b>Desa Bababinanga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa ini memiliki potensi pertanian seperti padi, jagung, kelapa, pisang. Potensi perikanan juga baik karena banyak tambak ikan, udang, dan rumput laut.</li> <li>- Dusun Tanroe sering menjadi lokasi penanaman mangrove</li> <li>- Akses menuju dusun Tanroe kurang baik karena sering terjadi banjir di dusun itu.</li> </ul>
<b>Desa Salilopo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi desa ini yaitu padi, jagung, kelapa, dan pisang serta tambak ikan dan udang.</li> <li>- Pernah terbentuk Kelompok Perempuan dengan usaha abon dan bandeng tanpa tulang namun mengalami kendala pengemasan produk.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha budidaya di desa ini mulai berkurang khususnya rumput laut karena harga rumput laut turun atau rendah.</li> <li>- Selama setahun terakhir ini tidak ada lagi bencana banjir melanda desa ini.</li> </ul>
--	--

**b. Sosialisasi Program dan Workshop**

**Tabel 10. Tanggal Sosialisasi Program dan Workshop di Kabupaten Pinrang**

Desa	Hari/Tanggal	Jumlah Peserta
Desa Paria	Selasa, 8 Desember 2020	19
Desa Katomporang	Rabu, 9 Desember 2020	22
Desa Salipolo	Kamis, 10 Desember 2020	15
Desa Massewae	Jumat, 11 Desember 2020	23
Desa Bababinanga	Senin, 14 Desember 2020	21

Undangan yang diedarkan sebanyak 25 lembar namun tidak semua peserta undangan hadir.

Desa	Hasil Sosialisasi Program dan Workshop
Desa Paria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komoditas Perikanan Desa Paria adalah rumput laut, tambang udang wanamei, udang windu, dan ikan bandeng.</li> <li>- Titik rawan banjir di daerah pesisir berdekatan dengan areal tambak petani sehingga warga berharap adanya upaya rehabilitasi kawasan.</li> <li>- Warga bersedia terlibat dalam penyediaan lahan pembibitan dalam upaya rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir.</li> <li>- Warga memberikan saran untuk mengupayakan bibit mangrove jenis api-api (<i>Avicennia sp.</i>) karena jenis ini sudah ada yang tumbuh di sekitar kawasan.</li> <li>- Terkait dengan program <i>home industry</i> Warga berharap agar dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas dalam menjalankan usaha kreatif serta didampingi hingga berhasil.</li> </ul>
Desa Katomporang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya program Percetakan Sawah Gratis di empat kecamatan yaitu Kecamatan Duampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Mattiro Sompe, dan Kecamatan Paleteang.</li> <li>- Produksi salak masih melimpah di desa Katomporang meskipun sebagian kebun salah beralih fungsi menjadi sawah.</li> <li>- Desa Katomporang merupakan desa rawan banjir. Banjir melanda desa ini setiap tahun sehingga warga berinisiatif melakukan penimbunan di pinggiran sungai.</li> <li>- Warga berharap agar Program KAPABEL dapat membantu pemasangan batu gajah sepanjang pinggiran sungai Saddang.</li> <li>- Warga berinisiatif untuk melakukan pemantauan kolektif terhadap kondisi pinggiran sungai dan mencari tanaman alternatif jenis pohon yang dapat menahan abrasi tanah di pinggiran sungai.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meskipun desa ini tidak memiliki kawasan pesisir, namun warga bersedia untuk bergabung dengan kelompok yang ada di pesisir untuk terlibat dalam pembibitan maupun penanaman mangrove.</li> <li>- Terdapat kelompok masyarakat yang telah melakukan inovasi olahan buah salak seperti kopi biji salak, dodol salak, selei salaj, dan keripik salak. Namun kegiatan ini tidak berkelanjutan karena terbatasnya sara dan prasarana serta kurangnya pemasaran produk.</li> <li>- Wwarga berharap PMU KAPABEL dapat melakukan pendampingan mulai dari produksi hingga pemasaran produk.</li> </ul>
Desa Salipolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komoditas rumput laut di desa Salipolo hampir tidak ada karena produktivitas rumput laut cenderung menurun dan saat bersamaan harga rumput laut semakin rendah. Sehingga banyak petani lebih memilih komoditas lain atau jenis pekerjaan lain.</li> <li>- Petani rumput laut beralih membudidayakan ikan nila, ikan bandeng, dan udang.</li> <li>- Sebagian petani bersedia menjadikan tambaknya sebagai tambak percontohan dalam pembudidayaan rumput laut pada Program KAPABEL.</li> <li>- Terdapat komoditas pertanian yaitu padi, jagung, kelapa, dan pisang.</li> <li>- Warga Dusun Salipolo berinisiatif membuat tanggul untuk mengatasi abrasi yang dapat merusak tambak-tambak mereka.</li> <li>- Penanaman mangrove pernah dilakukan namun tidak ada yang berhasil tumbuh namun belum ada informasi hasil pemantauan dan kajian penyebab kegagalan pertumbuhan jenis mangrove yang ditanam.</li> <li>- Kelompok masyarakat pernah membuat olahan ikan menjadi abon ikan dan bandeng tanpa tulang namun tidak berlanjut karena sarana dan prasarana serta pemasaran produk yang masih kurang. Warga menyarankan agar komoditas ini dapat dilanjutkan oleh KAPABEL.</li> </ul>
Desa Massewae	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tanaman Salak di desa Massewae sangat berkurang sejak 4 tahun lalu. Ini terjadi karena kebun salak beralih fungsi menjadi sawah melalui program percetakan sawah gratis dari Dinas Pertanian dan Holtikultura yang dilaksanakan di empat kecamatan termasuk di desa Massewae.</li> <li>- Menurut kepala desa, selama 2020 belum pernah banjir di desa ini karena maraknya kegiatan pertambangan pasir di sungai sehingga sungai menjadi dalam.</li> <li>- Maraknya penambangan pasir karena nilai ekonominya lebih tinggi di banding kegiatan ekonomi lainnya. Namun pinggir sungai terkikis dan terjadi pelebaran sungai yang juga akan mengakibatkan pendangkalan sungai dalam waktu singkat.</li> <li>- Warga menyarankan agar tanaman kelor (<i>Moringa sp.</i>) menjadi salah satu program KAPABEL dalam pembudidayaan dan pengolahan produk kelor seperti teh kelor. Selain itu, kelor dijadikan sebagai sayuran dan memiliki ribuan zat kandungan yang dimilikinya sehingga kelor disebut juga <i>the MagicTree</i> atau pohon ajaib.</li> <li>- Terdapat program komoditas jahe merah sehingga warga berharap dapat diolah menjadi produk makanan dan minuman.</li> <li>- Terdapat komoditas olahan dari pisang menjadi kripik.</li> </ul>
Desa Bababinanga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komoditas Perikanan di desa Bababinanga adalah rumput laut, ikan bandeng, udang rebon, udang vanamei, dan ikan laut.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyak petani di Dusun Tanroe membudidayakan rumput laut meskipun harga rumput laut sangat rendah.</li> <li>- Sebagian warga desa lebih memilih membudidayakan ikan dengan rumput laut dalam satu tambak.</li> <li>- Desa Bababinanga berada di peisisi dan paling ujung DAS Saddang sehingga daerah ini sangat berdampak banjir jika curah hujan tinggi baik di wilayah Hilir maupun Hulu DAS Saddang.</li> <li>- Dusun Cilellang menjadi zona merah akibat meningkatnya abrasi setiap tahun. Jumlah KK yang bertahan di dusun ini tersisa 20 KK dari 100an KK akibat terjangan banjir di musim hujan.</li> <li>- Dusun Tanroe berada di daerah pesisir dan berhadap langsung dengan laut sehingga dusun berdampak jika permukaan air laut naik dan banjir dari DAS Saddang. Dampaknya berakibat pada gagal panen tambak.</li> <li>- Sebagian besar lahan mangrove beralih fungsi menjadi lahan tambak.</li> <li>- Warga desa ini antusias untuk terlibat dalam pembibitan dan penanaman mangrove yang akan dilaksanakan Progeram KAPABEL.</li> <li>- Terdapat mangrove jenis api-api (<i>Avicennia sp.</i>) yang tumbuh secara alami.</li> <li>- Rehabilitasi kawasan ini pernah dilakukan dengan program penanaman mangrove namun dalam jumlah terbatas dibanding luasan areal kosong.</li> <li>- Terkait rencana program Home Industri KAPABEL, warga berharap dilakukan pendapimngan dan peningkatan kapasitas dalam mengolah komoditas hasil tambak serta komoditas lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan warga.</li> </ul>
--	---

### c. Pembentukan dan Peresmian KPPI

Pembentukan dan Peresmian Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) dilaksanakan pada 17 Desember 2020 di Aula Kantor Camat Duampanua. Jumlah peserta yang hadir hanya 53 orang dari 60 undangan yang diedarkan. Rencana awal undangan akan disebar sebanyak 130 undangan namun karena adanya komitmen antara pemerintah kecamatan, Danramil, Kapolsek Duampanua dan Bupati Pinrang untuk melakukan pembatasan kegiatan maksimal 60 orang sehingga undangan yang disebar hanya 60 saja.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus dan anggota KPPI, Staf desa, staf Camat Duampanua, Staf Bappeda Kabupaten Pinrang, Kepala BPBD Kabupaten Pinrang, Kepala UPT Kebersihan, Babinsa Duampanua, LSM Recover.idn, Kepala Dusun Lome, staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang, Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) Kabupaten Pinrang, Project Coordinator, Project Manager, dan Filed Officer.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi Program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang berbasis Pangan Hutan dengan fokus pada **Komponen 2: Peningkatan Tata Kelola Pesisir dan Daya Dukung dalam Mendukung Perubahan Iklim di Hilir DAS Saddang**.

Pada sesi diskusi dan tanggapan, peserta menyampaikan beberapa masukan dan harapan-harapan yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya perempuan.

Peserta dari instansi pemerintah juga menyampaikan berbagai program menyangkut penanggulangan bencana akibat perubahan iklim. Mereka berharap adanya kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan KPPI yang telah terbentuk di Kabupaten Pinrang.

Salah satu anggota KPPI menyampaikan harapannya kepada instansi terkait mengenai upaya perbaikan lingkungan di masing-masing desa dampingan.

Sesi diskusi berlangsung selama satu jam lebih lalu dirangkainkan dengan Peresmian Pembentukan KPPI Kabupaten Pinrang. Terdapat 5 KPPI dengan total anggota sebanyak 75 orang. Lihat lampiran: Daftar Nama Anggota KPPI setiap Desa Intervensi Program.

**Tabel 11. Jumlah Anggota KPPI di Setiap Desa dan Komposisi Gender**

Desa	Laki-Laki	Perempuam	Jumlah Anggota KPPI
KPPI Desa Paria	8	2	10 orang
KPPI Desa Salipolo	6	7	13 orang
KPPI Desa Bababinanga	16	2	18 orang
KPPI Desa Katompurang	8	9	17 orang
KPPI Desa Massewae	11	6	17 orang
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>75 orang</b>

Awalnya Peresmian Pembentukan KPPI ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Pembentukan KPPI. Namun beberapa kepala desa dan staff tidak hadir sehingga penandatanganan Berita Acara ditunda dan akan dilakukan setelah kegiatan.

#### **d. Kendala dan Hambatan dalam Menjalankan Program**

Secara umum kegiatan telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan namun karena keterbatasan jumlah *Field Officer* (FO) sehingga beberapa kendala yang dihadapi sekaligus menjadi tantangan bagi PMU dan bahan evaluasi dalam menjalankan program adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM (FO) sehingga menjadi kesulitan dalam memaksimalkan pendampingan di 5 desa intervensi yang ditangani oleh 2 orang FO saja. Jarak antar desa yang saling berjauhan, kondisi jalan yang cukup sulit karena harus menyeberang sungai serta melewati pematangan tambak untuk bisa mengakses dusun intervensi di daerah pesisir. Keterbatasan FO ini tentunya tidak efektif dalam pendampingan dan fasilitasi yang akan dilakukan karena nanti akan terbentuk 10 kelompok yang harus didampingi oleh 2 orang FO saja.
2. Hilangnya komodi disalah satu desa sehingga dibutuhkan pengumpulan informasi seakurat mungkin untuk menentukan kembali komoditi yang akan diolah menjadi home industri. Tentunya ini menjadi kendala dan tantangan untuk PMU untuk melakukan revisi dan pengusulan komoditi baru dan akan memakan waktu yang tentunya akan berdampak pada perubahan jadwal pelaksanaan program di desa intervensi
3. Pada kegiatan sosialisasi program terdapat beberapa desa yang tidak maksimal kehadiran peserta hal ini dikarenakan kesibukan masyarakat dengan pekerjaan masing masing, hal ini menjadi bahan evaluasi bagi PMU untuk menentukan jadwal yang tepat sesuai dengan waktu luang kelompok masyarakat.
4. Kehadiran peserta yang tidak maksimal tentunya berpengaruh pada keterbatasan informasi yang didapatkan.
5. Pada rangkaian sosialisasi telah direncanakan untuk membentuk KPPI dan melakukan Follow Up pasca kegiatan untuk memfasilitasi pendampingan pembentukan kelompok. Namun karena keterbatasan FO sehingga jadwal pendampingan pembentukan kelompok tidak sempat dihadiri FO, padahal hal ini merupakan hal penting untuk memastikan proses musyawarah kelompok berjalan dengan baik. Namun sebagai langkah strategisnya makan PMU mengatur kembali jadwal pertemuan untuk mendampingi kelompok dalam pertemuan rutin KPPI sebagai upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan.

6. Dampak pandemi menjadi kendala karena adanya pembatasan jumlah peserta yang diperbolehkan untuk melakukan keramaian, sehingga PMU memutuskan untuk melakukan sosialisasi di masing-masing desa dan berdampak pada hilangnya jadwal pendampingan kelompok pasca sosialisasi dan dipindahkan ke pertemuan rutin pasca terbentuknya kelompok.

## 2. DISEMINASI DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Kegiatan Diseminasi dan Manajemen Pengetahuan Proyek ini berada pada **Komponen 4: Penguatan Kapasitas dan Dukungan Para Pihak Melalui Manajemen Pengetahuan**. Komponen ini menargetkan adanya Penguatan Kapasitas dan Pemahaman Pemangku Kepentingan melalui proses diseminasi dan sistem peringatan dini untuk adaptasi perubahan iklim. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keluaran (Output) sebagai berikut:

### KOMPONEN 1: Penguatan Perhutanan Sosial dalam Mengembangkan Pangan Hutan di Hulu DAS Saddang.

OUTCOME	OUTPUT	ACTIVITIES	IMPLEMENTING
4.1. Penguatan Kapasitas dan Pemahaman Pemangku Kepentingan melalui proses diseminasi dan sistem peringatan dini untuk adaptasi perubahan iklim.	4.1.1. Terdiseminasikannya seluruh komponen program untuk menguatkan dan mendorong kebijakan serta keberpihakan	4.1.1.1. Pembuatan dan launching film dokumenter terkait aksi adaptasi perubahan iklim	Sementara berjalan
		4.1.1.2. Penyusunan Buku Best Practice dan Lesson Learned Adaptasi Perubahan Iklim dan Jurnal Adaptasi Perubahan Iklim	Sementara berjalan
		4.1.1.4. Pembuatan leaflet, poster, banner	Sementara berjalan

Sedangkan Output 4.1.2. Adanya platform sistem peringatan dini Adaptasi Perubahan Iklim Masyarakat Ekosistem DAS Saddang masuk pada kuartal berikutnya.

#### 2.1. Pelatihan Diseminasi Perhutanan Sosial Berbasis Drone

Proses diseminasi dan pengelolaan pengetahuan guna menemukan, menangkap, dan juga menyebarkan pengetahuan-pengetahuan dan pembelajaran yang didapatkan pada implementasi program penting dilakukan untuk mendorong praktik-praktik adaptasi perubahan iklim. Salah satu alat pengambilan data untuk membuat bahan diseminasi program yang sedang populer saat ini yaitu Unmanned Aerial vehicle (UAV)/Drone. Penggunaan drone saat ini tak lagi identik dengan dunia militer, dalam dunia fotografi maupun videografi pun kini turut memanfaatkan drone sebagai media pengambilan obyek. Beberapa komponen seperti landscape dan view yang lebih luas dapat dengan detail menggunakan bantuan drone.

Namun, diperlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam mengoperasikan drone, lebih spesifik lagi penggunaan drone kepada kegiatan-kegiatan seperti survey pemetaan kawasan, sampai kepada fotografi dan videografi. Olehnya, penguatan kapasitas dalam hal diseminasi program berbasis penggunaan drone merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan skill Pilot Drone / orang yang akan mengoperasikan drone untuk kebutuhan diseminasi dan survey pemetaan kawasan pada program ini. Karena drone hanyalah sebuah alat, tanpa keahlian pilot, drone tidak akan ada manfaatnya. Agar peningkatan kapasitas orang yang akan mengoperasikan drone ini menjadi maksimal, dibutuhkan metode pembelajaran yang terstruktur.

Pelatihan diseminasi berbasis penggunaan drone ini perlu dilakukan agar dapat mendukung tercapainya output-output program yang membutuhkan fasilitas drone. Kegiatan pelatihan menggunakan drone ini diperuntukkan sebagian besar untuk pemula, maka dari itu metode-metode pembelajaran yang akan dilakukan adalah berupa pengenalan-pengenalan dasar.

Tujuan utama dari kegiatan pelatihan diseminasi berbasis penggunaan drone ini adalah penguatan kapasitas dalam pengoperasian drone untuk kebutuhan survey pemetaan kawasan dan diseminasi program, khususnya untuk pengambilan gambar dan video dari udara. Kegiatan ini dilakukan setidaknya agar peserta kegiatan ini mampu memahami dasar-dasar dalam penggunaan / pengoperasian drone; mampu memahami teknik fotografi dan videografi dengan menggunakan drone; mampu memahami teknik pemetaan kawasan dengan menggunakan drone; serta mampu melakukan pengolahan data yang didapatkan dari drone.

Hari pertama (**26 Desember 2020**) kegiatan dimulai pada pukul 09.00, tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan kendala dari trainer yang berhalangan hadir pada waktu yang telah ditetapkan yaitu 08.00. Kegiatan dibuka oleh Knowledge Management & Communication Manager selaku perwakilan dari Konsorsium KAPABEL, kemudian diserahkan ke Ir. Naufal, S.Hut, M.Hut, IPM, selaku lead instruktur untuk materi yang berkaitan dengan dasar dasar pengoperasian drone.

Proses awal yang dilakukan yaitu melakukan pre-test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dasar peserta terkait dengan drone. Kemudian materi yang dibawakan yaitu **Pengenalan Awal / Dasar tentang UAV / Drone**. Pada materi pertama ini juga ditunjukkan beberapa contoh kasus kelalaian atau kesalahan dalam pengoperasian drone sehingga berakibat fatal dan memberikan kerugian yang besar. Ini ditunjukkan untuk menegaskan bahwa pengoperasian drone tidak semudah yang dibayangkan, seperti menerbangkan pesawat remot kontrol mainan. Hal tersebut mengantarkan peserta pada materi selanjutnya yakni mengenai **Failsafe dan Regulasi dalam menerbangkan UAV / Drone**.

Pada materi Failsafe ditunjukkan beberapa hal utama yang perlu diperhatikan sebelum menerbangkan drone. Kemudian aturan-aturan dasar yang ditetapkan baik secara internasional, maupun aturan dalam negeri. Materi selanjutnya yaitu **dasar-dasar mengoperasikan drone**, peserta diajarkan mengenali bagaimana cara mengaktifkan drone, mempelajari remote control, dan dasar mengoperasikan ground Control System (GCS). Kemudian peserta melakukan **Simulasi** dengan menggunakan Remote Control UAV/Drone dan Aplikasi DJI Flight Simulator di PC. Aplikasi ini hanya berjalan lancar pada PC atau Laptop dengan spesifikasi yang cukup tinggi, seperti RAM minimal 8 GB, storage dengan SSD NVMe, serta kartu grafis minimal NVIDIA GTX. Drone yang digunakan sebagai alat praktik pada pelatihan ini yaitu Drone DJI Mavic 2 Pro. Materi selanjutnya yaitu **mengenal jenis-jenis UAV / Drone** untuk mengetahui jenis-jenis UAV apa saja yang ada, apa kegunaan atau peruntukannya, serta kelebihan dan kekurangannya.

Kemudian peserta melakukan praktek menerbangkan drone pertamanya, dengan melakukan **hover** atau membuat drone tetap stabil, terbang dengan membuat pola O dan 8. Untuk peserta yang pertama kali menerbangkan drone, lebih diutamakan untuk melakukan prakteknya, dan yang telah memiliki pengalaman menjadi observer view, dan GCS. Dari sembilan (9) Orang peserta ini dibagi menjadi 3 tim, sekaligus menyesuaikan dengan ketersediaan aset drone yang dimiliki oleh Program ini. Untuk satu orang yang menerbangkan drone, ternyata membutuhkan baterai 100% untuk melakukan hover, pola O, dan 8, sampai kembali ke titik awal (RTL/Return to Land atau RTH/Return to Home).



Pada hari kedua (**27 Desember 2020**), lead instrukturinya yaitu Mulyawan Galib, S.Sn yang merupakan ahli pada Aerial Fotografi dan Videografi dengan penggunaan UAV / Drone. Materi yang dibawakan yaitu **Penggunaan Drone Untuk Foto dan Videografi** atau pengenalan dasar Aerial Fotografi dan Videografi. Diawal materi, peserta terlebih dahulu dijelaskan terkait persiapan-persiapan sebelum menerbangkan drone, baik apda peralatan dan bahan yang dibutuhkan, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menerbangkan drone (seperti cuaca, kondisi angin, dll.), serta teknik-teknik untuk persiapan menerbangkan drone. Kemudian peserta dijelaskan beberapa trik-trik untuk mendapatkan hasil foto dan video yang maksimal, seperti bagaimana **mengatur jenis file** agar yang dihasilkan lebih berkualitas, memanfaatkan fitur-fitur dari aplikasi GCS drone agar **mendapatkan komposisi foto yang baik, manajemen waktu terbang, pengaturan exposure foto** (ISO, apperture, shutter speed), serta **teknik panorama**. Selanjutnya peserta diajarkan bagaimana melakukan **aerial shot**, atau teknik pengambilan gambar dan video dari udara, karena pengambilan gambar dan video dari udara tersebut ternyata tidak mudah, butuh keterampilan khusus yang dilatih terus-menerus. Beberapa tips yang diberikan seperti **terbang dengan kecepatan rendah (lambat) dan stabil agar mendapatkan impresi video yang lebih sinematik**. Selanjutnya terkait dengan aerial shot, peserta diajarkan untuk melakukan persiapan dalam sebelum terbang dan mengambil gambar dan video, persiapan yang dimaksud adalah **menentukan objek dan shot list nya** (apakah ingin diambil long shoot, medium shoot, atau close up/detail shoot, ataukah gabungan dari semuanya). Semua harus diatur sebelum terbang, jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mencari objek. Selanjutnya diberikan lagi beberapa tips dan trik pada aerial shot, seperti **kombinasi dua gerkaan “mundur” dan “naik”**, mempertimbangkan **penentuan framerate video**, melakukan **shoot hyperlapse**, mengambil gambar pada **“golden hour” (7-9 pagi dan 3-5 sore)**.

Beberapa jenis teknik shot lain yang diajarkan pada pelatihan ini yaitu **Group Shot** dan **Neighborhood View**. Tips dan trik selanjutnya yaitu jika merekam, sebaiknya **menggunakan gambar yang flat**, agar memudahkan dalam post-processing atau editing video dan gambar.

Setelah itu peserta melakukan praktek menerbangkan drone, dan mengambil objek foto dan video. Masing-masing peserta mendapatkan kesempatan untuk menerbangkan drone dan melakukan praktek pemngambilan gambar serta video sesuai dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, peserta diajarkan mengenai **pasca-produksi** foto dan video. Bagaimana melakukan editing foto menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, dan menjahit video serta memasukkan elemen-elemen yang membuat video lebih bagus menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro.

Hari kedua ini ditutup oleh lead instruktur selanjutnya, Andang Suryana Soma, S.Hut, MP, PhD yang menjelaskan tentang dasar dalam melakukan pemetaan menggunakan drone. Peserta diajarkan

terkait bagaimana prinsip pemetaan menggunakan drone, kemudian peserta diajarkan lebih dalam lagi terkait Ground Control System (GCS), bagaimana memanfaatkan aplikasi Pix4D dan DJI GSPRO untuk melakukan pemetaan berbasis auto-pilot (otomatis), serta apa-apa saja hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemetaan menggunakan drone. Materi-materi ini diajarkan untuk persiapan untuk melakukan praktek pemetaan dengan menggunakan drone di esok harinya.



Hari terakhir (**28 Desember 2020**), dimulai langsung dengan melakukan praktek penggunaan drone dalam pemetaan areal. Namun, peserta mengalami beberapa kendala teknis pada praktek ini, diantaranya:

- Aplikasi Pix4D tidak dapat digunakan, karena alasan yang belum diketahui baik oleh peserta maupun instruktur. Dan akhirnya seluruh peserta hanya menggunakan aplikasi DJI GSPRO untuk melakukan pemetaan
- Salah satu Ground Control Station (GCS) / *Ipad Mini* yang digunakan tidak dapat membaca lokasi terkini pilot drone-nya. Hal ini memakan waktu 1 jam untuk mencari solusinya.

Walaupun kendala-kendala teknis tersebut terjadi, peserta masih dapat melakukan prakteknya dan tetap mendapatkan pengalaman serta pengetahuannya. Seluruh tim yang melakukan praktek telah berhasil mengambil beberapa spot berdasarkan misi terbang yang telah dibuat, dan UAV / drone kembali dengan selamat / *return to home* (RTH). Adapun konsumsi baterai drone yang digunakan masih cukup untuk melakukan 2-3 misi pemetaan lagi.

Setelah melakukan praktek, peserta melanjutkan dengan mengolah gambar / data yang diambil atau dipetakan pada praktek. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi **Agisoft Metashape**. Pada pengolahan data ini, diketahui bahwa dalam mengolah citra drone untuk menjadi informasi yang dapat digunakan, membutuhkan waktu cukup lama. Bahkan Personal Computer (PC) yang telah memiliki spesifikasi yang mumpuni —(Processor Intel i9 generasi 10, RAM 32 GB, SSD NVME 500GB, HDD 4TB, VGA NVIDIA GTX 1660)—pun masih membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk mengolah data *orthomosaic* dari drone tersebut, padahal luas areal yang dipetakan terbilang cukup kecil, hanya 1-2 ha saja. Setelah menghasilkan data *orthomosaic*, peserta diajarkan untuk mengolah data tersebut menjadi peta 2 dimensi dan menggambarkan kontur dari areal tersebut. Aplikasi yang digunakan diantaranya yaitu **ArcGIS** dan **PCI Geomatica**. Aplikasi ArcGIS digunakan untuk mengolah data dari drone menjadi peta 2 dimensi, sementara aplikasi PCI geomatica digunakan untuk mengkonversi data yang sebelumnya 3 dimensi, menjadi 2 dimensi, agar bisa terlihat garis konturnya.

Terakhir peserta diajarkan membuat Layout peta, sehingga menjadi satu buah peta yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dari lokasi / areal yang dipetakan. Sebelum kegiatan ditutup, peserta diberikan link yang akan diisi untuk melakukan post-test. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana perkembangan kapasitas peserta setelah mengikuti pelatihan diseminasi menggunakan drone ini.



Hasil pelatihan ini melahirkan pembelajaran sehingga PMU menyarankan kepada Manajemen KAPABEL sebagai berikut:

- Akun DJI GSPRO yang digunakan pada pelatihan ini guna memetakan areal merupakan akun berjenis 'free trial', sehingga masih sangat terbatas dalam melakukan aktivitas pemetaan areal. Oleh karena itu dalam melakukan pemetaan di lokasi atau areal kawasan pada implementasi program kedepannya, dibutuhkan **upgrade ke akun DJI GSPRO premium** serta juga membeli fitur-fitur agar menghasilkan data atau informasi yang jauh lebih baik dan tidak ada kendala.
- Salah satu kendala teknis yang perlu diperhatikan juga adalah spesifikasi Kartu Memori yang dimiliki UAV / Drone oleh program ini. Kapasitas nya masih kurang dan kecepatan membacanya juga kurang maksimal. Sehingga perlu **diupgrade ke jenis Memory Card dengan tipe Extreme** dengan kapasitas yang lebih besar, **minimal 128 GB**.
- Pada kegiatan ini, dipahami bahwa dalam menerbangkan drone dalam diseminasi dan pemetaan, khususnya yang belum tersertifikasi atau berlisensi, tidak dapat dilakukan hanya satu orang. Oleh karena itu direkomendasikan untuk kegiatan diseminasi dan pemetaan berbasis drone pada program nantinya untuk membuat tim yang bertugas untuk menerbangkan drone. Kebutuhan tim tersebut paling tidak berjumlah 4 orang yaitu Main Pilot, GCS, Observer, dan Pengolah Data.

## 2.2. Pembuatan Leaflets, Posters, dan Banner

Leaflet, poster dan banner dalam perencanaan awal akan dibuat pada bulan September – Oktober 2021 dalam bentuk media cetak. Namun, kami menganggap beberapa hal seperti dengan poster-poster dan banner-banner ini juga perlu dilaksanakan tiap bulan, bergantung pada kebutuhan penggunaannya. Saat ini telah di desain (1) buah leaflet, (1) digital poster, (1) banner, dan (2) x-Banner yang digunakan pada saat *Kick-Off Meeting Program*. Selain itu, juga telah dibuat desain banner untuk kegiatan Pertemuan Multipihak Pengusulan Skema Perhutanan Sosial di 3 Kabupaten, yaitu Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang.

### 2.3. Pembuatan Film Dokumenter Adaptasi Perubahan Iklim

Pertemuan Inisiasi pembuatan film dokumenter merupakan **Sub-Activity 4.1.1.1.1: Fasilitas pertemuan pembuatan film dokumenter terkait aksi adaptasi perubahan iklim**. Pelatihan ini dipandu oleh **Pendamping Ahli Pembuatan Film Dokumenter, Andry Mardian**, yang merupakan praktisi pada bidang penyiaran, pertelevisian, dan juga pembuatan film. Kegiatan ini terlaksana pada Rabu 16 Desember 2020.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh PMU yang terdiri dari Program Coordinator, Outcome Leader/Program Manager Hulu, Knowledge Management, dan Content Dissemination Officer. Kegiatan ini menghasilkan input yaitu bagaimana tahapan dalam proses produksi film dokumenter ini dilakukan diantaranya :1) list daerah sasaran; 2) pra produksi; 3) proses produksi; 4) post-produksi; hingga 5) launching. Setelah itu pertemuan ini menghasilkan agenda-agenda kedepan yang akan dilakukan dalam memproses pembuatan film dokumenter. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi berupa perlunya untuk segera dilakukan proses coaching diawal untuk penguatan kapasitas dalam pengambilan video dan audio, agar beberapa momen penting dalam aktivitas program sudah bisa diambil lebih awal. Hasil pertemuan ini dilanjutkan dengan kegiatan Coaching atau Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter di desa intervensi program.



#### Coaching Pembuatan Film

Kegiatan coaching/training pembuatan film dokumenter dilaksanakan mulai 19 Desember 2020 di Kota Makassar dengan agenda diskusi ringan, dan berangkat ke Kabupaten Enrekang untuk melakukan kegiatan coaching langsung kepada PMU yang bertugas dilapangan (khususnya FO Diseminasi) pada tanggal 20-21 Desember 2020. Kegiatan ini pada perencanaan dilaksanakan 3 kali selama masa program, yaitu pada bulan **Februari 2021, Juli 2021, dan November 2021**. Namun, karena berdasarkan rekomendasi hasil pertemuan inisiasi dan kesepakatan internal di PMU, maka kegiatan coaching perlu dilakukan lebih awal. Dengan ini jadwal kegiatan berubah menjadi **Desember 2021, Februari 2021, dan Juli 2021**.

Pendamping Ahli Pembuatan Film Dokumenter yang melakukan coaching langsung kepada PMU yaitu Andry Mardian, yang merupakan praktisi pada bidang penyiaran, pertelevisian, dan juga pembuatan film. Kegiatan ini dihadiri pula oleh PMU yang terdiri dari Outcome Leader/Program Manager Hulu, Coordinator Officer Tana Toraja dan Enrekang, Knowledge Management & Communication Manager, Content Dissemination Officer, Field Officer (FO) & Field Officer of Dissemination.

Kegiatan coaching ini dilakukan dengan pemberian materi teknik menyamakan setting kamera, dan membangun perspektif dalam pengambilan video, menguasai pencahayaan kamera,

mengatasi tremor dalam pengambilan video, tujuh (7) teknik pengambilan video (*panning left, panning right, tilting up, tilting down, dolly in, dolly out, tracking*), Proses *dubbing / VoiceOver*, dan beberapa tips dan trik lainnya dalam proses produksi film dokumenter. Selain itu PMU juga diberi beberapa contoh pembelajaran dari beberapa video dokumenter yang ada, video-video podcast dan wawancara, serta membreakdown proses produksi dari film tersebut.

Selanjutnya PMU berangkat ke Desa Palladang, untuk melakukan praktik produksi video dokumenter. Di lokasi PMU melakukan proses pengambilan video, pengumpulan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara bersama narasumber. Sepulangnya dari Desa, PMU didampingi dengan pendamping ahli melakukan proses seleksi video yang telah diambil dan juga "*filing*" atau menamai file dengan nama adegan dan tanggal pembuatan, yang bertujuan untuk memudahkan dalam manajemen file, dan agar tim post-produksi lebih efisien dalam memilih footage yang akan dipilih untuk di *mix* menjadi sebuah video yang komplit.



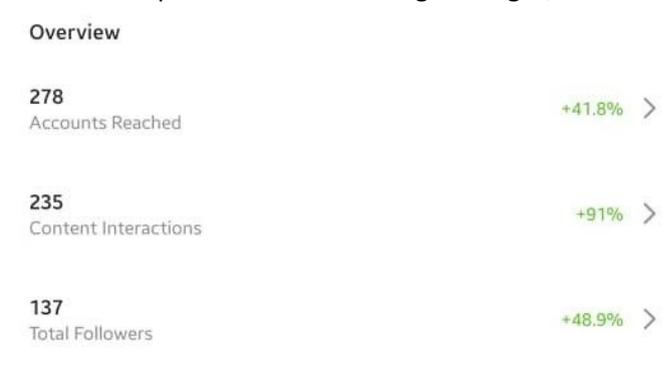
#### 2.4. Pengembangan Website dan Media Sosial untuk Adaptasi Perubahan Iklim

Konsep dalam pengembangan website direncanakan telah ada pada bulan November 2020. Namun, hal ini belum dilakukan karena beberapa hal diantaranya:

- 1) Masih perlu di komunikasikan, apakah website yang akan dibuat ini dapat mengambil sub-domain Yayasan TLKM (<http://tlkm.or.id>) selaku lead konsorsium, ataukah website ini harus berdiri sendiri dengan membawa domain khusus Kapabel.
- 2) Kami masih meramu konsep dasar dalam website ini. Apakah website ini hanya akan menjadi sarana untuk mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan program, ataukah website ini dapat juga berfungsi sebagai *database server* berbasis *online*, khususnya bagi staf manajemen program / pihak yang diberikan akses dalam mengambil dan mengelola *database* tersebut.

- 3) Kami sampai saat ini belum menemukan vendor dan harga yang pasti terkait dengan pembuatan website dengan beberapa usulan konsep yang disebutkan sebelumnya.

Terkait dengan pengelolaan sosial media, saat ini masih menggunakan media sosial Yayasan TLKM untuk mempublikasikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan program. Beberapa sosial media yang telah dibuat yaitu Instagram dengan user: @yayasan.tlkm dan Linkdin dengan user: Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat. Untuk sosial media Instagram, per 30 Desember 2020 telah mencapai 137 followers dengan Insight/statistiknya per 31 Desember 2020 sebagai berikut:



Akun Facebook, sampai saat ini, belum ada perkembangan pada jumlah pengikut (*followers*) di Facebook. Terkait dengan postingan, terjadi kendala teknis yaitu tidak tersambungannya postingan di Instagram dengan Facebook, sehingga seluruh postingan yang seharusnya juga teposting di Facebook tidak muncul di laman Facebook. Selain itu, dikarenakan pengelolaan website belum dapat dilakukan dengan maksimal, maka postingan artikel di Facebook pun juga belum dapat direalisasikan dengan baik.

Youtube Channel, saat ini. belum ada video yang dapat diupload. PMU khususnya tim diseminasi masih dalam tahap penguatan kapasitas dalam pembuatan video. PMU telah dilatih dasar-dasar dalam membuat konten video yang baik, sehingga diharapkan di bulan selanjutnya sudah dapat dibuat beberapa konten video yang dapat di upload di Youtube.

Akun Linkdin, juga belum ada perkembangan yang signifikan. Karena akun Linkdin belum dikelola dengan optimal. Untuk insight/statistik nya per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



## 2.5. Penulisan Buku Adaptasi Perubahan Iklim

Persiapan Penulisan Buku dan Jurnal dimulai dengan diskusi perencanaan bersama Tim Pendamping Ahli Penulisan Buku dan Jurnal. Pertemuan persiapan penyusunan buku dan jurnal ilmiah adaptasi perubahan iklim telah dilaksanakan pada 25 November 2020, bertempat di Ruang *Writing Corner Journal of Forest and Society*, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

### a. Diskusi Perencanaan Penyusunan Buku dan Jurnal

Kegiatan pertemuan ini dihadiri oleh Pendamping Ahli Penulisan Jurnal, Dr. Alif K. Sahide, yang merupakan akademisi sekaligus *Chief Editor Jurnal Forest and Society* dan Pendamping Ahli Penulisan Buku, Nurhadi Sirimorok, yang merupakan penulis buku yang telah menghasilkan beberapa karya buku diantaranya Catatan Perjalanan tentang Satu Bahasa—Melihat Desa Lebih Dekat; Desa Butuh Energi Alternatif, Sekarang! dan juga merupakan anggota SRP Payo-Payo yang memiliki pengalaman dalam riset-riset etnografi. Kegiatan ini dihadiri oleh PMU yang terdiri dari Program Coordinator, Outcome Leader/Program Manager Hulu dan Hilir, Knowledge Management, serta anggota Forest and Society Research Group.



### b. Coacing Penulisan Buku

Hasil diskusi persiapan perencanaan, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan konsultasi penyusunan buku via zoom meeting. Kegiatan bagian dari **Aktivitas 4.1.1.2.2. Penyusunan Buku Adaptasi Perubahan Iklim.**

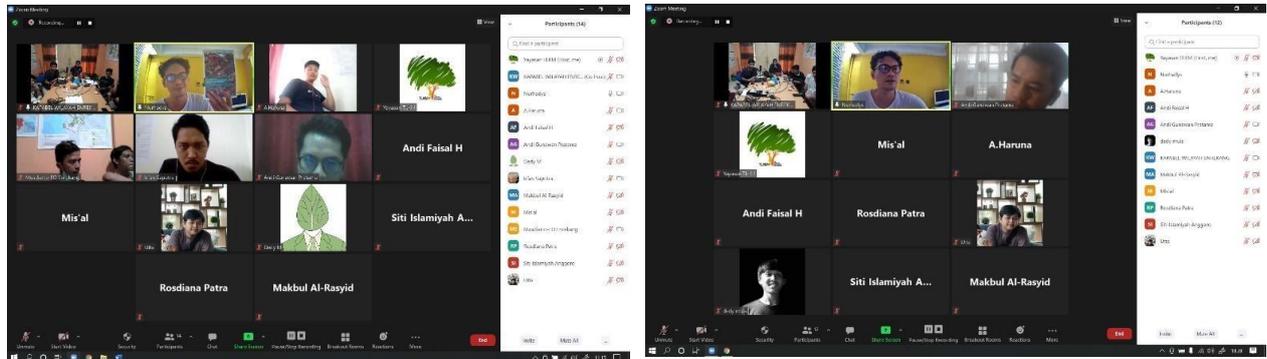
Tujuan kegiatan ini untuk melakukan evaluasi Catatan Lapangan FO sehingga ada input, perbaikan, dan rekomendasi tulisan etnografi mereka. Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas PMU, tindak lanjut dari kegiatan Pelatihan Fasilitator.

Kegiatan ini pada perencanaan awal dilakukan pada bulan Februari 2021, namun dipercepat untuk menggantikan jadwal Coaching Penulisan Buku yang harus terundur dikarenakan Pendamping Ahli penulisan Buku, berhalangan secara fisik untuk dapat hadir langsung di Kantor Enrekang untuk melakukan coaching langsung. Agar Field Officer tetap mendapatkan masukan serta rekomendasi mengenai catatan lapangan yang dibuatnya, maka kegiatan konsultasi diinisiasi untuk diadakan lebih cepat sebagai pengganti kegiatan Coaching penulisan buku secara langsung.

Konsultasi ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 dengan dipandu Nurhadi Sirimorok selaku Pendamping Ahli Penulisan Buku, serta PMU yang terdiri dari Outcome Leader/Program Manager Hulu, Knowledge Management & Communication Manager, Coordinator

Officer Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang, serta Field Officer dari Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang.

Untuk Outcome Leader/Program Manager Hilir, Coordinator Officer Pinrang dan Field Officer di Pinrang tidak berkesempatan mengikuti kegiatan ini dikarenakan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan lapangan yaitu Pertemuan Rutin KPPI di Pinrang. Olehnya itu langkah alternatif agar PMU yang tidak sempat mengikuti kegiatan juga bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan dari kegiatan ini, Konsultasi via Zoom Meeting telah di *record* dan dikirimkan ke masing-masing PMU yang tidak sempat hadir. Kemudian akan dibuatkan grup WhatsApp bersama dengan Pendamping Ahli penulisan Buku, untuk menanyakan jika ada yang masih perlu diketahui atau dipelajari lebih lanjut.



**Gambar Pertemuan Zoom Meeting**

### c. Pembuatan Coding Book

Peningkatan kapasitas fasilitator tidak hanya sampai pada pelatihan fasilitator yang dilaksanakan pada awal kegiatan proyek tapi terus berlanjut selama program berjalan. Salah satu bentuk peningkatana kapasitas fasilitator yaitu coaching penyusunan buku melalui catatan lapangan Field Officer.

Selama dua bulan berjalan sejak dijalankan aktivitas 1.2.1.2. Ooperasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hulu dan aktivitas 2.1.1.3. Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hilir pada 16 November 2020, jumlah catatan lapangan yang diproduksi FO sebanyak 52 tulisan.

**Tabel 12. Jumlah Catatan Lapangan Periode November – Desember 2020**

Kabupaten	Jumlah
Toraja Utara	16 tulisan
Tana Toraja	12 tulisan
Enrekang	7 tulisan
Pinrang	17 tulisan
<b>Total</b>	<b>52 tulisan</b>

Evaluasi catatan lapangan dilakukan selama 3 hari pada tanggal 4-6 Januari 2021 di kantor KAPABEL di Enrekang. Seluruh FO, PO dan PM mengikuti kegiatan evaluasi ini. Evaluasi catatan lapangan bertujuan peningkatan kapasitas terkait metode pengumpulan data etnografi dan proses penulisan etnografi. Catatan lapangan ini akan menjadi bahan dalam penulisan buku dari perancangan outline hingga tahap editing dan review.

Materi Hari Pertama, metode penggalian pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Peserta diberi pemahaman pentingnya menggali

informasi mendalam terkait fenomena yang ada seperti fenomena perubahan iklim. Pemateri memberikan alat bantu (*tools*) bagaimana melakukan FGD serta tips dan trik membagi kelas sosial (baik ekonomi, gender, usia, dan lainnya) agar meminimalisir ketimpangan informasi.

Materi Hari Kedua, metode membuat “coding” dalam menulis catatan lapangan. Pendamping ahli membagikan pengalamannya dalam membuat coding untuk catatan lapangan. *Coding* sangat penting dalam memudahkan fasilitator dalam membuat catatan analitis. Menggunakan metode *coding* akan memudahkan menulis hasil analisa untuk penulisan buku. Selain itu, FO juga diberikan teknik-teknik penulisan yang baik. Pendamping ahli memberikan tips dalam merapikan prosedur dalam penulisan catatan lapangan. FO mengedit ulang catatan lapangannya dengan mengubah format catatan lapangan berdasarkan metode *coding*.

Materi Hari Ketiga, FO sebagai peserta memiliki waktu selama 2 jam berdiskusi membuat format *coding* catatan lapangan dengan cara membuat “Buku Kode”. Buku Kode ini akan menjadi acuan bagi FO dalam melakukan *coding* pada Catatan Lapangannya. Metode ini juga sangat membantu bagi PO, PM dan PC dan Tim Knowledge Management dalam melakukan analisis dan pengayaan data-data dan informasi yang diperoleh FO. **Lihat Lampiran 5: Contoh Coding Book.**

Sesi terakhir Pendamping Ahli memberikan *lesson learned* tentang proses transmisi pengetahuan (*Knowledge Transformation*) dalam studi kasus di Luwu Timur. PMU juga dibekali *tools* pendekatan *Sustainable Livelihoods* di desa.

Review Catatan Lapangan ini melahirkan kesepakatan, kesepakatan, dan rekomendasi untuk perbaikan sistem manajemen dalam menjalankan penulisan laporan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan ini menghasilkan sebuah “**Buku Kode**” yang telah disusun bersama dengan tujuan untuk memudahkan dalam analisis data data dan informasi yang ditemukan dari lapangan.
- 2) Kegiatan ini membuat sebuah sistem/prosedur dalam mengumpulkan catatan lapangan sehingga lebih memudahkan dalam proses rekapitulasi data, analisa, dan penyusunan laporan-laporan program. Beberapa catatan diskusi yang menjadi kesepakatan pada sistem yang dibangun yaitu:
  1. Catatan Lapangan dari FO dikumpulkan tiap hari Sabtu paling lambat pukul 16.00 WITA kepada PO masing-masing.
  2. PO membaca catatan lapangan, dan memberikan review, feedback, dan tambahan pertanyaan untuk digali lagi di minggu selanjutnya
  3. PO mengirimkan catatan lapangan dari FO-nya yang telah di review dan feedback kepada masing-masing FO dan juga Knowledge Management & Communication Manager pada tiap Senin paling lambat jam 08.00 WITA
- 3) Knowledge Management & Communication Manager mengirimkan update “**Buku Kode**” pada Senin paling lambat pada pukul 16.00 WITA.
- 4) PMU sebaiknya menambah referensi dalam konteks penulisan ilmiah dan metodologi riset. Salah satu jurnal yang direkomendasikan adalah Jurnal Wacana.
- 5) Untuk kebutuhan riset, PMU disarankan membeli beberapa peralatan lapangan seperti GPS, alat ukur pH tanah, dan lainnya sebagai alat peraga di lapangan.
- 6) Membutuhkan *control internal* oleh PO bersama dengan *Knowledge Management & Communication Manager* melalui group Whatsapp untuk intens membangun komunikasi terkait dengan keseragaman format. Group WA ini juga akan menjadi sarana berbagi analisis-analisis yang akan dilakukan dan eksplorasi analisa masalah yang ditemui di lapangan.

Jika sistem ini sudah berjalan dengan stabil, maka pertemuan coaching selanjutnya dilanjutkan ke fase analisis, bagaimana membuat catatan analitik, sampai menghasilkan pertanyaan-pertanyaan penelitian.



#### **D. LAPORAN KEUANGAN**

Pada kuartal I (Pertama) yaitu periode Oktober – Desember 2020 tercatat dana yang telah diterima di rekening Yayasan TLKM sebesar Rp 1.156.334.566 (*Satu Miliar Seratur Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*). Anggaran yang sudah terserap sebesar 92,92% dari dana yang sudah ditransferkan atau sudah terserap 10,78% dari nilai kontrak proyek.

Posisi saldo rekening program per 31 Desember 2020 adalah Rp. 51.588.048 dengan Outstanding uang muka Rp 38.380.000 dan saldo petty cash adalah Rp 1.253.500. Laporan Keuangan Kuartal I telah dikirimkan melalui e-mail per tanggal 7 Januari 2021.

## E. LAPORAN PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) DAN KELUARAN (OUTPUT)

### 1. Baseline Suvery

Laporan pencapaian keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) untuk setiap komponen dilihat dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Monitoring dan Evaluasi (Monev). Pada kuartal pertama ini, kegiatan Monev adalah Survei Data Dasar (*Baseline Survey*).

Tujuan kegiatan ini untuk memperoleh data dasar atau awal terkait kondisi terkini di daerah intervensi program sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian target program.

Keluaran atau *output baseline survey* yaitu:

- Adanya data baseline level output pada tiap komponen program sebagai dasar acuan dalam monitoring dan evaluasi.
- Adanya data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi pada lokasi intervensi program.
- Saran atau rekomendasi terhadap program berdasarkan hasil survey baseline

Kegiatan *baseline survey* dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan yaitu:

#### a. Persiapan

Tahapan persiapan meruapakan aktivitas pendalaman kerangka Program dan Monev Program, diskusi dengan Tim Project dan melihat rencana kegiatan program. Tahap ini juga termasuk dalam penyiapan tim survey/enumerator, sumber data, dan updating informasi dilapangan. Persiapan pelaksanaan, administrasi, dan technical meeting dan coaching tim enumerator dilaksanakan pada 26 November 2020 di Kantor Yayasan TLKM.

#### b. Pengumpulan data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan kuisisioner kepada responden. Secara umum kegiatan ini akan lebih mengacu pada pengambilan data di masing-masing output untuk mengetahui kondisi terbaru sebelum program ini berjalan.

Pengambilan data melalui observasi/survey dilakukan pada 28 November – 3 Desember 2020 di empat kabupaten intervensi program. Tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

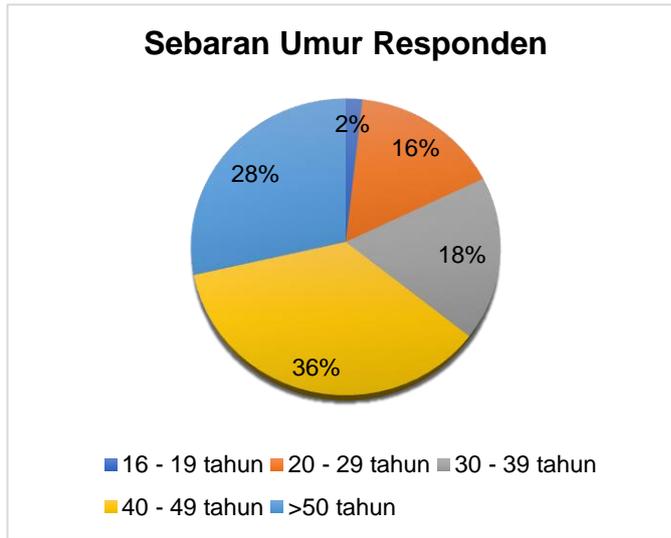
- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner.
- b. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu penentuan responden secara sengaja dengan pertimbangan bahwa masyarakat yang berada di wilayah intervensi program. Adapun jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 56 orang responden dengan kriteria sebaran usia, pekerjaan.

#### c. Pelaporan

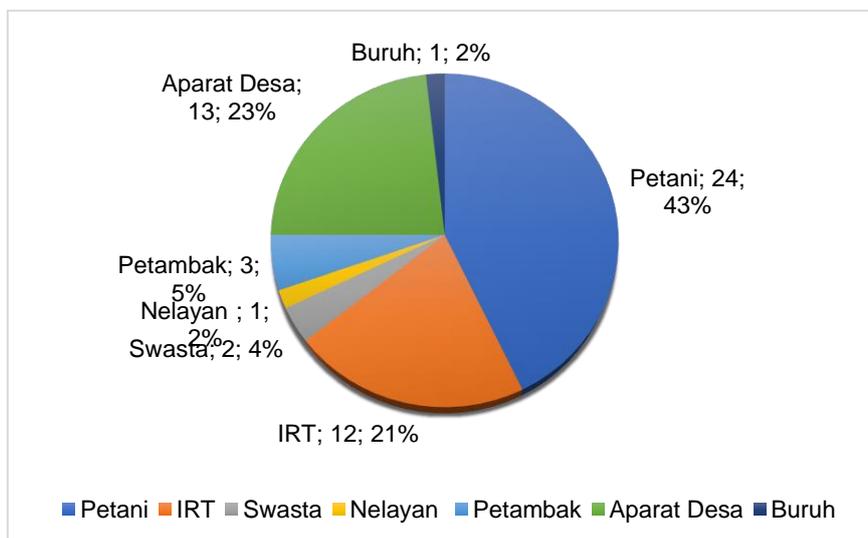
Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan semua hasil data wawancara terkait kondisi terbaru dari daerah Intervensi.

**a. Profil Responden**

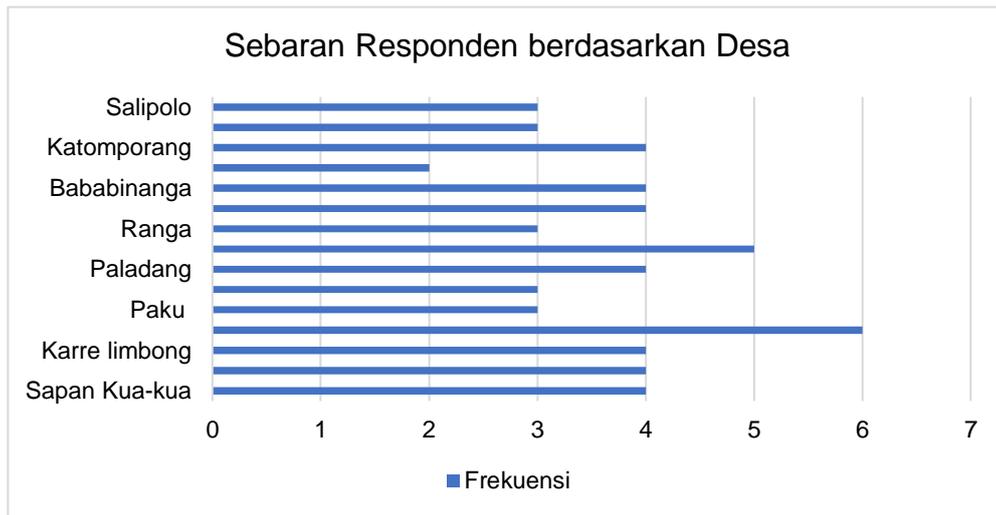
Berikut sebaran responden dalam melakukan wawancara menggunakan kuesioner:



Gambar 2. Grafik Persentase Jenis Kelamin Responden

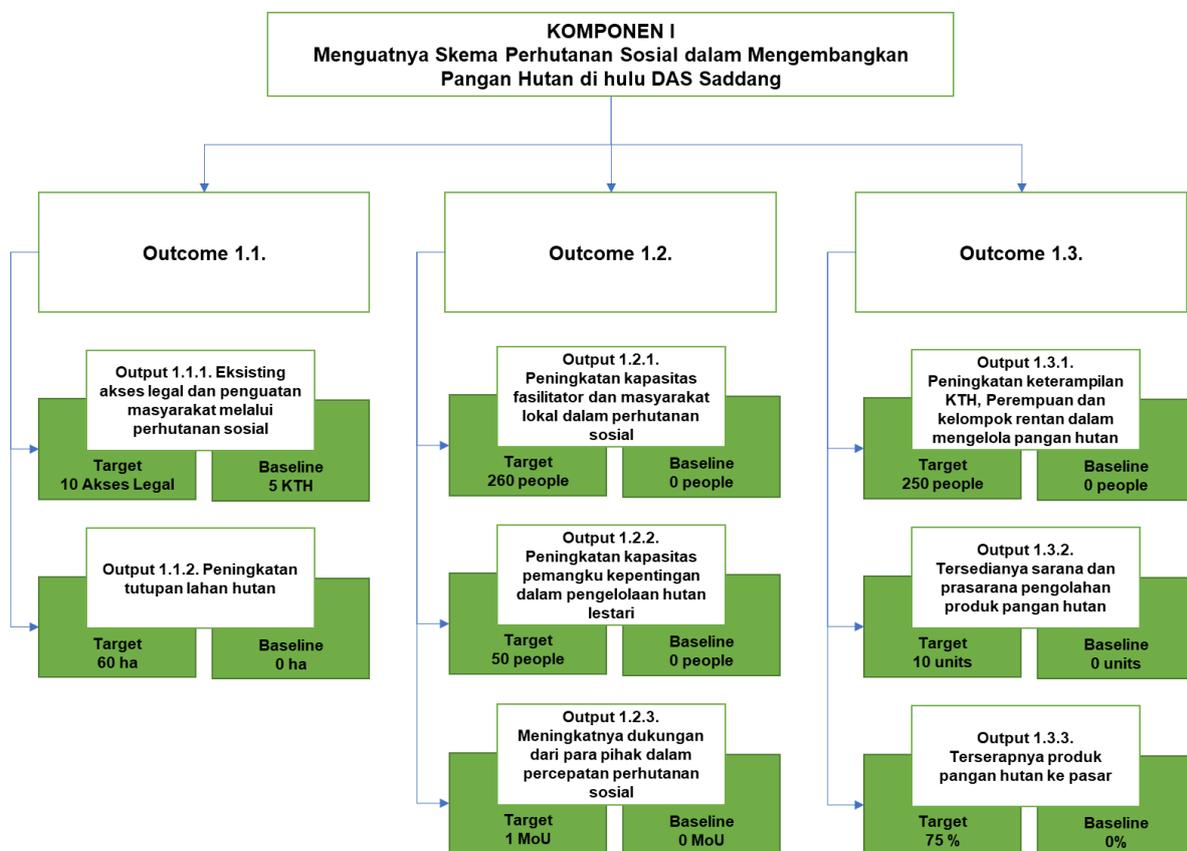


Gambar 3. Grafik Jenis Pekerjaan Responden

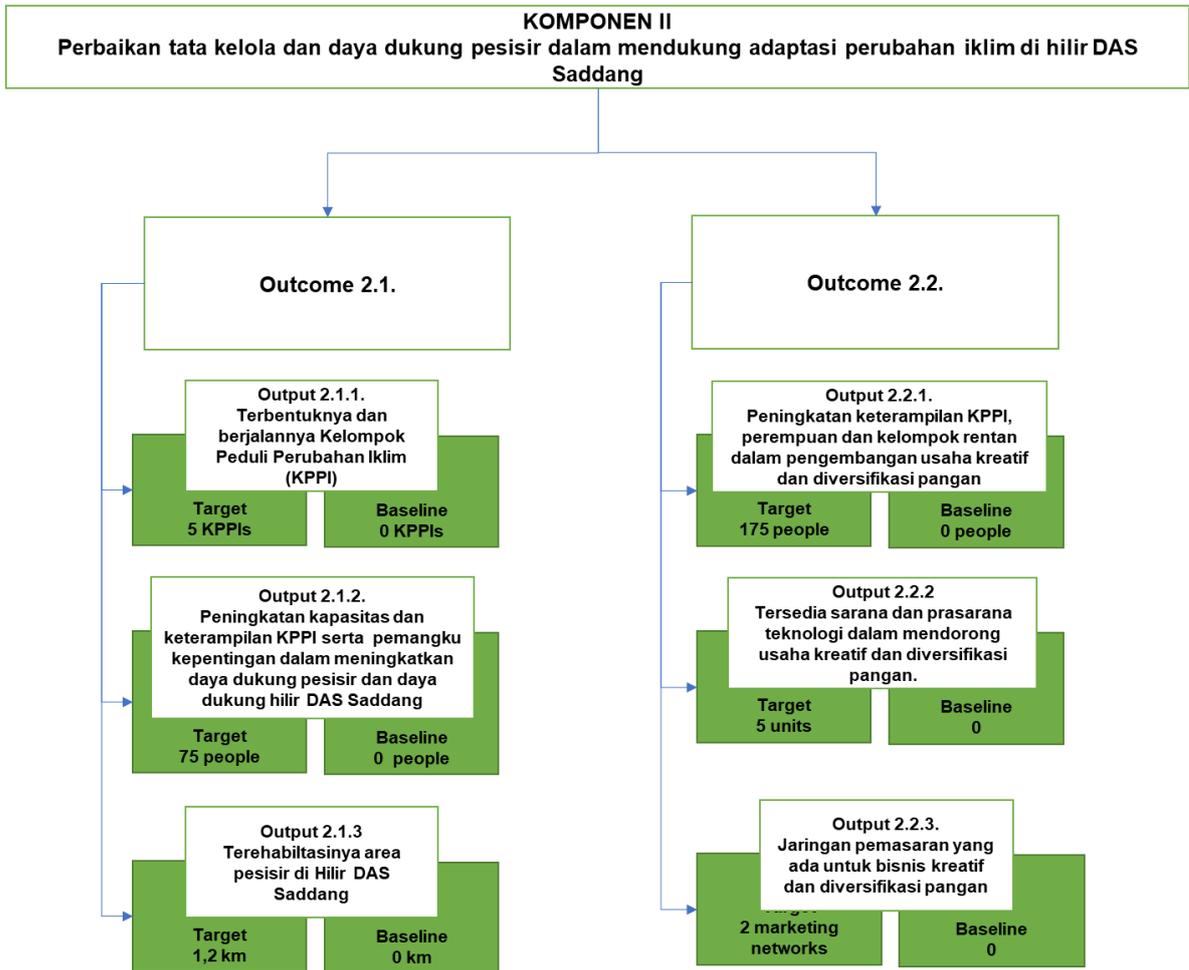


Gambar 4. Sebaran Responden berdasarkan Desa

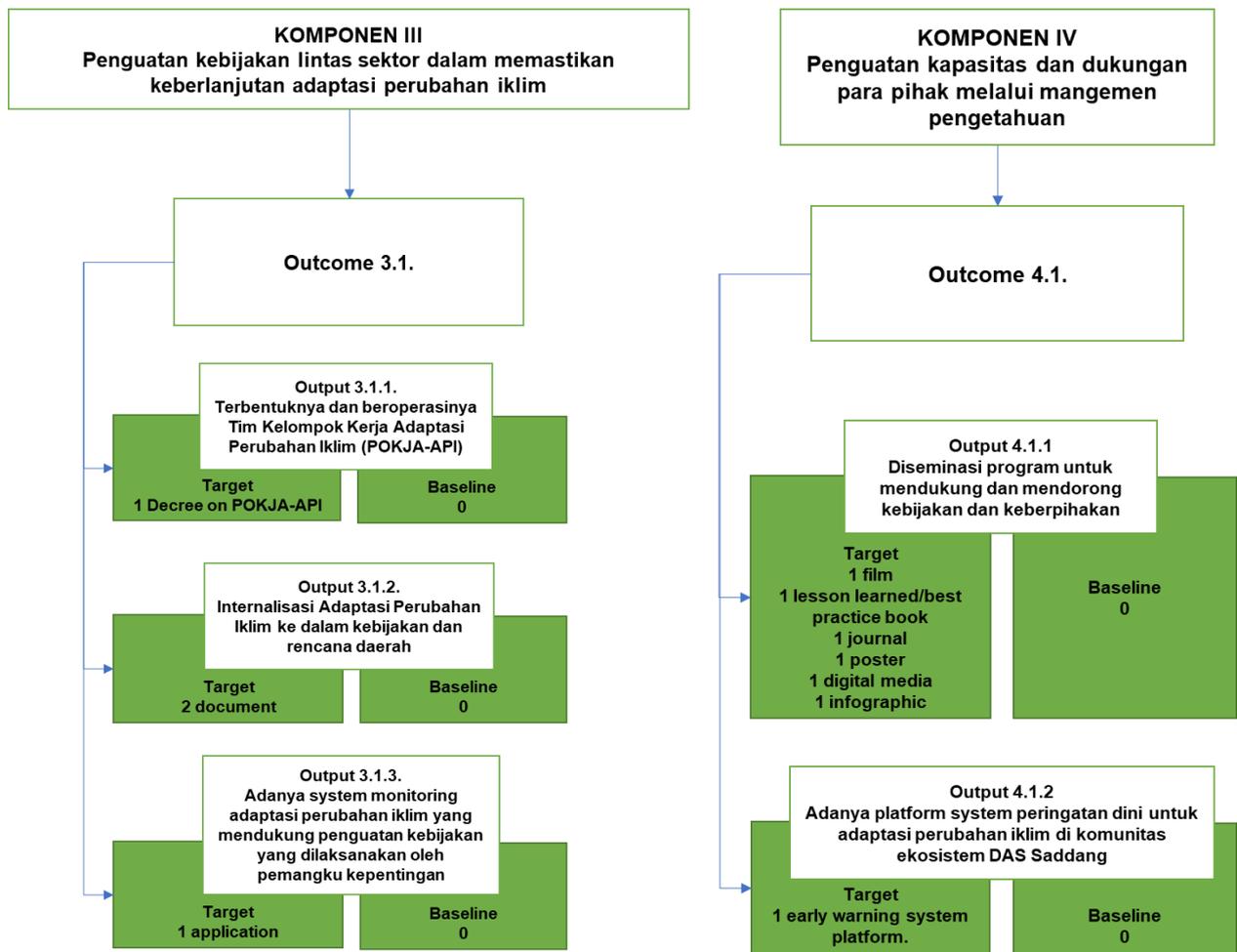
**b. Framework**



Gambar 5. Framework Komponen I



Gambar 6. Framework Komponen II



Gambar 7. Framework Komponen III & IV

## 2. Outcome dan Output

### Outcome 1.1 Bertambah luasnya skema Perhutanan Sosial seluas 5.000 ha di hulu DAS Saddang

**Output 1.1.1. Eksisting akses legal dan penguatan masyarakat melalui perhutanan sosial** dengan indikator 5.000 ha luas dari 10 Izin Perhutanan Sosial memperoleh legal akses/penguatan. Hasil survey baseline didapatkan 5 akses legal di Wilayah Hulu DAS SADDANG. Masing masing yaitu :

- 1) KTH Siporannoa – Desa Sapan Kua Kua/ Kab. Toraja Utara
- 2) KTH Rante Parangan – Desa Karre Limbong/ Kab. Toraja Utara
- 3) KTH Pangi – Desa Karre Limbong/ Kab. Toraja Utara
- 4) KTH Buka – Desa Karre Limbong/ Kab. Toraja Utara
- 5) KTH Sipakatuo – Desa Pundilemo/ Kab Enrekang

Kabupaten Toraja Utara ditemukan 4 Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTH HKm). Pada Lembang (Desa) Sapan Kua-Kua Kecamatan Buntao Kabupaten Toraja Utara, wawancara bersama “pak Simon” selaku ketua **KTH Siporannoa** dibentuk sekitar 2014 dan beranggotakan 25 orang.

Namun secara legal, SK belum pernah dilihat sama sekali oleh kelompok. Anggota kelompok mengelola hasil hutan bukan kayu yaitu madu hasil budidaya lebah jenis apis cerana dan madu hutan jenis apis dorsata. Sebanyak 13 orang anggota kelompok fokus untuk mengelola madu, selebihnya mengelola kopi arabika, cengkeh.

Sebagian besar hasil kopi arabika dijual ke Perusahaan (PT. TOARCO JAYA) dengan harga Rp. 8.000/liter jika pedagang luar dijual dengan harga Rp.10.000/liter. Masyarakat lebih memilih menjual ke PT. TOARCO JAYA dan memanen kopi satu kali dalam setahun (bulan Juli).

Untuk jenis madu dari lebah hasil budidaya dijual dengan harga Rp. 150.000/botol (650 ml) sedangkan jenis madu hutan dijual dengan harga Rp. 200.000/botol (650 ml). Panen madu budidaya dibulan Februari (musim hujan), pakannya bunga kopi dan kaliandra dihasil sekitar 160 liter. Madu hutan jika memasuki musim hujan (sekitar bulan 11 hingga bulan 4) panen madu hutan sebanyak 2 kali didapatkan 6 liter.

Lembang (Desa) Karre Limbong Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara, hasil wawancara dilapangan didapatkan 3 (tiga) izin kelompok tani hutan berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) yaitu **KTH Rante Karangan, KTH Pangi, dan KTH Buka**. Kelompok tersebut mengelola hasil hutan bukan kayu yakni jenis kopi robusta.

Namun, ada satu kelompok KTH Buka yang mengusulkan pengunduran diri (lepas izin PS), alasannya anggota kelompok tersebut tidak memiliki lahan di dalam kawasan dan jauh dari tempat mereka bermukim, serta alasan lain yang mereka kemukakan dikarenakan kopi yang dikelola tidak terlalu produktif tumbuhnya.

Desa Pundilemo Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, hasil yang ditemui dilapangan bahwa melalui inisiasi KPH Mata Allo dan sekaligus sosialisasi Perhutanan Sosial oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sulawesi pada tahun 2019 alhasil dari tindak lanjut pertemuan ini terbentuklah 1 kelompok tani hutan yang bernama **KTH HKm Sipakatuo** dengan izin pengelolaan hutan lindung skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 52 Ha selama 35 tahun dengan jumlah anggota sebanyak 27 orang yang diketuai oleh Pak Sukarman.

Adapun progress dari **KTH HKm Sipakatuo** yakni telah terbit SK Kulin KK dan 4 SK Kelompok yang diberikan langsung oleh BPSKL Sulawesi. Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) juga telah ada yang di fasilitasi oleh Pendamping penyuluh dari KPH Mata Allo. Adapun Bantuan Alat Ekonomi Produktif (BAEP) yang telah diberikan dari BPSKL pada akhir tahun 2019 untuk mawadahi KUPS gula aren yakni telah diberikan alat bantu memasak gula seperti wajan, spatula, dan beberapa cetakan. Masyarakat juga telah dievaluasi 1 tahun progress produktifitas alat oleh BPSKL

dan ternyata masyarakat masih mengharapkan tambahan alat tersebut karena jumlahnya masih sangat kurang dari yang diharapkan.

Kondisi kelompok tani hutan (KTH) hasil wawancara dengan ketua kelompok bahwa dari 27 orang anggota masih sedikit yang memang memanfaatkan izin tersebut. Hanya sebagian besar anggota kelompok saja yang mengambil aren, tetapi masih kesulitan pada proses pemasaran. Aren yang diambil oleh masyarakat diolah menjadi gula merah (gula batok). Masyarakat menjual produk gula merah batok langsung ke pasar lokal di desa dengan harga Rp. 14.000/kg.

**Output 1.1.2. Meningkatnya tutupan lahan hutan** dengan indikator 60 ha lahan yang telah direhabilitasi/ditanam dari pembibitan dan 70% bibit tumbuh dari budidaya. Saat baseline survey pada November-desember 2020 kegiatan yang berkaitan dengan output tersebut belum dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan Program Manager Hulu juga melihat workplan yang ada akan dilaksanakan pada bulan januari 2021.

### **Outcome 1.2 Penguatan stakeholder dan institusi skema Perhutanan Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim**

**Output 1.2.1. Peningkatan kapasitas fasilitator dan masyarakat lokal dalam perhutanan sosial,** indikator pencapaian yakni 260 orang telah meningkat kapasitas dalam mendorong perhutanan sosial. Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan melalui pelatihan pada bulan November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang. Adapun peserta terdiri atas 4 orang perempuan dan 17 laki-laki.

### **Outcome 1.3 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pangan hutan di Hulu DAS Saddang**

**Output 1.3.1. Peningkatan keterampilan KTH, Perempuan dan kelompok rentan dalam mengelola pangan hutan,** dengan indikator 250 orang dari 10 akses legal Perhutanan Sosial, perempuan dan kelompok rentan telah meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola pangan hutan lestari. Hasil baseline survey belum ada realisasi, kegiatan akan dilaksanakan pada januari tahun 2021.

### **Outcome 2.1 Terehabilitasinya lahan dan pesisir di Hilir DAS Saddang secara berkelanjutan**

**Output 2.1.1. Terbentuknya dan berjalannya Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) sebagai motor penggerak di tingkat desa dan kecamatan** Terbentuknya dan berjalannya **Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) sebagai motor penggerak di tingkat desa dan kecamatan** dengan Indikator 5 KPPI terbentuk dan berjalan (Kelompok Peduli Perubahan Iklim). Pada saat dilaksanakan baseline survey belum ada realisasi kegiatan akan dilaksanakan. Kegiatan pertemuan rutin akan dilaksanakan pada Kuartal II.

**Output 2.1.2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan KPPI serta pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya dukung pesisir dan daya dukung hilir DAS Saddang** dengan indikator 751 orang yang meningkat kapasitas dan keterampilannya dalam perbaikan tata kelola dan daya dukung pesisir. Hasil baseline survey belum ada realisasi pada 2020, kegiatan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021.

**Output 2.1.3 Terehabilitasinya area pesisir di Hilir DAS Saddang** dengan indikator sepanjang 1,2 km wilayah pesisir terehabilitasi. Hasil dari baseline survey belum ada realisasi, kegiatan akan dilaksanakan tahun 2021 atau di kuartal berikutnya.

## **Outcome 2.2 Meningkatnya pendapatan masyarakat di Hilir DAS Saddang melalui usaha-usaha kreatif ramah lingkungan dan diversifikasi pangan**

**Output 2.2.1 Peningkatan keterampilan KPPI, perempuan dan kelompok rentan dalam pengembangan usaha kreatif dan diversifikasi pangan.** Adapun indikator pencapaiannya yaitu 175 orang telah meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan bisnis kreatif dan diversifikasi pangan. Hasil dari baseline survey belum ada realisasi kegiatan.

Namun di dapatkan 3 kelompok perempuan di Wilayah Hilir (Kabupaten Pinrang). Dusun Lasape Desa Katomporang Kabupaten Pinrang, didapatkan kelompok Ibu-ibu pengelola buah salak (Kelompok Tani Salak) beranggotakan 19 orang terbentuk tahun 2016. Kelompok pernah mendapatkan pelatihan membuat selai dari buah salak yang diadakan oleh Universitas Bosowa bertempat di Kantor Desa tetapi tidak ada follow up setelah pelatihan. Selain itu pernah mendapatkan pula pelatihan membuat kopi biji salak diadakan oleh LSM dan tidak ada follow up setelah pelatihan. Hingga saat ini kelompok perempuan tersebut tidak aktif lagi.

Kelompok lainnya adalah kelompok Ibu-ibu Kreatif dari Desa Salipolo Kabupaten Pinrang dalam mengelola Ikan Bandeng tanpa Tulang (kelompok semangka) terbentuk tahun 2019 beranggotakan 7 orang. Kegiatan yang pernah dilakukan yakni pernah mendapatkan pelatihan membuat bakso ikan bandeng tahun 2019 dari dinas sosial. Kemudian pernah juga mendapatkan pelatihan cabut tulang ikan tahun 2019 dari dinas sosial, alat yang diberikan blender 1 buah masing-masing kelompok dan timbangan 1 buah.

Terdapat 3 kelompok ibu-ibu ini di Desa Salipolo. Kendalanya pada pemasaran (tidak pernah melakukan proses jual beli ikan bandeng olahan tersebut). Hingga saat ini kelompok tersebut tidak aktif karena persoalan pemasaran. Ada juga Kelompok Ibu-ibu Kreatif dalam mengelola Ikan Bandeng tanpa Tulang (kelompok Mekar) terbentuk tahun 2020 beranggotakan 10 orang. Adapun pelatihan yang pernah didapatkan adalah pelatihan pembuatan abon ikan dari PT Atina (perusahaan bahan baku udang sitto) tahun 202. Kelompok ini pernah melakukan penyusunan proposal pengembangan pembuatan abon ikan Tahun 2020 ke DKP, namun tidak ada respon dari pihak DKP hingga saat ini.

**Output 2.2.2 Tersedia sarana dan prasarana teknologi dalam mendorong usaha kreatif dan diversifikasi pangan.** Adapun indikator pencapaiannya yaitu 175 orang telah meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan bisnis kreatif dan diversifikasi pangan. Hasil dari baseline survey belum ada realisasi di 2020, kegiatan akan dilaksanakan pada 2021 atau kuartal berikutnya.

**Output 2.2.3. Jaringan pemasaran yang ada untuk bisnis kreatif dan diversifikasi pangan,** dengan indikator capaian yakni yaitu 2 jaringan pemasaran untuk usaha kreatif dan diversifikasi pangan dan 75% dari 2 produk habis terjual. Hasil dari baseline survey belum ada realisasi, kegiatan akan dilaksanakan pada maret tahun 2021 atau kuartal berikutnya

## **Outcome 3.1 Menguatnya Penataan, Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang pada Ekosistem DAS Saddang**

**Output 3.1.1. Terbentuknya dan beroperasinya Tim Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (POKJA-API),** dengan indikator 1 TIM POKJA-API untuk wilayah Sulawesi Selatan. Hasil dari baseline survey telah ada POKJA PPRK yang identik dengan fungsi POKJA API. Tim POKJA PPRK berada dilakukan dilevel provinsi. Sehingga intervensi program sedapat mungkin melakukan telaah kebijakan yang lebih

dalam terkait fungsi, topoksi dan efek yang ditimbulkan apabila mendorong pembentukan Tim Pokja Api ataupun menginternalisasi di Tim Pokja PPRK.

**Output 3.1.2. Internalisasi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam kebijakan dan rencana daerah,** dengan indikator yakni 2 dokumen perencanaan daerah yang terinternalisasi RAN API. Hasil dari baseline survey belum ada realisasi kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020, kegiatan ini akan dilakukan pada kuartal II.

**Output 3.1.3. Adanya sistem monitoring adaptasi perubahan iklim yang mendukung penguatan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan,** dengan indikator 1 sistem aplikasi monitoring adaptasi yang digunakan dalam menunjang implementasi kebijakan. Hasil dari baseline survey belum ada realisasi kegiatan ini pada tahun 2020, kegiatan ini masuk pada kuartal III.

**Outcome 4.1. Menguatnya kapasitas dan pemahaman stakeholder melalui proses diseminasi dan sistem peringatan dini adaptasi perubahan iklim**

**Output 4.1.1 Diseminasi program untuk mendukung dan mendorong kebijakan dan keberpihakan,** dengan indikator capaian yakni 1 film dokumenter, 1 buku lesson learned/best practice, 1 jurnal ilmiah, 1 poster, 1 digital media, 1 infografis. Hasil dari baseline survey belum ada realisasi kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020.

**Output 4.1.2 Adanya platform system peringatan dini untuk adaptasi perubahan iklim di komunitas ekosistem DAS Saddang,** dengan indikator 1 platform sistem peringatan dini. Catatan untuk output ini yaitu, informasi diberikan kepada masyarakat lokal pada area DAS Saddang sebelum bencana alam terjadi. Hasil dari baseline survey belum ada realisasi kegiatan ini pada tahun 2020, kegiatan ini masuk pada kuartal III.

### **3. Rekomendasi Hasil Baseline Survey**

Beberapa rekomendasi berdasarkan survey data dasar yang diperoleh di lapangan. Berikut catatan-catatan penting bagi PMU guna meningkatkan performance dalam mengimplementasikan kegiatan dan membangun sistem manajemen pelaksanaan proyek.

1. Guna memastikan kampanye Component I : Outcome 1.2 dan Outcome 1.3; serta Component II : Outcome 2.1 dan Outcome 2.1 terkait peningkatan kapasitas dan keterampilan, sedapat mungkin melakukan *pre test* dan *post test* ataupun dengan istilah lain seperti *pre assesment*. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana guna mendapatkan *input* apakah proses fasilitasi yang telah berjalan telah sesuai dengan target.
2. Masih sehubungan dengan point 1 tersebut khususnya terkait *benefiseries* Tim Project sebaiknya memiliki data base (*realtime/online*) yang selalu terbaru (*update*) minimal memiliki informasi agregasi seperti jenis kelamin (perempuan/laki), stakholder, dan waktu/tempat.
3. Beberapa Outcome dan Output khususnya pada Outcome 3 & 4 beserta turunan outputnya terindikasi memiliki peluang capaian yang dapat diakselerasi melalui pendekatan persuasif ataupun diskusi informal. Sehingga Tim Project sedapat mungkin terus membangun komunikasi dan koordinasi diluar dari konteks aktivitas yang tersedia diproject.
4. Pada output 1.1.1 telah ada eksisting skema perhutanan sosial, berupa 4 HKm di Toraja Utara, 3 HKm di Toraja dan 1 HKm di Enrekang. Hal ini dapat menjadi acuan awal ataupun strategi untuk percepatan program, kelompok kelompok tersebut dapat dikuatkan kembali/revitalisasi jika memungkinkan.

5. Pada output 1.1.2 terkait rehabilitasi 60 ha sebaiknya kegiatan assement lokasi tersebut dapat menghasilkan Rancangan Teknis (rantek) yang berisikan lokasi masing-masing areal (dalam peta) pola tanam, waktu tanam, jenis tanaman, anggota yang melakukan penanaman hingga rencana pembiayaan. Rantek ini dapat dibangun bersama dengan masyarakat ataupun dikonsultasikan dengan masyarakat.
6. Output 2.2.1 dari hasil survey baseline pada desa desa intervensi program telah terdapat eksising kelompok perempuan atau ibu – ibu kreatif. Baik didesa Katomporang, Desa Salipolo Kab.Pinrang. Tim project dapat mengassement lebih dalam apakah kelompok ini dapat kemudian dikuatkan lagi ataukah memilih membentuk kelompok baru.
7. Output 3.1.1 terbentuknya pokja API, sedapat mungkin ditelaah mengingat telah terbentuk Pokja PPRK di level Provinsi. Apakah tetap membentuk Tim Pokja Api dilevel Provinsi ataupun melakukan internalisasi di Tim Pokja PPRK. Meskipun saat ini Pokja PPRK dominan aktivitasnya terkait kontribusi provinsi dalam menyerapan dan atau penurunan GRK. Pokja API yang ditargetkan dapat diasimilasikan dengan Pokja PPRK ataupun membentuk PK.

a. Indikator Pencapaian Outcome dan Output

Tabel 13. Indikator Pencapaian Outcome dan Output

Indikator	Defenisi Indikator	Data Pemilah	Satuan Pengukuran	Sumber Verifikasi (Metode Pengumpulan Data)	Frekuensi Pengumpulan Data	Baseline	Target Tahun		
							2020	2021	2022
Common Indicator (Jumlah kepala keluarga penerima manfaat yang meningkatkan produktivitasnya)	% peningkatan pendapatan rata-rata petani		Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review laporan Akhir</li> <li>Profil keuangan KTH, KPPI, dan Kelompok Perempuan</li> </ul>	Laporan ERR dan Laporan Akhir	-	-	Q5 =	Q6:40% (1.800.000/bln)
TT ( jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung )	Jumlah masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen home industri, manajemen nursery, anggota KTH, anggota KPPI, dan aktivitas-aktivitas pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat (Pelatihan, FGD, workshop, dan seminar)	Kelompok, desa	Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Pembentukan KTH, KPPI, dan Kelompok <i>Home Industry</i></li> <li>Surat Keterangan Kepala Desa pembentukan Manajemen Nursery</li> <li>Daftar hadir peserta</li> </ul>	Laporan tahunan	-	Q1= 942	Q5 =	Q6 =
	Jumlah tenaga kerja Home industri laki-laki/perempuan	Gender	Orang	Surat Keterangan dari Kepala Desa	Laporan Triwulan	-	-	Q4 = Q5 =	-
	Jumlah tenaga kerja Nursery	Kelompok tani	Orang	Surat Keterangan Kepala Desa	Laporan Triwulan	-	-	Q2 = Q3 =	-

ITT ( Jumlah peserta pelatihan )	Jumlah petani yang terlibat dalam setiap kegiatan pelatihan/workshop/seminar/FGD	Kelompok, desa	Orang	Daftar Hadir Peserta	Laporan Triwulan	-	Q1 = 733	Q2,Q3, Q4,Q5	Q6
Projek ( Panduan dan modul )	Penyusunan panduan dan modul pelatihan home industry dan nursery berkelanjutan	-	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul Final terakhir</li> <li>Daftar distribusi modul</li> </ul>	Laporan Triwulan	-	-	Q3, Q4,Q5	-
Projek ( Dokumen perizinan )	Luas lahan yang dimanfaatkan secara legal	Kawasan	Hektar	Dokumen Izin PS	Laporan Triwulan	-	-	Q5 = 5.000	-
Common Indicator (Jumlah praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan)	Penanaman MPTs, dan Mangrove	-	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi Kegiatan penyiapan bibit</li> <li>• Berita acara Daftar distribusi bibit</li> </ul>	Laporan triwulan	-	-	Q4 = Q5 =	-

**b. Risiko dan Rencana Mitigasi**

Adapun kendala-kendala yang muncul dalam pencapaian target indikator setiap aktivitas kegiatan dan rencana mitigasi pada Kuartal I, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 14. Risiko dan Rencana Mitigasi**

Kategori Risiko	Deskripsi	Tingkat Pengaruh	Kemungkinan Terjadi	Rencana Mitigasi
		High, Medium, Low	High, Medium, Low	
<b>Sosial &amp; Gender</b>	Sejarah penguasaan lahan dalam kawasan hutan oleh warga	Tinggi	Tinggi	Distribusi kegiatan dan pelibatan para pihak secara seimbang.
	Keyakinan dan cara pandang masyarakat terhadap relasi gender	Tinggi	Tinggi	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait isu gender
	Kegiatan adat dan keagamaan di bulan Desember yang juga bertepatan dengan perayaan tahun baru menghambat kegiatan	Tinggi	Tinggi	Menjadwal ulang kegiatan yang bertepatan dengan kegiatan adat dan keagamaan warga desa
	Partisipasi / keterlibatan kelompok rentan dan perempuan dalam mengikuti proses peningkatan kapasitas termasuk mengemukakan pendapat/usulan	Medium	Medium	Memastikan proses palaksanaan SGIP sesuai dengan konteks proyek
<b>Lingkungan</b>	Curah hujan tinggi berdampak pada bencana alam seperti banjir baik di Hulu maupun di Hilir DAS Saddang	Tinggi	Tinggi	Update peta kerawanan bencana banjir dan longsor
				Deep Assessment untuk penentuan lokasi pengusulan izin PS dan areal rehabilitasi
<b>Kesehatan</b>	Tinggiinya penyebaran virus COVID-19 diakhir tahun 2020 dan awal 2021 menghambat serangkaian kegiatan-kegiatan pertemuan formal	Tinggi	Tinggi	Menerapkan secara ketat Protokol Kesehatan COVID-19 dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tatap muka Membangun Sistem Manajemen Komunikasi berbasis Online
<b>Keberlanjutan</b>	Ketergantungan masyarakat terhadap pendamping pihak luar	Tinggi	Tinggi	Pelibatan masyarakat secara intensif dalam pelaksanaan kegiatan rutin

				Pengorganisasia masyarakat secara partisipatif
				Penerapan Participatory Action Research dalam setiap kegiatan
<b>Penjadwalan</b>	Kondisi infrastruktur transportasi di beberapa desa dampingan di wilayah hulu tidak memadai	Medium	Medium	Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan melihat kondisi cuaca
	Kapasitas sumbe daya manusia pelaksan kegiatan masih minim.	Tinggi	Medium	Membangun sistem peningkatan kapasitas yang melalui rapat berkala
<b>Reputasi</b>	Tindakan asusila anggota PMU Proyek	Rendah	Rendah	Pengembangan kode etik dan penerapan kebijakan konsorsium dibutuhkan pengawasan bersama
	Tindakan koruptif anggota PMU Proyek	Rendah	Rendah	Memperkuat pengawasan SOP Keuangan dan Sistem pengawasan ganda antara program dan keuangan
<b>Manajemen</b>	Rasio desa dampingan tidak sebanding dengan jumlah FO di Kabupaten Pinrang sehingga menghambat seluruh proses kegiatan	Tinggi	Tinggi	Mengajukan penambahan 3 fasilitator untuk 3 desa intervensi di Kabupaten Pinrang
<b>Pembiayaan</b>	Kesenjangan penjadwalan antara proses pencairan dengan kegiatan	Sedang	Rendah	Pencairan alternatif dana talangan
	Penyalahgunaan pemanfaatan anggaran	Rendah	Rendah	Pembekalan secara intens SOP Keuangan kepada PMU dengan menggunakan form-form keuangan
				Manajer keuangan dibackup asisten keuangan untuk PMU

## F. RENCANA KUARTAL KEDUA

Pada kegiatan Kuarter Pertama, ada satu kegiatan yang belum selesai dan masih berlanjut, yaitu activity 1.2.2.1. Fasilitas Pembentukan KTH. Kegiatan pembentukan KTH butuh proses sosialisasi, perekrutan anggota KTH, dan verifikasi data. Selain itu jumlah KTH di setiap desa cukup banyak sehingga masih ada desa yang belum terbentuk kelompoknya. Rangkaian kegiatan kegiatan ini juga berlanjut pada pembentukan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut). Activities ini masih dimasukkan dalam Kuarter II.

Berikut daftar kegiatan-kegiatan pada Kuarter II periode Januari hingga Maret 2021.

**Tabel 15. Timeframe Kuarter II (Kedua) Periode Januari-Maret 2021.**

OUTPUT	ACTIVITIES	2021			Remarks
		1	2	3	
1.1.1. Adanya akses legal dan penguatan skema Perhutanan Sosial	1.1.1.2. Fasilitas penyusunan dokumen pengusulan izin perhutanan sosial				
	1.1.1.3. Operasionalisasi Outcome Leader Social Forestry (Program Manager Hulu)				
1.1.2. Meningkatnya tutupan lahan hutan	1.1.2.1. Assesment area rehabilitasi hutan				
	1.1.2.2. Rehabilitasi lahan hutan dengan pola agroforestry				Kegiatan groundcheck lapangan area rehabilitasi lahan hutan (Sub activity 1.1.2.2.1)
	1.1.2.3. Pembangunan Nursery				
1.2.1. Meningkatnya kapasitas pendamping dan masyarakat lokal dalam skema Perhutanan Sosial	1.2.1.2. Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hulu				
	1.2.1.3. Sosialisasi perhutanan sosial di tiap desa sasaran project				
	1.2.1.4. Pertemuan rutin di tiap desa untuk penguatan kapasitas kelompok				
1.2.2. Meningkatnya kapasitas para pihak dalam pengelolaan hutan berkelanjutan	1.2.2.1. Fasilitas Pembentukan KTH				Masih ada beberapa Desa yang belum terbentuk KTH/Gapoktannya sehingga dilanjutkan pada Januari 2021

1.2.3 Meningkatnya dukungan Para Pihak dalam Mendorong Skema Perhutanan Sosial	1.2.3.3. FGD rutin pemantauan capaian TIM POKJA PPS				
	1.2.3.4. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hulu				
1.3.1 Kelompok tani hutan, perempuan dan rentan dalam mengelola pangan hutan berkelanjutan	1.3.1.3. Fasilitasi penyusunan modul budidaya pangan hutan				
1.3.2. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pengolahan pangan hutan	1.3.2.3. Fasilitasi penyusunan modul teknis pengoperasian dan maintenance peralatan				
1.3.3. Terserapnya produk pangan hutan ke pasar	1.3.3.1. Studi supply chain dan value chain produk pangan hutan				
2.1.1 Terbentuk dan berjalannya Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) dan pendamping lapangan sebagai motor penggerak aksi adaptasi perubahan iklim di level desa dan kecamatan	2.1.1.2 Fasilitasi Pertemuan rutin KPPI				
	2.1.1.3 Operasionalisasi Fasilitator Lapangan Wilayah Hilir				
2.1.2 Meningkatnya kapasitas serta keterampilan KPPI dan para pihak dalam perbaikan tata kelola dan daya dukung pesisir di hilir DAS	2.1.2.1 Pelatihan Kepemimpinan KPPI				
	2.1.2.2 Pelatihan memfasilitasi dan pendampingan				
	2.1.2.3 Pelatihan budidaya tanaman mangrove				
	2.1.2.4 Pertemuan konsultasi rutin KPPI				
	2.1.2.5. Kajian Budidaya Tambak				
	2.1.2.6. Operasionalisasi Coordinator Officer (Program Officer/PO) Wilayah Hilir				

2.1.3 Terehabilitasinya area pesisir di Hilir DAS Saddang	2.1.3.1 Penyediaan peralatan rehabilitasi lahan pesisir				
	2.1.3.2 Fasilitasi penyusunan panduan teknis pengoperasian dan perawatan peralatan nursery				
2.2.1 Peningkatan keterampilan, kelompok perempuan dan rentan dalam pengembangan usaha kreatif dan diversifikasi pangan	2.2.1.4 Operasionalisasi Outcome Leader Coastal (Program Manager Hilir)				
2.2.2 Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dalam mendorong usaha-usaha kreatif dan diversifikasi pangan	2.2.2.1 Pengadaan peralatan pengolahan Sumber Daya Alam Pesisir				
	2.2.2.2 Pengadaan peralatan pengolahan produk diversifikasi pangan				
	2.2.2.3 Fasilitasi penyusunan modul teknis pengoperasian dan maintenance peralatan home industry & budidaya				
2.2.3 Adanya jaringan pemasaran untuk usaha kreatif dan diversifikasi pangan	2.2.3.1 Studi supply chain dan value chain produk diversifikasi pangan				
3.1.1. Penguatan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (POKJA PPRKD)	3.1.1.1. Pertemuan multipihak tim POKJA PPRKD (Kelompok Kerja - Penyusunan Pembangunan Rendah Karbon Daerah)				
	3.1.1.2. Workshop penyusunan program tim POKJA PPRKD tahun 2021				
	3.1.1.3. Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim				
	3.1.1.4. Fasilitasi diskusi rutin dengan Tim POKJA-PPRKD				

3.1.2. Terinternalisasinya Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim ke kebijakan Pemerintah Daerah, serta adanya dokumen perencanaan rencana aksi adaptasi tingkat daerah	3.1.2.1. Pertemuan multipihak dalam penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim				
	3.1.2.2. Kajian Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim				
	3.1.2.3. Fasilitasi pertemuan rutin Tim POKJA-PPRKKD dalam penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Daerah				
4.1.1. Terdiseminasikannya seluruh komponen program untuk menguatkan dan mendorong kebijakan serta keberpihakan	4.1.1.1. Pembuatan dan launching film dokumenter terkait aksi adaptasi perubahan iklim				Saat ini peralatan yang tersedia masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu tambahan beberapa peralatan untuk membuat hasil film lebih maksimal, dan juga proses produksi yang lebih efisien.
	4.1.1.2. Penyusunan Buku Best Practice dan Lesson Learned Adaptasi Perubahan Iklim dan Jurnal Adaptasi Perubahan Iklim				Berdasarkan usulan perubahan konsep Diseminasi dari PMU yang telah disampaikan dan telah disetujui oleh NIE (Kemitraan) pada tanggal 7 Desember 2020, serta ToR Rencana Kerja Diseminasi yang dikirimkan per tanggal 8 Desember 2020, terdapat beberapa perubahan pada Aktivitas ini. Oleh karena itu, pada kuartal kedua akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 1) Konsultasi penulisan jurnal (Sub Act 4.1.1.2.3.) pada Februari 2021; 2) Evaluasi Penulisan Jurnal dan Buku (Sub Act 4.1.1.2.6.) pada Maret 2021; dan 3) Coaching penulisan Buku dan Jurnal (Sub Act 4.1.1.1.6.) pada Januari 2021 dan Februari 2021
	4.1.1.5. Pembuatan dan pengelolaan Website dan Media Sosial Adaptasi Perubahan Iklim ekosistem DAS Saddang				

	4.1.1.6. Fasilitasi Kemitraan dengan provider dalam publikasi Aksi adaptasi perubahan iklim				
<b>Monitoring &amp; Evaluasi</b>	Review Laporan, Wawancara, FGD PMU				

## G. DATA ASET

Aset pembelian dari program ini diberi label dan diinput dalam data aset. Berikut pemutakhiran data aset.

**Tabel 16. Daftar Aset**

No.	Nomor Asset	Purchase Date	Assets Name	Total Unit	Price/Unit (IDR)	TOTAL (IDR)	Location / User	Condition
1	KPBL-EL/01/001	14-Nov-20	<b>Mirrorless Camera</b> - Fujifilm X-A7	3	9.020.000	27.060.000	Makassar Office	Good
2	KPBL-EL/01/002	14-Nov-20	<b>Mirrorless Camera</b> - Fujifilm X-A7				FO - Dissemination	Good
3	KPBL-EL/01/003	14-Nov-20	<b>Mirrorless Camera</b> - Fujifilm X-A7				FO - Dissemination	Good
4	KPBL-EL/02/001	14-Nov-20	<b>Laptop</b> - ASUS TUF F15	1	15.950.000	15.950.000	Makassar Office / Knowledge Management	Good
5	KPBL-EL/03/001	14-Nov-20	<b>Laptop</b> - ASUS PRO	2	11.770.000	23.540.000	Enrekang & Toraja Office / OL Social Forestry	Good
6	KPBL-EL/03/002	14-Nov-20	<b>Laptop</b> - ASUS PRO				Pinrang Office / OL Coastal	Good
7	KPBL-EL/04/001	14-Nov-20	<b>Laptop</b> - ASUS X441UA	1	8.250.000	8.250.000	Makassar Office / Finance Manager	Good
8	KPBL-EL/05/001	14-Nov-20	<b>Scanner</b> - Fujitsu ScanSnap S1300	2	5.060.000	10.120.000	Makassar Office	Good

9	KPBL-EL/05/002	14-Nov-20	<b>Scanner</b> - Fujitsu ScanSnap S1300				Enrekang Office	Good
10	KPBL-EL/06/001	14-Nov-20	<b>Scanner</b> - Epson WorkForce ES-50	2	2.860.000	5.720.000	Toraja Office	Good
11	KPBL-EL/06/002	14-Nov-20	<b>Scanner</b> - Epson WorkForce ES-50				Pinrang Office	Good
12	KPBL-EL/07/001	14-Nov-20	<b>Printer</b> - Brother T510W	4	3.245.000	12.980.000	Makassar Office	Good
13	KPBL-EL/07/002	14-Nov-20	<b>Printer</b> - Brother T510W				Enrekang Office	Good
14	KPBL-EL/07/003	14-Nov-20	<b>Printer</b> - Brother T510W				Toraja Office	Good
15	KPBL-EL/07/004	14-Nov-20	<b>Printer</b> - Brother T510W				Pinrang Office	Good
16	KPBL-EL/08/001	14-Nov-20	<b>Personal Computer</b> for Multimedia & Data Storage Server /// Intel i9-10th gen - RAM 32 GB - NVIDIA GTX 1660 - HDD 4TB - SSD 500 GB - Keyboard Logitech - Mouse Logitech - Liquid Cooler - PSU 750 W 80+ - <b>Monitor LG 24"</b>	1	35.200.000	35.200.000	Makassar Office	Good

17	KPBL-EL/09/001	14-Nov-20	<b>Projector / LCD</b> - Portable - ViewSonic	3	4.070.000	12.210.000	Enrekang Office	Good
18	KPBL-EL/09/002	14-Nov-20	<b>Projector / LCD</b> - Portable - ViewSonic				Pinrang Office	Good
19	KPBL-EL/09/003	14-Nov-20	<b>Projector / LCD</b> - Portable - ViewSonic				Toraja Office	Good
20	KPBL-EL/10/001	20-Nov-20	<b>Drone / UAV</b> - DJI Mavic 2 Pro + <b>Fly More Kit</b> (3 Battery, Propeller, Charger)	3	28.250.000	84.750.000	Makassar Office	Good
21	KPBL-EL/10/002	20-Nov-20	<b>Drone / UAV</b> - DJI Mavic 2 Pro + <b>Fly More Kit</b> (3 Battery, Propeller, Charger)				Makassar Office	Good
22	KPBL-EL/10/003	20-Nov-20	<b>Drone / UAV</b> - DJI Mavic 2 Pro + <b>Fly More Kit</b> (3 Battery, Propeller, Charger)				Makassar Office	Good
23	KPBL-EL/11/001	20-Nov-20	<b>Ground Control Station</b> - Ipad Mini 5-8" 64 GB	3	7.250.000	21.750.000	Makassar Office	Good
24	KPBL-EL/11/002	20-Nov-20	<b>Ground Control Station</b> - Ipad Mini 5-8" 64 GB				Makassar Office	Good
25	KPBL-EL/11/003	20-Nov-20	<b>Ground Control Station</b> - Ipad Mini 5-8" 64 GB				Makassar Office	Good

## H. PENUTUP

Demikianlah Laporan Kuartal Pertama ini ditulis berdasarkan kemajuan teknis untuk mengukur capaian Outcome dan Output di setiap Komponen baik di wilayah Hulu DAS Saddang maupun di Hilir DAS Saddang.

Makassar, 16 Januari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Gusti Zainal', written over a horizontal line.

**Mohammad Gusti Zainal**

**Project Coordinator**

## I. LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Kegiatan dan Peserta

No	Lokasi (Kab)	Kegiatan	Tgl	Participant															Keterangan
				Petani			Ormas			Staff Pemerintah			Lainnya			L	P	Total	
				L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
1	Toraja Utara	Pertemuan Multipihak Pengusuln Skema Perhutana n Sosial	01 Desember 2020	2	-	2	-	-	-	18	1	19	-	-	-	20	1	21	Staff Pemerintah yang tergabung didalamnya antara lain KPH Saddang II, Camat, BPBD, Dinas Pertanian serta Pemerintah Desa
2	Toraja Utara	Sosialisasi Perhutana n Sosial dan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	14 Desember 2020	8	-	8	-	-	-	8	3	11	1	3	4	17	6	23	Staff Pemerintahan, yang tergabung didalamnya antara lain Pemerintah kelurahan, KPH Saddang II, Kecamatan, Dinas Pertanian Lainnya, yang tergabung didalamnya antara lain kelompok dasawisma, majelis taklim dan pemuda
3	Toraja Utara	Sosialisasi Perhutana n Sosial dan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	15 Desember 2020	21	6	27	-	-	-	7	-	7	4	5	9	32	11	43	Lainnya, yang tergabung didalamnya antara lain kelompok pemuda
4	Toraja Utara	Sosialisasi Perhutana n Sosial dan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	19 Desember 2020	2	-	2	-	-	-	6	1	7	1	5	6	9	6	15	Staff Pemerintahan, yang tergabung didalamnya antara lain Pemerintah Desa dan KPH Saddang II Lainnya, yang tergabung didalamnya antara lain Pemuda dan Kelompok PKK

5	Toraja Utara	Pertemuan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	20 Desember 2020	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9	
6	Toraja Utara	Pertemuan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	21 Desember 2020	16	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5	21	
7	Toraja Utara	Pertemuan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	20 Desember 2020	14	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	15	
8	Toraja Utara	Pertemuan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	21 Desember 2020	36	3	39	-	-	-	-	-	-	-	-	36	3	39	
9	Toraja Utara	Pertemuan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	20 Desember 2020	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	
10	Toraja Utara	Pertemuan Pembentukan Kelompok Tani Hutan	19 Desember 2020	25	7	32	-	-	-	-	-	-	-	-	25	7	32	
11	Tana Toraja	Pertemuan multipihak pengusahaan skema perhutanan sosial	2 Des 2020	3	-	3	-	-	-	10	3	13	-	-	13	3	16	
12	Tana Toraja	Sosialisasi Program dan Perhutanan Sosial Desa	17 Des 2020	5	10	15	-	-	-	6	1	7	-	-	22	11	22	

		Randan Batu																	
13	Tana Toraja	Sosialisasi Program dan Perhutanan Sosial Desa Sese Salu	17 Des 2020	8	2	10	-	8	8	17	2	19	-	-	-	25	12	37	
14	Tana Toraja	Sosialisasi Program dan Perhutanan Sosial Desa Paku	18 Des 2020	4	3	7	-	2	2	20	7	27	-	-	-	24	12	36	
15	Enreka ng	Pertemuan Multi Pihak dalam Perencanaan Skema Perhutanan Sosial	3 Des 2020	1		1				15	4	19	7		7	23	4	27	
16	Enreka ng	Sosialisasi Program dan Perhutanan Sosial Tingkat Desa (desa Ranga, desa Paladang, Desa Tungka, desa Pundilemo)	12 Des – 15 Des 2020	35	10	45				20	4	24	18	1	19	73	15	88	
17	Enreka ng	Fasilitasi pembentukan KTH (desa Ranga, desa Paladang, Desa Tungka)	14 Des – 25 Des 2020	218	24	242				22		22	20		20	260	24	284	
<b>Total</b>				<b>413</b>	<b>70</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>26</b>	<b>175</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>613</b>	<b>120</b>	<b>733</b>	

## Lampiran 2: Daftar Anggora KPPI

KPPI DESA PARIA		Jenis Kelamin
No	Nama	
1	Aldi	Laki-Laki
2	Muh. Idris Ridwan	Laki-Laki
3	Nasaruddin	Laki-Laki
4	Abdul Rahman	Laki-Laki
5	Satriana	Perempuan
6	Indra Wahyuni	Perempuan
7	Muh. Oskar	Laki-Laki
8	Dedy	Laki-Laki
9	Sahar	Laki-Laki
10	Arman	Laki-Laki
KPPI DESA SALIPOLO		
No	Nama	
1	Abdul Hakim	Laki-Laki
2	Abdul Rahman	Laki-Laki
3	Wahyu	Laki-Laki
4	Tri Indarwati	Perempuan
5	Sitti Salwa	Perempuan
6	Abdul Hakim	Laki-Laki
7	Nur Aliza	Perempuan
8	Elsa Lisdayanti	Perempuan
9	Hasmah	Perempuan
10	Agusetiawan	Laki-Laki
11	Sri Wahyuni	Perempuan
12	Aplia Rosa	Perempuan
13	Misdar	Laki-Laki
KPPI DESA BABABINANGA		
No	Nama	
1	Ilham	Laki-Laki
2	Syamsuddin	Laki-Laki
3	Irfan	Laki-Laki
4	Muh. Nur	Laki-Laki
5	Ridwan	Laki-Laki
6	Asbar	Laki-Laki
7	Akbar	Laki-Laki
8	Alibar	Laki-Laki
9	Nasir	Laki-Laki
10	Aris	Laki-Laki
11	Tamaring (Bapak Selvi)	Laki-Laki
12	Ahmad (Bapak Hendra)	Laki-Laki
13	Munding (Bapak Heril)	Laki-Laki
14	Jumri	Perempuan
15	Rahma	Perempuan
16	Ansar	Laki-Laki
17	Sakari	Laki-Laki
18	Risal	Laki-Laki

KPPI DESA KATOMPORANG		Jenis Kelamin
No	Nama	
1	Hendra	Laki-Laki
2	Takdir	Laki-Laki
3	Nurhikmah	Perempuan
4	Mahendra Wardana	Perempuan
5	Sarina	Perempuan
6	Fikran	Laki-Laki
7	A Ashari	Laki-Laki
8	Nursamsi	Perempuan
9	Zulhamidzan Wisnu	Laki-Laki
10	Taufiq Hidayah	Laki-Laki
11	Juanda Ramadhani	Perempuan
12	Azizah	Perempuan
13	Sri Wahyuni	Perempuan
14	Sultan	Laki-Laki
15	Muh Yahya	Laki-Laki
16	Jamal Labaja	Perempuan
17	Adriyan Afni	Perempuan
KPPI DESA MASSEWAE		
No	Nama	
1	Riska Amelia	Perempuan
2	Astrini	Perempuan
3	Alfian	Laki-Laki
4	Abdurrahman Pais	Laki-Laki
5	Nuraini	Perempuan
6	Aisyah Rahmadhani	Perempuan
7	Muhajirin Suciana	Laki-Laki
8	Muh Amin	Laki-Laki
9	Jefri	Laki-Laki
10	Sahrul	Laki-Laki
11	Aksa	Laki-Laki
12	Arya	Laki-Laki
13	Yudah	Laki-Laki
14	Randy	Laki-Laki
15	Irma	Perempuan
16	Nadilla shopah	Perempuan
17	Irfan	Laki-Laki

### Lamporan 3: Daftar Responden *Baseline Survey*

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat (Desa)
1	Yuspi	45	Laki-laki	Sapan Kua-kua
2	Simon	73	Laki-laki	Sapan Kua-kua
3	Yeka banne	62	Laki-laki	Sapan Kua-kua
4	Muslimah	23	Perempuan	Bokin
5	Yasir Pasang	32	Laki-laki	Bokin
6	Murni Tamrin	47	Perempuan	Bokin
7	Petrus Panten	58	Laki-laki	Karre limbong
8	Berta Tandiarra	53	Perempuan	Karre limbong
9	Eben Heizek	30	Laki-laki	Karre limbong
10	Muthmainna Sarira	27	Perempuan	Bokin
11	Yusuf Ranggina	49	Laki-laki	Karre Limbong
12	John	30	Laki-laki	Sapan Kua-kua
13	Sartika Dewi	21	Perempuan	Randan Batu
14	Robertus	40	Laki-laki	Randan Batu
15	Kristianus Welli Edison	39	Laki-laki	Randan Batu
16	Yurosto	40	Laki-laki	Randan Batu
17	Matius Tappang	43	Laki-laki	Randan Batu
18	Jemmianus	18	Laki-laki	Paku
19	Nelly Langi Minanga		Perempuan	Paku
20	Agustina	27	Perempuan	Sesse Salu
21	Demas Matana	30	Laki-laki	Sesse Salu
22	Parerungan	35	Laki-laki	Randan Batu
23	Markus Untin Paretta	42	Laki-laki	Paku
24	Allo Boyong	35	Laki-laki	Sesse Salu
25	Maryati	63	Perempuan	Paladang
26	Mahir	60	Laki-laki	Paladang
27	Mustafa	62	Laki-laki	Paladang
28	Disman	50	Laki-laki	Pundilemo
29	Sila	47	Laki-laki	Pundilemo
30	Sukarman	52	Laki-laki	Pundilemo
31	Tajuddin	48	Laki-laki	Pundilemo

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat (Desa)
32	Hasrim	48	Laki-laki	Ranga
33	Hana	47	Perempuan	Ranga
34	Ridwan	50	Laki-laki	Tungka
35	Laras	62	Perempuan	Tungka
36	Tija	48	Laki-laki	Tungka
37	Lamu	52	Laki-laki	Tungka
38	Kamaruddin	46	Laki-laki	Paladang
39	Makim	48	Laki-laki	Ranga
40	Ulfa Nursuci	27	Perempuan	Pundilemo
41	Arlan	68	Laki-laki	Bababinanga
42	Yuli	31	Perempuan	Bababinanga
43	Munding	41	Laki-laki	Bababinanga
44	Murlani	47	Perempuan	Massewae
45	Rini	36	Perempuan	Massewae
46	Sumiati	52	Perempuan	Dusun Lasape, Desa Katomporang
47	Wisnu	20	Laki-laki	Dusun Lasape, Desa Katomporang
48	Kasma	44	Perempuan	Dusun Lasape, Desa Katomporang
49	Nasir	61	Laki-laki	Desa Paria
50	Rustam	23	Laki-laki	Desa Paria
51	Habibah	48	Perempuan	Desa Salipolo
52	Siti Rahmah	47	Perempuan	Desa Salipolo
53	Musdalifah	24	Perempuan	Bababinanga
54	Jupri	49	Laki-laki	Salipolo
55	Rustan, S	41	Laki-laki	Katomporang
56	Falu Sari	50	Laki-laki	Paria

## Lampiran 4: Daftar Peserta Pelatihan Diseminasi Berbasis Drone

PMU			
No	Nama	Gender	Basic Knowledge / Background
1	Andi Faisal Hidayat	L	Fotografi Videografi Editing Foto Ilustrasi
2	A Makbul Kahar Rasyid	L	Fotografi Videografi Editing Foto Editing Video Ilustrasi Animasi Pengoperasian Drone/UAV (Pilot) Aerial Fotografi dan Videografi (UAV)
Non-PMU			
3	Ahyari Rahman	L	Spasial ArcGIS Dasar Pengoperasian Drone
4	Andi Buldi Saisar	L	Spasial ArcGIS Media / Jurnalistik
5	Muh Ilham Nasir	L	Spasial ArcGIS Pengoperasian Drone/UAV (Pilot) Ground Control System (GCS) Pengolahan Data GIS dan Orthomosaic
6	Muh Rozali Mirzaq	L	Spasial ArcGIS Dasar Pengoperasian Drone
7	Nur Intan Wiswati	P	Spasial ArcGIS Pengolahan Data GIS dan Orthomosaic Media / Jurnalistik
8	Syaeful Rahmat	L	Spasial ArcGIS Pengoperasian Drone/UAV (Pilot) Ground Control System (GCS) Pengolahan Data GIS dan Orthomosaic
9	Teguh Bimantara	L	ArcGIS Survey Biofisik

## Lampiran 5: Contoh Coding Book

### Contoh CODING BOOK

#### KOMODITAS

##### 01. Kopi

###### **Sejarah Pengelolaan Kopi**

*Berisi tentang awal mula adanya jenis komoditi, seperti tahun penanaman komoditi, alasan pemilihan jenis, termasuk dalam program pemerintah*

###### **Status Kepemilikan Lahan**

*Berisi tentang kepemilikan lahan, sistem kerja (jika bukan kepemilikan pribadi)*

###### **Penanaman**

*Berisi tentang bagaimana proses penanaman, siapa yang tanam, berapa yang ditanam, berapa luasan yang ditanam, harga bibit, biaya yang dikeluarkan*

###### **Pemeliharaan**

*Berisi tentang proses pemeliharaan, jenis pupuk yang dipake, berapa kali pemupukan, perlakuan terhadap tanaman, biaya yang dikeluarkan*

###### **Pemanenan**

*Berisi tentang proses pemanenan, aktor yang terlibat dalam pemanenan, jumlah hasil panen, penggunaan peralatan, biaya yang dikeluarkan*

###### **Pengolahan bahan baku**

*Berisi tentang proses pengolahan bahan baku, penggunaan peralatan, lamanya proses pengolahan, hasil pengolahan*

###### **Pemasaran**

- **Promosi**  
*Berisi tentang upaya yang dilakukan dalam memberitahukan konsumen terkait hasil panen atau produk*
- **Mekanisme Penentuan Harga**  
*Berisi tentang bagaimana model atau negosiasi dalam penentuan harga*
- **Model Transaksi**  
*Berisi tentang bagaimana mekanisme transaksi dalam penjualan hasil panen atau produk masyarakat, lokasi penjualan*
- **Aktor yang terlibat**  
*Berisi tentang siapa – siapa aktor yang terlibat dalam proses transaksi jual – beli, peran setiap aktor*
- **Pendapatan**  
*Berisi tentang berapa jumlah hasil panen atau produk yang dijual, berapa keuntungan yang diperoleh*

##### 02. Madu

###### **Sejarah Pengelolaan Madu**

*Berisi tentang awal mula adanya jenis komoditi, seperti tahun penanaman komoditi, alasan pemilihan jenis, termasuk dalam program pemerintah*

###### **Status Kepemilikan Lahan**

*Berisi tentang kepemilikan lahan, sistem kerja (jika bukan kepemilikan pribadi)*

###### **Penanaman**

*Berisi tentang bagaimana proses penanaman, siapa yang tanam, berapa yang ditanam, berapa luasan yang ditanam, harga bibit, biaya yang dikeluarkan*

**Pemeliharaan**

*Berisi tentang proses pemeliharaan, jenis pupuk yang dipake, berapa kali pemupukan, perlakuan terhadap tanaman, biaya yang dikeluarkan*

**Pemanenan**

*Berisi tentang proses pemanenan, aktor yang terlibat dalam pemanenan, jumlah hasil panen, penggunaan peralatan, biaya yang dikeluarkan*

**Pengolahan bahan baku**

*Berisi tentang proses pengolahan bahan baku, penggunaan peralatan, lamanya proses pengolahan, hasil pengolahan*

**Pemasaran**

- **Promosi**  
*Berisi tentang upaya yang dilakukan dalam memberitahukan konsumen terkait hasil panen atau produk*
- **Mekanisme Penentuan Harga**  
*Berisi tentang bagaimana model atau negosiasi dalam penentuan harga*
- **Model Transaksi**  
*Berisi tentang bagaimana mekanisme transaksi dalam penjualan hasil panen atau produk masyarakat, lokasi penjualan*
- **Aktor yang terlibat**  
*Berisi tentang siapa – siapa aktor yang terlibat dalam proses transaksi jual – beli, peran setiap aktor*
- **Pendapatan**  
*Berisi tentang berapa jumlah hasil panen atau produk yang dijual, berapa keuntungan yang diperoleh*